

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

**Konsep dan Implementasi
Pendekatan Psikologi
Sosial & Komunitas**

Hadi Suyono

NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

**Konsep dan Implementasi
Pendekatan Psikologi
Sosial & Komunitas**

Hadi Suyono



SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Konsep dan implementasi Pendekatan Psikologi Sosial & Komunitas

Penulis:

Hadi Suyono

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

ISBN: 978-623-183-036-4

Editor:

Nilnasari Nur Azizah

Tata Letak Isi:

Kurniaji Satoto

Desain Cover:

Bayu Aji Setiawan

x + 198 hlm: 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Maret 2023

Diterbitkan atas kerja sama:

Clinic for Community Empowerment

Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan

dengan

Jejak Pustaka

Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021

Sekretariat Jejak Imaji, RT 04 Kepuhkulon, Wirokerten

Banguntapan Bantul Yogyakarta

jejakpustaka@gmail.com

081320748380

PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin dipanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. karya buku ini bisa terbit. Hanya karena limpahan berkah dan rahmat-Nya buku berjudul *Social Entrepreneurship. Konsep dan Implementasi. Pendekatan Psikologi Sosial dan Komunitas* dapat diselesaikan oleh penulis hingga bisa hadir pada para pembaca. Buku ini ditulis berawal dari situasi pandemi Covid-19 yang membuat perubahan besar bagi kehidupan. Satu hal perubahan yang harus dilakukan adalah bekerja dan sekolah dari rumah. Seperti keluarga-keluarga yang lain, keluarga kami mengalami hal serupa. Kami sekeluarga menjalankan seluruh aktivitas dari rumah. Berhari-hari tak boleh keluar dari rumah. Keluar rumah hanya untuk urusan yang sangat penting dan mendesak.

Tentu saja saat banyak kegiatan diselenggarakan di rumah memerlukan banyak penyesuaian. Termasuk di dalamnya dalam pola bekerja dan pola belajar. Bekerja dengan *work form home* dan belajar menggunakan *daring*. Agar urusan pekerjaan dan sekolah anak-anak lancar, kami memutuskan memasang jaringan internet. Ternyata menyediakan layanan WiFi di rumah membutuhkan biaya yang lumayan tinggi. Kalau hanya untuk kebutuhan pekerjaan dan sekolah jaringan internet yang disediakan masih tersisa banyak. Tidak akan efektif penyediaan jaringan internet untuk berselancar pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Pertimbangan ini yang menjadikan bunda dari anak-anak saya mencoba peruntungan membuka bisnis melalui *online*.

Ide mendirikan bisnis *online* menjadi hikmah tersendiri pada masa pandemi Covid-19. Menjadi tidak merasa bosan berada di rumah karena ada aktivitas baru yang bisa dikerjakan. Bisnis *online* memfokuskan layanannya berkenaan dengan *home décor* berkembang. Meski masih disebut sebagai usaha mikro kecil dan menengah, mitra kami adalah perajin yang ada di beberapa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang mendasari bisnis *online* itu bisa bertahan dan membuat kami bersemangat menjalankannya adalah menapaki langkah kecil yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Maka, kami dalam bisnis *online* tersebut tidak mengambil untung banyak yang penting roda usaha bisa berputar. Pertimbangannya adalah keuntungan yang diambil sedikit menjadikan barang kerajinan bisa dijual dengan harga yang kompetitif dibanding dengan barang-barang yang sama. Dengan harga yang kompetitif menjadikan barang kerajinan laku di pasaran. Ketika barang kerajinan itu laris manis akan ambil terus di perajin.

Ada kepuasan batin saat banyak mengambil barang perajin di masa pandemi Covid-19. Kepuasan batin ini bisa tumbuh karena kegiatan bisnis *online* dapat membantu keberlangsungan ekonomi keluarga para perajin di saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang dilatarbelakangi oleh terpaan gelombang krisis pandemi Covid-19. Belakangan baru memahami, bila bisnis *online* tersebut merupakan bagian *social entrepreneurship* karena kegiatan usaha yang dilakukan tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi memiliki misi sosial, yaitu membantu ketahanan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid-19. Meski dampaknya belum luas, setidaknya bisnis *online* bisa mengentaskan beberapa keluarga dari jerat kemiskinan sebagai dampak pandemi Covid-19.

Pemahaman mengenai *social entrepreneurship* itu diperoleh saat penulis mendapat amanah membidani mata kuliah kewirausahaan sosial. Ada perubahan kurikulum di Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan sehingga melahirkan mata kuliah Kewirausahaan Sosial. Bersama dengan tim kurikulum mendiskusikan terkait dengan mata kuliah ini dari capaian pembelajaran sampai materi yang akan disampaikan pada mahasiswa pascasarjana. Karena terlibat dalam proses merancang mata kuliah kewirausahaan sosial, penulis diberi tugas sebagai pengampunya.

Penulis menerima tugas mengampu mata kuliah Kewirausahaan Sosial karena mempunyai pengalaman terlibat dalam aktivitas *social entrepreneurship* meski belum berskala besar. Setelah berangkat dari

realitas dilanjutkan dengan aktivitas akademik yang diwujudkan melalui penelitian bertemakan *social entrepreneurship*. Berdasarkan pengalaman realitas dan perjalanan akademik mempelajari *social entrepreneurship* melalui penelitian, membaca buku referensi, menelaah jurnal *literature review*, maupun mengkaji jurnal penelitian, penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk buku.

Bersumber dari gagasan penulisan buku bermanfaat untuk memberikan wawasan terhadap penyelesaian berbagai problem pendidikan, ekonomi, politik, lingkungan, budaya, maupun terkait perdamaian yang mendera bangsa ini. Menurut pandangan penulis, *social entrepreneurship* bisa menjadi tawaran ikut berperan serta memecahkan problem bangsa. Harapan tersebut optimis tercapai karena esensi dari *social entrepreneurship* adalah usaha yang dijalankan memuat misi sosial bertujuan menyelesaikan masalah yang terjadi pada komunitas atau lingkungan lebih besar. Akhirnya implementasi dari kewirausahaan sosial memberi dampak positif untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat. Manfaat lain dari buku ini secara akademik dapat digunakan sebagai buku referensi bagi akademisi maupun mahasiswa yang ingin menekuni kewirausahaan sosial. Secara spesifik buku ini juga dapat dijadikan landasan bagi mahasiswa yang memfokuskan kajiannya pada bidang psikologi sosial dan komunitas. Hal ini karena di bagian-bagian tertentu penjelasannya menggunakan pendekatan psikologi sosial dan komunitas. Buku ini dapat menjadi landasan konseptual bagi mahasiswa yang memiliki kajian *social entrepreneurship*.

Akhir kata, kehadiran buku ini semoga menambah khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia. Tiada gading yang tak retak. Apabila masih ada kekurangan dalam penulisan buku, mohon maaf sebesar-besarnya. Penulis mengharap kritik dan saran pada pembaca setelah membaca buku ini agar dapat melakukan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, April 2023

Penulis

Hadi Suyono

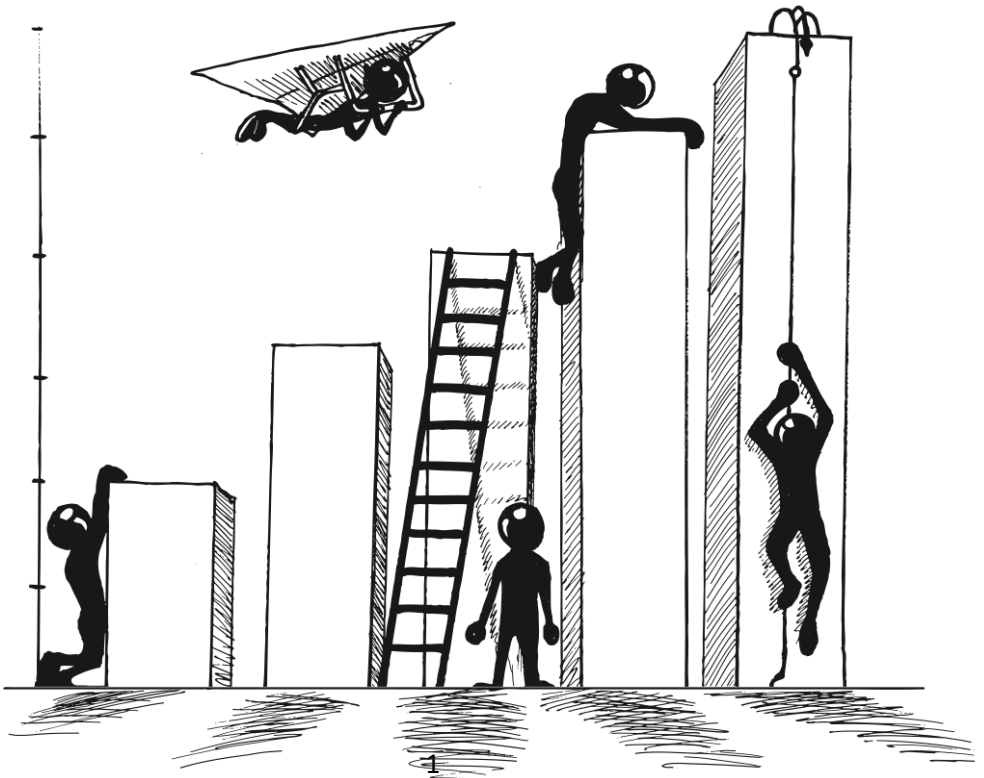
DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAGIAN SATU PROBLEMATIKA DI SEPUTAR NEGERI.....	1
1. Hidup di Negeri Paradoks.....	2
2. Cermin Retak Kebangsaan	28
3. Dampak Pandemi Covid-19	34
BAGIAN 2 MENGAPA <i>SOCIAL ENTREPRENEURSHIP</i>	
PENTING?	41
1. Berangkat dari Problematika Negeri Paradoks dan Kemiskinan	42
2. Kewirausahaan Sosial sebagai Solusi	47
3. Karakteristik Wirausahawan Sosial	58
4. Melakukan Inovasi Sosial dan Melahirkan Perubahan Sosial	73
BAGIAN 3 DASAR KONSEPTUAL <i>SOCIAL</i>	
<i>ENTREPRENEURSHIP</i>	85
1. Ragam Pengertian <i>Social Entrepreneurship</i>	86
2. Pondasi Teoretis <i>Social Entrepreneurship</i>	101
3. Determinan <i>Social Entrepreneurship</i>	118
BAGIAN 4 MERANCANG <i>SOCIAL ENTREPRENEURSHIP,</i>	
IMPLEMENTASI, DAN DAMPAK	125
1. Identifikasi Peluang <i>Social Entrepreneurship</i>	126
2. Mengembangkan Ide	137
3. Mengimplementasikan Ide	142
4. Menumbuhkan Organisasi yang Kuat	148
5. Mengukur Dampak	153

DAFTAR PUSTAKA156
GLOSARIUM191
INDEKS195
TENTANG PENULIS197

BAGIAN 1

Problematika di Seputar Negeri



Hidup di Negeri Paradoks

Sumber Daya Alam Melimpah

Realitasnya keanekaragaman hayati menjadi sumber daya alam melimpah yang dipunyai Indonesia. Data menunjukkan Indonesia memberi kontribusi persentase keanekaragaman hayati dalam jumlah besar di antara jumlah spesies yang ada di dunia. Persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Spesies di Indonesia di Antara Jumlah yang Ada di Dunia

No	Spesies	Persentase dari Jumlah di Dunia
1.	Tumbuhan berbunga	10 %
2.	Mamalia	12 %
3.	Reptil & Amfibi	16 %
4.	Burung	17 %
5.	Ikan	25 %
	Jumlah	80 %

Sumber: Sutoyo (2010)

Keanekaragaman nonhayati juga menjadi sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia. Data memperlihatkan jumlah cadangan mineral di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Cadangan Mineral & Mineral dalam Tahun

No	Mineral & Logam	Jumlah	Cadangan dalam Tahun
1.	Bouksit	202,06 wmt	126 tahun
2.	Nikel	996,19 wmt	208 tahun
3.	Emas	7,03 juta troy	24 tahun

Sumber: Yuniyanto (2014)

Data lain dapat ditambahkan bahwa sumber daya alam nonhayati yang menjadi kekayaan Indonesia dapat disaksikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah Mineral & Logam di Indonesia di Antara Jumlah yang Ada di Dunia

No	Mineral & Logam	Jumlah dalam Ton	Persentase dari Jumlah di Dunia
1.	Nikel	4.500.000	6.08 %
2.	Kobalt	484.461,33	6.82 %
3.	Timbal	12.361.128	14.05 %
4.	Seng	22.139.073	9.63 %
5.	Bouksit	1.000.000.000	3.33 %
6.	Besi	1.823.999.935	0.72 %
7.	Emas	2.500	4.63 %
8.	Timah	800.000	16.67 %
9.	Tembaga	790.000.000	3.29 %
10.	Mangan	130.371.327.30	19.17 %
11.	Krom	2.255.765	0.44 %
12.	Titanium	1.598.306	0.17 %

Sumber: Setiawan (2018).

Belum lagi kemolekan alam Indonesia menjadi anugerah tersendiri yang dilimpahkan Allah Swt. Lingkungan alam yang indah ini memberi berkah bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Fenomenanya dapat dilihat dari menjamurnya destinasi pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat melalui pengelolaan kelompok sadar wisata dan Badan Usaha Milik Desa. Destinasi pariwisata tersebut lebih banyak memberdayakan potensi alam memesona yang ada di lingkungan sekitar (Wahyuningsih & Pradana, 2021; Mahyuni & Satriawan, 2021; Ratwianingsih, et al., 2021).

Seiring dengan perjalanan pengembangan pariwisata, membawa industri ekonomi kreatif ikut menggeliat di berbagai wilayah. Industri ekonomi kreatif merupakan bagian utama yang menyertai dari dinamika pertumbuhan pariwisata berbasis sumber daya alam. Realitas yang terjadi adalah saat daerah mampu menghadirkan

banyak wisatawan serta membuka kesempatan pelaku usaha menengah dan mikro berkreasi mengembangkan bisnis kuliner, kerajinan, *home stay*, jasa transportasi, dan layanan *tour* (Anggraeni & Sri, 2020; Satria & Wibowo, 2021; Mudji, et al., 2021; Maulana & Hermansah, 2021; Anggarini, 2021; Santosa & Hendriyati, 2022).

Sayangnya keberhasilan dalam membangun pariwisata menggunakan alam yang rupawan tidak merata di pelosok negeri. Hanya daerah tertentu yang mempunyai kemampuan sumber daya manusia kreatif, inovatif, dan solutif yang dapat merealisasikan gagasan untuk membangkitkan sektor pariwisata menjadi stimulasi meningkatnya industri ekonomi kreatif. Selebihnya, daerah-daerah lain bermodalkan sumber daya alam yang cantik tidak berdaya menggerakkan pariwisata sehingga berimbas pada industri ekonomi kreatif yang tidak berjalan. Sumber masalahnya adalah minimnya keterampilan untuk mengelola pariwisata di daerah ini (Amilia, et al., 2020; Asmara, 2020; Utomo & Wirdayanti, 2021; Sadat, et al., 2021).

Tidak Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Kemiskinan

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, tentu saja cadangan terkini sumber daya alam berupa mineral dan logam semakin menyusut karena proses eksploitasi pertambangan tak terkendali. Sama halnya dengan keanekaragaman hayati, jumlahnya semakin terbatas karena pemanfaatan untuk kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan (Purba, et al., 2020; Nugroho, 2020; Afin & Kiono, 2021; Zalvino, 2021; Azwani, 2021; Irzon, 2021). Tak jauh berbeda dengan pengelolaan desa wisata yang mengandalkan sumber daya alam, ternyata ada yang tidak memperhatikan kelestarian dan akibatnya mengganggu keseimbangan ekosistem sehingga menimbulkan masalah lingkungan (Limbong & Soetomo, 2013; Siregar, 2019; Nurhayati, 2021).

Secara lebih luas, mengenai potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia berkaitan dengan keanekaragaman hayati, nonhayati, dan alam yang indah. Saat tidak dikelola secara baik, tidak akan

memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Problem ini dipicu oleh eksploitasi secara serampangan sehingga menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam menjadi kurang optimal. Kelemahan tersebut menjadikan eksploitasi terhadap sumber daya alam tidak berkorelasi dengan peningkatan ekonomi warga. Seperti hidup di negeri paradoks. Negaranya memiliki kekayaan hayati, nonhayati, dan alam yang permai, tetapi terbukti warganya masih banyak yang hidup kurang sejahtera. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin ada 27.52 juta jiwa atau 10.12 % dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia (Sudibyo, et al., 2020; Safira, et al., 2021).

Melihat dari persentase yang ada, jumlah penduduk miskin Indonesia termasuk tinggi dibanding dengan negara di Asia Tenggara seperti Thailand sebanyak 9.9 %, Vietnam 8 %, Malaysia 3.8 %, Singapura 0.9 %, Kamboja 0.3 %, dan Singapura 0.1 %. Kemiskinan Indonesia hanya lebih rendah dari Filipina sebanyak 20.5 % dan Myanmar 24.1 % (Nasution, et al., 2021). Sama halnya dengan indeks pembangunan manusia bahwa Indonesia masih tertinggal dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Indonesia memperoleh angka indeks pembangunan manusia dengan jumlah 0.718 menduduki peringkat 107 dari 189 negara, sedang Thailand berhasil mencapai angka 0.777 masuk peringkat ke 79, Malaysia berhasil meraih angka 0.810 berada pada peringkat ke 62, dan Singapura mendapat nilai 0.938 menduduki peringkat 11 (Ratmania & Djulius, 2022). Indeks pembangunan manusia ini dapat digunakan sebagai gambaran mengenai kemiskinan suatu negara karena pengukurannya dilihat dari empat hal, yaitu umur panjang, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Azzaki, 2021). Tak jauh berbeda dengan indeks kebahagiaan yang diperoleh Indonesia sebesar 5.093, masih tertinggal dengan Thailand sebanyak 6.072, Malaysia sebanyak 6.322, dan Singapura sebanyak 6.343. Indikator kebahagiaan ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemiskinan karena merefleksikan terhadap pemenuhan kesejahteraan pada diri seseorang (Suparta & Malia, 2020).

Problem Lingkungan

Seperti hidup di negeri paradoks diperkuat oleh realitas pendayagunaan kekayaan sumber daya alam yang belum mampu menyejahterakan rakyatnya ternyata menyisakan persoalan. Seperti dampak dari eksploitasi sumber daya alam, justru menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Problem lingkungan sebagai akibat negatif dari penguasaan sumber daya alam terjadi di berbagai daerah. Contohnya adalah kerusakan lingkungan sebagai akibat penambangan pasir Merapi di Klaten, penambangan batu bara di Negeri Lunang, kesalahan pengelolaan pertambangan bahan mineral di Kluet Tengah, penambangan batu kapur di bentangan alam karts Gunung Kidul, penambangan emas di Muara Soma, dan masih banyak peristiwa serupa sebagai dampak dari penambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup (Rahmattillah & Husen, 2018; Afrianti & Purwoko, 2020; Pambudi 2020; Syaifulloh, 2021; Siregar, et al., 2021). Pemanfaatan alam berkaitan dengan penebangan hutan yang tidak disertai dengan penanaman pohon kembali akan mengakibatkan kerusakan ekosistem. Hal ini terjadi di Pungkat, yaitu kegiatan *illegal logging* yang menyebabkan kehilangan lahan perkebunan, produktivitas tanaman kelapa untuk berbuah menjadi menurun dan pembukaan tambang menimbulkan kerusakan hutan *mangrove* di Secanggang, akibatnya menurunkan jumlah spesies ikan, seperti pari, hiu, kapak, kepiting, udang, dan kerang. Penyebab lain dari kerusakan lingkungan disebabkan oleh alih fungsi hutan untuk kepentingan pertambangan, perkebunan, dan perluasan pemukiman yang mengancam ketersediaan air bersih di berbagai wilayah di Indonesia (Wahyuni & Suranto, 2021; Anisah, 2021; Syafrudin, 2022).

Gambaran masyarakat mengalami masalah setelah ada kegiatan penambangan terjadi di wilayah pegunungan Kendeng bisa dijelaskan lebih lengkap. Sejak adanya pembangunan pabrik semen pada tahun 2006 membuat resah warga di Pati dan Rembang, sebagian wilayah termasuk dalam bentangan pegunungan Kendeng. Keresahan warga ada yang melatarbelakanginya, yaitu proses produksi semen menggunakan bahan dasar karts diambil dari

pegunungan Kendeng. Penambangan karts yang dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan produksi pengolahan semen menimbulkan kecemasan bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari pegunungan Kendeng.

Kecemasan yang dirasakan warga bisa dipahami, terutama bagi yang memilih jalan hidupnya menjadi petani. Dirinya berusaha memelihara keseimbangan alam, harmonisasi ekosistem, dan melindungi keanekaragaman hayati maupun nonhayati yang ada di pegunungan Kendeng. Petani memiliki kepentingan agar kelestarian alam pegunungan Kendeng terjaga dan berguna sebagai lumbung air untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang berada di sekitar pegunungan tersebut. Air yang mengalir dari pegunungan Kendeng memberi berkah pada warga untuk bercocok tanam. Hal ini menjadikan petani dapat membudidayakan berbagai komoditas pertanian.

Begitu kokohnya pegunungan Kendeng sehingga menjadi sandaran petani sebagai sumber air bagi pertanian petani di sana. Oleh karena itu, kecemasan petani akan tumbuh bila pegunungan Kendeng tidak lagi berfungsi sebagai mata air bagi petani. Tidak berfungsinya pegunungan Kendeng disebabkan oleh aktivitas penambangan karts berakibat pada hilangnya sumber air sehingga menimbulkan ketersediaan air menjadi minimalis. Kelangkaan dari ketersediaan sumber air ini menyebabkan petani kesulitan bercocok tanam.

Petani yang paling merasakan kesulitan adanya penambangan karts adalah masyarakat Samin. Masyarakat Samin merupakan masyarakat yang masih memegang teguh nilai yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Sebagian nilai tradisi yang masih dijalani adalah bertani. Karena bagi masyarakat Samin bertani bukan hanya secara kasat mata bekerja, tetapi sebagai langkah menerapkan keyakinannya. Bagi masyarakat Samin, bertani merupakan bentuk dari berdamai dengan alam. Manusia hidup membutuhkan alam, maka masyarakat Samin berusaha menjaga kelestarian alam. Dengan alam lestari menjamin keberlangsungan masyarakat Samin dalam

menjalani kehidupan. Sebaliknya kalau alam dirusak, akan menyengsarakan kehidupan manusia. Kepercayaan ini membulatkan masyarakat Samin tetap bertahan menjadi petani. Hal lain yang membuat masyarakat Samin konsisten menjadi petani adalah penghormatannya pada bumi. Masyarakat Samin menganggap bumi diibaratkan sebagai “ibu” karena memberikan sandang pangan, tempat perlindungan, dan kasih sayang. Bentuk dari kasih sayang bumi sebagai wadah tumbuhnya tanaman, menyediakan air, dan menyajikan segala kebutuhan manusia sepanjang hidup. Karena bumi sebagai ibu yang memberi banyak manfaat yang tak terhitung, perlu dijaga kelestariannya.

Berpondasi pada keyakinan dan penghormatannya pada bumi, masyarakat Samin melakukan perlawanan terhadap penambangan karts sebagai bahan baku untuk membuat semen. Nyali yang kuat dalam melawan korporasi didorong oleh penilaian masyarakat Samin bahwa penambangan karts berimplikasi terhadap kerusakan bumi.

“

Bentuk dari kasih sayang bumi sebagai wadah tumbuhnya tanaman, menyediakan air, dan menyajikan segala kebutuhan manusia sepanjang hidup. Karena bumi sebagai ibu yang memberi banyak manfaat yang tak terhitung, perlu dijaga kelestariannya.

Masyarakat Samin memutuskan bertani sebagai sumber utama mata pencaharian karena dimanjakan oleh ketersediaan air dari pegunungan Kendeng. Wilayah ini merupakan surga sumber air. Cekungan tanah pegunungan Kendeng mampu menyimpan air sebagai cadangan saat musim kemarau selama 3 sampai 4 bulan. Selain berfungsi menyimpan air, pegunungan Kendeng memiliki 300 lebih sumber air yang mengalir dari sungai bawah tanah. Dengan sumber air ini dapat memenuhi kebutuhan untuk irigasi pertanian.

Efek dari penambangan tersebut membuat sumber air menjadi sangat terbatas. Minimnya sumber air adalah akibat dari ulah orang-orang yang mendirikan pabrik semen dan mengeksploitasi pegunungan Kendeng. Orang-orang ini telah merusak lingkungan yang dianggap tidak menghormati alam. Barisan perusak alam di pegunungan Kendeng ditengarai tidak berbakti pada "ibu" bumi. Bila para perusak alam dibiarkan melakukan penambangan berlarut-larut akan merusak bumi dan ketiadaan sumber air. Dampak yang dialami oleh masyarakat Samin dengan menipisnya sumber air adalah penderitaan. Kesengsaraan akan tiba pada saatnya, karena ketiadaan sumber air menjadikan masyarakat Samin tidak bisa bertani.

Hal itu yang menjadi salah satu faktor masyarakat Samin melawan kegiatan penambangan demi keberlangsungan hidupnya. Masyarakat Samin dapat menjaga masa depan hanya dengan bertani. Karena bertani merupakan satu-satunya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Samin. Selain motivasi memperoleh kebutuhan pokok, nilai lain yang mendasari keyakinan untuk tetap bertahan menjadi petani adalah merupakan wujud dari penghormatannya pada "ibu" bumi (Setiadi, et al., 2012; Subekti, 2016; Kumorotomo & Purbokusumo, 2018; Suyono, 2018).

Problem Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hidup di negeri paradoks semakin kentara dapat dilihat dari persoalan bukan hanya menyasar pada lingkungan, yaitu pemanfaatan sumber daya alam tidak disertai dengan perencanaan yang baik. Hal itu ternyata merugikan pada aspek yang lebih luas pada

bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kajian ini semakin menguatkan apabila eksploitasi terhadap sumber daya alam tidak membuat masyarakat sejahtera. Sebaliknya justru berefek negatif bagi masyarakat sekitar.

Dalam rangka membuktikan hal ini, cerita datang dari petani lahan pantai Kulon Progo. Mulanya masyarakat di pinggiran pesisir selatan Kulon Progo dikenang sebagai *wong cubung*. Istilah *wong cubung* mendeskripsikan tentang situasi kondisi masyarakat penuh dengan keterbelakangan. Secara sosial masyarakat tersebut terpinggirkan. Kondisi terpinggirkan dapat dilihat dari pandangan yang dilakukan oleh orang-orang luar bahwa masyarakat yang tinggal di sana melakoni hidup dengan tidak layak.

Penilaian dari orang luar memang menggambarkan potret kehidupan dari masyarakat pesisir selatan Kulon Progo sesuai dengan realitas yang ada. Keadaan yang dialaminya sangat memprihatinkan. Bahan pangan yang dinikmatinya adalah ubi jalar. Rumah tidak layak huni. Lantai masih berupa tanah dipadatkan yang dinamakan *jagan*. Dengan keadaan amat terbatas ini berimplikasi pada kesehatan. Masyarakat pesisir selatan Kulon Progo banyak yang menderita penyakit kulit, seperti cacar, kudis, kurap, dan jenis penyakit kulit lain sering menyerang warga. Karena kemampuan ekonomi yang minim dan penyakit kulit ini, orang lain di luar area pasir pesisir selatan Kulon Progo memperlakukan secara diskriminatif, yaitu sering menghindar saat terjadi relasi interpersonal. Orang lain menjaga jarak sosial ketika warga di pesisir Kulon progo ingin menjalin silaturahmi, hal ini menjadikan dirinya terasing di lingkungan sosial yang lebih luas.

Miskin, terpinggirkan, dan terasing yang dialami oleh warga sepanjang pesisir Kulon Progo tak berlangsung terus. Ada perubahan dalam menjalani kehidupan ketika salah satu warga yang bernama Sukarman menemukan tiga batang tanaman cabai berbuah di pekarangan. Pemuda yang belum memperoleh pekerjaan ini merenung setelah melihat tanaman cabai ternyata berbuah di lahan berpasir yang tandus. Pesisir di sepanjang pantai selatan Kulon

Progo sebagian besar merupakan lahan berpasir sehingga menjadi lahan gersang untuk ditanami komoditas pertanian.

Namun, saat melihat tanaman cabai bisa tumbuh dan berbuah menjadi inspirasi dan motivasi membudidayakan tanaman cabai di lahan pantai. Gagasan menggelayut di pikiran Sukarman. Tanaman cabai yang tumbuh liar tidak dirawat dan bersaing dengan jenis rerumputan lain bisa bertahan hidup. Apalagi kalau lahannya diolah menjadi subur dan tanaman cabai dirawat dengan sepenuh hati, Sukarman optimis akan menghasilkan cabai lebih banyak. Pikiran Sukarman, barang kali menjadi petani cabai membuka jalan untuk masa depan lebih baik.

Tekad bulat ditancapkan! Api semangat dikobarkan! Genderang perang melawan rintangan ditabuh bertalu-talu! Sukarman mulai merealisasikan mimpinya. Langkah awal yang dijalankannya adalah membuat sumur. Inovasi dilakukan Sukarman untuk memperoleh sumber air. Mengingat lahan berpasir tak mungkin membuat sumur secara konvensional. Galian yang dibuatnya akan terus tertutup pasir. Agar pasir tidak menimbun galian, dibuatlah anyaman bambu melingkar seiring dengan kedalaman galian. Bambu yang melingkar itu ditutupi dengan plastik bertujuan agar pasir tidak tumpah di galian. Upaya yang dilakukan Sukarman berhasil menyediakan air sebagai kebutuhan utama memelihara tanaman berasal dari sumur yang spesifik dibuat di lahan berpasir. Sumur ini oleh masyarakat setempat disebut sumur *brunjung*.

Setelah sukses mengkreasi sumur *brunjung*. Sukarman bergerak lebih jauh, yaitu menyuburkan lahan berpasir. Caranya dengan menaburkan pupuk kandang. Strategi tersebut dipilih karena ketersediaan pupuk kandang melimpah di wilayahnya. Ada keuntungan yang diperoleh selain ketersediaan pupuk kandang, di antaranya mudah menggunakannya karena tanpa campur tangan pengolahan bisa langsung diberikan di lahan berpasir dan biaya yang efisien karena tak perlu membeli dari pemilik. Tak perlu mengeluarkan biaya karena pemilik merasa senang kalau pupuk kandang diambil menjadikan pekarangan terjaga kebersihannya.

Usaha menyuburkan lahan berpasir sudah dijalankannya. Tahapan berikutnya yang dikerjakan oleh Sukarman adalah memilih benih yang sesuai untuk ditanam di lahan berpasir. Benih sudah dipilih, kemudian disemai menjadi bibit. Bibit tumbuh subur lalu ditanam di lahan. Proses budidaya berikutnya merawat tanaman bertujuan menghasilkan buah. Dalam jangka waktu tiga bulan kerja keras yang dilakukan oleh Sukarman tidak sia-sia. Tanaman cabai berproduksi tinggi. Keuntungan yang diperoleh dari budidaya cabai secara ekonomi bisa menopang kebutuhan keluarga. Keberhasilan Sukarman membudidayakan tanaman cabai tersebar ke masyarakat pesisir selatan Kulon Progo.

Setelah Sukarman memelopori budidaya tanaman cabai, diikuti oleh warga lain. Banyak petani cabai lahir di pesisir selatan Kulon Progo. Seiring dengan berjalan waktu, ada 10 ribu petani memelihara cabai. Bersama dengan petani lain, Sukarman tak puas diri. Tak berhenti melakukan inovasi, teknologi pertanian modern diterapkan untuk membudidayakan tanaman cabai di lahan berpasir. Peningkatan kemampuan bertani dengan menerapkan teknologi menjadikan panen cabai lebih meningkat.

Proses berikutnya melakukan diversifikasi jenis tanaman yang dibudidayakan di lahan berpasir, sesudah petani bisa menguasai ilmu bercocok tanaman cabai di lahan pantai. Jenis sayuran lain yang ditanam seperti tomat, sawi, dan terong. Petani juga menanam buah-buahan seperti melon, semangka, dan mentimun. Rezeki dari bertani di lahan pantai mengantarkan petani pesisir selatan Kulon Progo tercukupi secara ekonomi. Bahkan penghasilannya melebihi dari wilayah di sekitarnya. Warga mempunyai kesejahteraan secara ekonomi lebih baik dari orang lain yang dulunya memandang rendah.

Kebersyukuran atas nikmat yang diberikan Allah Swt. mengenai jerih payah untuk mengonservasi lahan berpasir yang tandus menjadi lahan yang subur sehingga berbagai tanaman sayuran dan buah-buahan dapat tumbuh dengan baik menghasilkan panen raya yang mengantarkan petani lahan pantai di Kulon Progo hidup dengan layak, bahkan lebih dari cukup. Namun, hal itu kemudian terusik

adanya rencana penambangan pasir besi di sepanjang wilayah pantai selatan Kulon Progo.

Adanya kebijakan penambangan pasir di lahan pantai membuat petani resah. Berkembang pada dirinya kekhawatiran lahan yang selama ini sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian akan dialihfungsikan sebagai area pertambangan. Petani dapat kehilangan pekerjaan. Kecemasan ini beralasan karena keterampilan utama yang dimilikinya adalah bertani. Apabila lahan diambil alih oleh perusahaan penambang, petani sudah tak bisa bekerja di tempat lain.

Berdasarkan latar belakang keresahan warga akan kehilangan lahan ditindaklanjuti dengan membentuk Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP). PPLP-KP didirikan bertujuan sebagai wadah petani memperjuangkan lahan pantai sebagai lahan pertanian. Perjuangan petani mengupayakan agar lahan pantai tetap sebagai lahan pertanian dengan prinsip "Menanam adalah Melawan". Implementasi perjuangan PPLP-KP dilakukan dengan cara yang khas, yaitu selama petani terus menanam dan tidak menjual lahan pada perusahaan penambang, maka tidak akan terjadi kegiatan penambangan pasir besi di wilayahnya.

Berbagai risiko terlihat ketika lahan tersebut akan dialih fungsi sebagai lahan pertambangan pasir besi, di antaranya risiko masalah ekonomi dengan ancaman kemiskinan. Ribuan petani akan kehilangan pekerjaan yang disebabkan perpindahan status lahan yang dulunya dikelola oleh petani, sejak adanya penambangan pasir besi kepemilikan lahan berpindah menjadi milik perusahaan.

Risiko lain adalah berkembangnya masalah sosial. Problem ini tampak pada mudarnya modal sosial karena ternyata ada sebagian petani yang setuju dengan penambangan pasir besi dengan ditandai oleh kerelaan menjual lahannya pada perusahaan penambang. Di sisi yang berbeda, sebagian besar petani ingin mempertahankan lahan pantai sebagai lahan pertanian dari ancaman penggusuran. Perpecahan di antara petani tampak pada peristiwa anggota keluarga salah satu petani yang pro terhadap penambangan pasir besi meninggal, tetapi tidak boleh dikuburkan di makam

kampung. Petani yang pro pertambangan dikucilkan dari kegiatan warga. Contohnya tidak boleh mendatangi petani lain yang menyelenggarakan perhelatan pernikahan, apabila ketahuan setuju dengan penambangan pasir besi. Problem sosial berikutnya adalah kriminalisasi terhadap warga yang tidak setuju dengan penambangan pasir besi. Ada salah satu petani yang dipenjarakan gara-gara terlibat ikut gerakan penolakan tambang pasir besi.

Sedang berkaitan dengan masalah budaya adalah petani menanam di lahan pantai merupakan perwujudan dari ruang hidup. Petani mempunyai ruang hidup terdapat pada kebanggaan telah memberi kontribusi bagi kelestarian lingkungan. Petani mampu mengubah lahan tandus menjadi subur. Ruang hidup ini akan memudar bila penambangan pasir terjadi. Lahan yang sudah subur menjadi rusak sebagai dampak dari kegiatan penambangan pasir besi. Adanya keyakinan penambangan pasir besi dapat menghancurkan ekosistem perlu digagalkan sebagai usaha melindungi lain pantai dari kerusakan.

Upaya melestarikan tradisi dan adat istiadat leluhur merupakan perwujudan yang berbeda dari masalah budaya. Bagi petani lahan pantai Kulon Progo menanam berbagai komoditas pertanian di lahan pantai merupakan wujud dari meneruskan tradisi yang sudah diturunkan dari leluhur. Para leluhur meninggalkan rekam jejak adat istiadat terutama mengenai cara bertani dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem tetap terjaga dengan baik. Jika penambangan pasir besi benar-benar dilaksanakan dapat memutus rantai tradisi bertani yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya di pesisir selatan Kulon Progo. Atas pondasi ini PPLP-KP menolak penambangan pasir besi di lahan pantai.

Gerakan penolakan terhadap program penambangan pasir untuk mempertahankan tradisi ternyata memperoleh tekanan dari pihak eksternal yang ingin mengambil keuntungan secara personal maupun organisasi dengan adanya proyek penambangan pasir besi. Pihak-pihak eksternal menebar ancaman melalui pendekatan ekonomi dengan membujuk untuk menjual lahan pantai. Pendekatan

sosial seperti membenturkan arus bawah antara yang pro dan kontra dengan penambangan. Pendekatan politis seperti menggunakan alat kekuasaan untuk memaksa petani yang kontra agar menghentikan aktivitasnya melakukan gerakan menolak tambang pasir besi (Widodo, 2013; Suyono, 2021).

Problem ekonomi, sosial, dan budaya tidak hanya menimpa pada petani lahan pantai di Kulon Progo. Bersumber dari kajian juga terjadi di daerah lain. Kajian mengenai masalah penambangan pasir di desa Selok Awar-Awar ditandai dengan adanya penolakan sebagian warga menyebabkan salah satu petani bernama Salim Kancil tewas akibat memperoleh perilaku kekerasan dari orang yang mendukung penambangan pasir. Kekerasan yang menimpa Salim Kancil merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Peristiwa tewasnya Salim Kecil dipicu oleh petani yang tidak bisa lagi menanam di lahannya sendiri karena sudah rusak sebagai akibat dari kegiatan penambangan pasir.

Penolakan terhadap aktivitas penambangan pasir oleh petani karena menyebabkan problem ekonomi. Selama ini petani menggantungkan hidupnya dari sewa lahan berupa sawah terbiasa ditanami padi yang berguna sebagai lumbung beras. Atas dasar alasan petani ingin menjaga keamanan pangan, perlu dilakukan perlawanan untuk mencegah tambang pasir yang dilakukan di sawah milik petani. Cara yang dilakukannya adalah memprotes penambang agar menghentikan penambangan pasir. Meski berdampak pada salah satu tokoh yang menggerakkan petani melawan penambang menjadi korban, Salim kancil meregang nyawa (Sugiyanto & Hariyanto, 2018; Widiyanto, 2020). Penjelasan mengenai problem sosial datang dari wilayah pesisir pantai Galisong, yaitu kerusakan lingkungan karena kegiatan penambangan pasir menyebabkan nelayan kesulitan mencari ikan. Kelangkaan ikan tersebut menjadikan nelayan membutuhkan area lebih luas dan waktu lebih banyak untuk menangkap ikan. Waktu yang digunakan lebih lama sampai 15 hari. Sebelum ada aktivitas penambangan, nelayan hanya membutuhkan waktu 20 sampai dengan 24 jam dalam mencari ikan. Hambatan nelayan dalam mencari ikan ini berdampak pada masalah

sosial, di antaranya ketidakpercayaan pada aparat keamanan karena dinilai lebih membela kepentingan perusahaan dibanding kepentingan nelayan.

Berkembang dari ketidakpuasan warga karena yang diundang oleh pemerintah untuk membicarakan masalah ini tidak mewakili kepentingan seluruh nelayan dan penambangan menyebabkan abrasi sehingga membuat rumah milik nelayan roboh (Anggariani, et al., 2020). Problem selanjutnya adalah peristiwa penambangan nikel yang menyebabkan terjadinya masalah budaya terutama perilaku negatif bagi warga di Morowali. Perilaku negatif ini seperti meningkatnya gaya hidup konsumtif, menurunkan motivasi untuk menjalankan bisnis, dan kecenderungan ingin mendapatkan keuntungan secara cepat dan mudah dengan tidak memedulikan kelestarian alam lingkungan (Nuraeni, 2018).

Faktor Penyebab: Negara Miskin Negarawan

Seperti gunung es. Tentu saja masih banyak lagi reportoar mengenai peristiwa menggambarkan negeri paradoks. Reportoar mengenai hanya sebagian yang menikmati kekayaan alam Indonesia, sebagian lain yang lebih besar mengalami masalah sebagai dampak dari pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan segolongan kecil orang semata. Problem ini terjadi karena keuntungan pengelolaan sumber daya alam mengalir pada orang-orang yang memiliki kendali kekuasaan politik dan ekonomi. Akibatnya hasil dari pengelolaan sumber daya alam lebih banyak mengucur pada elite dan sedikit mengalir untuk rakyat. Dana terbatas tersebut kenyataanya tidak cukup dialokasikan untuk memakmurkan rakyat. Celakanya hal buruk terjadi, yaitu sudah menerima rezeki tak seberapa dari mengeksploitasi sumber daya alam, masih harus menanggung dampak negatif lebih besar yang dapat menurunkan kualitas kesejahteraan rakyat (Ridha, 2016; Fuady, 2018; Raharti, et al., 2021; Dewanto & Rahmawati, 2021; Koho, 2021; Muhlis, 2021).

“

Hanya sebagian yang menikmati kekayaan alam Indonesia, sebagian lain yang lebih besar mengalami masalah sebagai dampak dari pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan golongan kecil orang semata.

Kekuasaan politik dan ekonomi yang hanya dipegang segelintir orang mampu mengendalikan dan memengaruhi seluruh kehidupan masyarakat merupakan bentuk dari oligarki (Mugiyanto, 2022; Suryani, et al., 2021). Oligarki dapat dilihat dari film *Sexy Killers* yang mengisahkan secara nyata mengenai kebersamaan elite mengeruk kekayaan alam Indonesia yang hasilnya diambil untuk diri sendiri. Sedang masyarakat menanggung akibat negatif dari aktivitas penambangan. Film dokumenter ini adalah kritik sosial mengenai kegiatan penambangan telah menyengsarakan rakyat di sekitarnya. Perusahaan yang dimiliki oleh petinggi negeri membuat masyarakat di sekitar tambang terancam tak bisa bertani karena lahannya sudah tercemar limbah penambangan batu bara. Rumah-rumah warga rusak dan kampung hampir tenggelam karena aktivitas penambangan tidak memedulikan aspek kelestarian lingkungan.

Adanya aktivitas penambangan batu bara membuat usaha petani dalam mengelola lahan pertanian menjadi sia-sia. Tapak sejarah menuliskan tentang perjalanan warga yang berjuang mengadu nasib di negeri seberang. Petani di sana sesungguhnya adalah transmigran yang datang secara bertahap berasal dari Jawa dan Bali. Berkah dari kerja keras yang dilakukannya menjadikan transmigran berhasil membudidayakan berbagai jenis tanaman. Namun, kerja keras sebagai petani menjadi tak berarti lagi saat ada proyek penambangan batu bara. Petani tak memperoleh air bersih karena gunung yang

berfungsi menyimpan air telah menjadi lubang-lubang menganga akibat bekas galian penambangan. Petani mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk mengairi lahan pertanian. Petani hanya mendapatkan air dari sisa limbah penambangan batu bara yang banyak mengandung lumpur sehingga tanaman padi tidak bisa tumbuh. Kesulitan memperoleh air juga membuat petani tidak bisa bercocok tanaman secara berkelanjutan. Sumber air bersih hanya mengandalkan air hujan sehingga saat kemarau tiba mengalami kekeringan. Ketiadaan air bersih ini memaksa petani menghentikan aktivitasnya untuk menanam padi.

Kesedihan warga tidak hanya berhenti sampai di situ. Lubang-lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan menimbulkan bencana bagi warga. Dalam jumlah besar, anak keturunan warga yang tinggal di dekat lokasi tambang meninggal tenggelam di kolam yang sebelumnya tempat ini diambil batu baranya oleh perusahaan. Setelah batu bara habis, perusahaan ini tidak melakukan reklamasi. Tanpa melakukan perbaikan, perusahaan pindah ke tempat lain sehingga perusahaan meninggalkan banyak kolam di sekitar tempat tinggal warga (Watchdoc Image, 2019; Pertiwi, 2020; Putri, et al., 2020; Yesica & Noviani, 2021; Ramadhan & Herman, 2021).

Teluk Bintuni merupakan cerita lain yang menjadi bukti mengenai wilayah dengan kandungan alam dan keanekaragaman hayati terbesar di Indonesia dan warganya masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. Teluk Bintuni secara geografis termasuk bagian dari provinsi Papua Barat, berada di ujung barat pulau Papua. Daerah ini disebut sebagai pusat keanekaragaman hayati terbaik karena dilatarbelakangi oleh lokasinya di area segitiga terumbu karang dunia. Selain hal tersebut, Teluk Bintuni memiliki keanekaragaman hayati yang kaya karena sebagian besar daratannya berwujud hutan, yaitu berupa lahan basah *mangrove*. Secara spesifik wilayah Teluk Bintuni seluas 18.637 kilometer persegi adalah kabupaten terluas di Papua Barat.

Di kabupaten Teluk Bintuni secara ekonomi berkembang kegiatan industri pertambangan, kehutanan, dan kelautan. Salah satu industri besar yang beroperasi adalah proyek migas bernama LNG Tangguh. Dari kegiatan industri besar ini mengantarkan Teluk Bintuni menjadi kabupaten paling tinggi pendapatannya di antara kabupaten lain di seluruh Indonesia. Dalam angka Teluk Bintuni berpendapatan dengan produk domestik regional bruto per kapita mencapai Rp. 457.55 juta. Anehnya, Teluk Bintuni disebut sebagai kabupaten terkaya dari sisi pendapatan daerah, tidak berbanding lurus dengan kemakmuran rakyatnya. Masih banyak rakyat di Teluk Bintuni mengalami kemiskinan. Ada 20 ribu warga berada pada garis kemiskinan.

Bukan hanya didera oleh kemiskinan. Rakyat Teluk Bintuni menghadapi berbagai problem sejak berdirinya industri di wilayahnya. Rakyat Teluk Bintuni terdiri dari Sebyar, Wamesa, Kuri, Irarutu, Moskona, Sough, dan Sumuri. Dari tujuh suku ini yang menjadi suku induk adalah Sebyar dan suku-suku tersebut mempunyai perbedaan kebudayaan serta adat istiadat. Meskipun berbeda kebudayaan dan adat istiadat, tujuh suku di Teluk Bintuni memiliki kesamaan kultur dalam menjaga alam yang dilatar belakangi oleh kehidupannya yang bergantung pada alam. Untuk menopang kehidupan dengan cara mencari kepiting, udang, dan jenis ikan lainnya bagi warga yang bertempat tinggal di pesisir. Bagi warga yang tinggal di pedalaman mengandalkan hutan sebagai kawasan untuk mencari rezeki. Kesadaran dirinya mengenai ketergantungan dengan alam menumbuhkan kearifan menjaga kelestarian lingkungan. Mengambil secukupnya dari alam dan tidak boleh berlebihan. Filosofi ini tertanam dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang.

Hidup harmoni dengan alam realitasnya terganggu oleh berkembangnya industri di Teluk Bintuni. Industri LNG yang sebagian produksi dilakukan di lepas pantai sehingga membatasi nelayan mencari ikan dan kepiting. Ada beberapa lokasi menjadi tempat terlarang bagi nelayan. Nelayan tidak diperkenankan mencari ikan di lokasi tertentu karena bila masuk di lokasi tersebut, dianggap

mengganggu proses produksi perusahaan LNG. Padahal bagi nelayan, lokasi yang dilarang itu merupakan wilayah subur berkembangnya berbagai jenis ikan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Adanya pembatasan menjaring ikan menurunkan penghasilan nelayan di sana.

Nasib sama menimpa warga yang bertempat tinggal di pedalaman. Kebiasaan warga hidup harmoni dengan alam menjadi bermasalah. Masalah yang dialami oleh warga adalah hadirnya industri kehutanan mengakibatkan kesulitan memperoleh penghasilan. Masalah lain yang dihadapi oleh warga, yaitu ada hambatan dalam memperoleh air bersih. Kesulitan mendapatkan penghasilan dan gangguan menggunakan air bersih disebabkan rusaknya ekosistem gara-gara kegiatan industri yang beraksi di pedalaman (Narasi Daily, 2022).

Realitas itu menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang ditandai oleh berdirinya berbagai industri boleh berjalan di suatu daerah, tetapi tidak serta merta berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan warganya. Realitas itu bukan hanya terjadi di satu daerah, tetapi juga terjadi di daerah lain. Aliran dana dari pertumbuhan ekonomi mengolah bahan alam atau sektor lain, lebih banyak mengucur pada pihak-pihak tertentu untuk dinikmati sendiri dengan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat lokal. Akibatnya masyarakat lokal tetap berada pada situasi dan kondisi ekonomi kurang menguntungkan. Masyarakat terus berjuang dengan kemampuan ekonomi terbatas untuk sekadar mempertahankan kelangsungan kehidupan (Novirsa & Achmadi, 2012; Rahayuningsih, 2017; Risal, 2017; Nugroho, 2018; Hanifah & Hanifa, 2021).

Faktor utama yang menyebabkan kekayaan alam melimpah hanya dinikmati oleh sebagian kecil yang memegang akses politik dan ekonomi sehingga tidak memberi kemanfaatan bagi sebagian besar rakyat karena Indonesia berada dalam kondisi miskin negarawan. Ada baiknya merujuk pada pandangan Hamka untuk memahami negarawan. Berdasarkan pemikiran dari Hamka bahwa negarawan memiliki rasa kecintaan tanah air yang dilandasi oleh

tauhid. Seorang negarawan berpondasi pada *tauhid* berwujud pribadi beriman berkembang rasa cintanya pada tanah air karena sebagai ungkapan rasa syukur telah dibesarkan, memenuhi kebutuhan hidup, dan menjalani kehidupan di tanah air. Kesadaran tersebut menggerakkan dirinya berada di garda depan membela dan menjaga martabat bangsa, mengorbankan diri, mengupayakan kemaslahatan bersama, serta berjiwa toleran terhadap keberagaman (Faozi, et al., 2021; Faozi, 2021).

Mengacu pada ajaran Hamka, siapa pun yang memegang amanah menjadi pemimpin sebagai negarawan, tidak akan melakukan praktik-praktik merusak dan merugikan bangsa. Dia tidak memikirkan diri sendiri, melanggengkan kepemimpinan untuk menuntaskan ambisi terus berkuasa dengan melanggar aturan, menyimpang dari norma, mengabaikan nilai spiritual, dan membuat rakyat menderita. Seorang negarawan sejati menunjukkan ketulusan menggerakkan kemampuan mempertahankan bangsa bermartabat apabila memperoleh ancaman dari pihak-pihak yang ingin meruntuhkan negara. Seorang negarawan sejati juga berjiwa altruis, yaitu ikhlas secara totalitas menginfakkan diri demi kemakmuran rakyat dengan tidak memedulikan latar belakang perbedaan suku, ras, keyakinan, tingkat ekonomi, dan status sosial. Seorang negarawan merupakan insan yang memiliki kepribadian multikultural menjunjung tinggi keragaman untuk menyejahterakan bangsa.

“

Seorang negarawan sejati juga berjiwa altruis, yaitu ikhlas secara totalitas menginfakkan diri demi kemakmuran rakyat dengan tidak memedulikan latar belakang perbedaan suku, ras, keyakinan, tingkat ekonomi, dan status sosial.

Sayangnya di negeri ini ibarat mencari bibit unggul di lahan gersang. Susah menemukan bibit unggul tersebut. Karena yang tumbuh adalah rerumputan tak memberi kemanfaatan bagi kehidupan. Bahayanya rerumputan itu menjadi tanaman predator. Rerumputan secara dominan mengambil hak hidup bagi tanaman lain. Tanaman yang tak kuat bertahan akan menemui ajal. Seperti bibit unggul di lahan gersang, menemukan negarawan merupakan hal langka. Hidup di lahan gersang yang banyak ditemukan adalah pemimpin berperan seperti rerumputan. Dampak perilaku dan kebijakan tidak memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat, bahkan berakibat buruk, yaitu membuat rakyat terlunta-lunta.

Ini adalah kisah nyata berasal dari pelosok desa yang tak memperoleh imbas positif dari irama pembangunan hasil kreasi para pemimpin. Warga bermukim di pelosok desa, terpinggirkan, terbelakang secara ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Meski warga hidup dengan penuh keterbatasan, belum ada pemimpin memikirkan warga yang serba kekurangan. Masih menjadi mimpi bahwa pemimpin hadir ke desa sebagai *hero*, membantu kesulitan warga memperoleh kesejahteraan layak. Warga masih berjuang secara mandiri untuk sekadar mempertahankan kelangsungan hidup. Warga dibiarkan sendirian melunakkan kerasnya kehidupan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu urusan sandang, pangan, dan papan.

Kisah itu datang dari desa-desa terisolir yang masalahnya hampir serupa, yaitu keterbatasan infrastruktur seperti tak ada jalan yang memadai untuk menuju ke lokasi. Warga harus berjalan kaki berkilo-kilo meter menyusir lembah yang terjal, menyusur hutan, dan menyeberang sungai untuk menjual hasil pertanian dan perkebunan yang dikelola secara tradisional ke pasar. Pendapatan yang diperoleh tentu amat minim. Tak sebanding dengan jerih payah menempuh perjalanan amat berat. Di antara warga, ada yang menggunakan transportasi kendaraan bermotor. Fasilitas jalan yang digunakan berkendaraan jauh dari rasa aman. Jalan sempit naik dan turun pegunungan. Setiap saat bahaya mengintai karena jalan sama sekali tidak representatif untuk berkendara. Kecelakaan bisa terjadi. Meski

berbahaya mereka harus melewati jalan ini karena satu-satunya akses untuk menuju ke kota terdekat (Trans Official, 2019; Trans7 Official, 2020; Trans7 Official 2021).

“

Masih menjadi mimpi bahwa pemimpin hadir ke desa sebagai hero, membantu kesulitan warga memperoleh kesejahteraan layak.

Keterbatasan infrastruktur membuat daerahnya sulit dijangkau oleh warga lokal maupun pendatang sehingga menjadikan roda ekonomi tak berputar. Ironi memang, kemajuan zaman telah melompat lebih tinggi, serba digital. Big data. Revolusi industri 5.0. Era media sosial. Sebagian besar kegiatan berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya sudah berada di ruang-ruang maya. Namun, warga yang bermukim di desa itu pekerjaannya masih bergantung kepada alam sekitar. Realitas yang ada, kadang alam tak bersahabat. Mengalami kekeringan, air meluap, lahan tak subur sehingga terjadi gagal panen. Maka yang dilakoninya adalah menggunakan bahan pangan jenis umbi, jagung, ketela pohon, dan pisang. Hanya komoditas ini yang bisa warga makan. Tak ada asupan berbeda. Mereka tak mampu membeli bahan pangan lain karena tak ada penghasilan (Trans7 Official, 2019; Trans7 Official, 2020).

Bertempat tinggal di pelosok menanggung beban ketiadaan fasilitas kesehatan. Belum tentu ada tenaga medis yang menghampiri ke desanya untuk merawat warga yang sedang sakit. Untuk pengobatan, warga mengandalkan bidan desa dengan obat seadanya. Warga juga memilih pengobatan kearifan lokal dengan menggunakan bahan alam yang ada di sekitar sebagai terapi melalui juru sembuh yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Warga terpaksa melakukan hal ini. Medan yang begitu berat membutuhkan biaya sangat mahal untuk mengantarkan keluarganya yang sakit berobat

ke puskesmas. Mereka tak mempunyai uang untuk mengongkosi transportasi tersebut. Apalagi memeriksakan ke dokter spesialis dan memberikan obat yang representatif jauh dari angan-angan. Mereka tak memiliki dana untuk memperoleh layanan kesehatan yang baik (Trans Official 2020).

Berada di desa terpencil, warganya juga mendapati minimnya sarana pendidikan. Pendidik yang enggan ditempatkan di daerah terpencil ini mengakibatkan proses belajar berjalan ala kadarnya. Keterbatasan guru menjadikan *output* pembelajaran tidak maksimal. Hambatan meningkatkan kualitas pendidikan masih ditambah dengan tidak adanya perangkat pembelajaran. Tak ada buku sebagai bahan ajar. Ruang kelas tidak nyaman digunakan untuk belajar siswa dan fasilitas lain sebagai penunjang pembelajaran tak tersedia semakin menjadi penanda ketertinggalan dalam menempuh pendidikan di desa terpencil. Dalam kondisi ini bisa dipahami bila fasilitas pendidikan yang tidak memadai berisiko kalah untuk berkompetensi dengan siswa dari daerah lain yang sarana pendidikannya lebih lengkap (Trans7 Official, 2020).

Kisah pilu mengenai desa yang terpinggirkan menjadi bukti bahwa republik ini miskin pemimpin yang memiliki jiwa negarawan. Karena di antara pemimpin masih sedikit yang memiliki motivasi untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Hal ini disebabkan mengangkat harkat dan martabat warga yang tinggal di desa tersebut bukan persoalan gampang. Butuh pemimpin yang mempunyai nyali kuat untuk membantu warga meningkatkan kesejahteraannya. Nyali yang kuat diperlukan karena memberdayakan mereka membutuhkan dana besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun infrastruktur. Sudah mengeluarkan biaya mahal hasilnya tidak cepat terlihat sehingga pemimpin yang terpinggil membangun daerah seperti ini siap untuk tidak populer.

Berada di jalan sunyi karena tidak ada sorot kamera untuk meningkatkan elektabilitas agar bisa bertahan memegang jabatan publik pada periode berikutnya. Hitung-hitungan dari perolehan suara bisa merugikan. Hal yang melatarbelakanginya adalah warga

yang tinggal di desa tertinggal jumlahnya sedikit. Dengan jumlah sedikit tak bisa menjadi lumbung suara yang signifikan untuk memperebutkan tahta jabatan publik di tingkat pusat maupun daerah. Maka hanya pemimpin yang menjadi negarawan mampu menggerakkan hati nurani untuk memajukan desa yang tertinggal. Dirinya tak memperhitungkan lagi popularitas, elektabilitas, dan lumbung suara, tugasnya adalah memakmurkan warga yang menjadi wilayah tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Langkah ini harus dirinya tempuh karena sebagai seorang pemimpin yang negarawan berprinsip amanah yang diembannya bukan hanya dimintai tanggung jawab di dunia, tetapi juga di akhirat.

Pemimpin yang negarawan juga menjamin tak akan ada cerita lagi mengenai *Sexy Killer* atau Teluk Bintuni. Kisah yang dia tuliskan adalah kisah tentang seorang pemimpin berperan sebagai *khalifah* yang mengandung makna sedang diberi amanah oleh Sang Penguasa Semesta Alam untuk memakmurkan bumi dan seisinya. Nilai ini seharusnya menjadi acuan moral bagi pemimpin untuk menjaga alam tetap lestari, pemanfaatan alam untuk kesejahteraan rakyat yang menempatnya dengan tetap merawat harmoni lingkungan, serta seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki negara digunakan untuk memakmurkan seluruh rakyat.

Namun, di negeri ini kisah tentang pemimpin yang negarawan seperti kisah fiksi, tak seindah dalam kehidupan nyata. Realitas tampak pada pemimpin yang negarawan sebagai *khalifah* berjumlah sangat minim. Hal ini dibuktikan oleh banyak terjadi kasus menjadi seorang pemimpin mengambil kesempatan menumpuk pundi-pundi kekayaan pribadi. Fenomenanya dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi para pejabat publik dari tingkat pusat sampai daerah. Kasus korupsi terjadi karena dampak negatif dari pelaksanaan desentralisasi yang memberi kewenangan pejabat publik di daerah memiliki kewenangan besar untuk mengelola wilayahnya. Kemandirian dalam mengatur daerahnya membuka peluang penyalahgunaan wewenang bertujuan mengambil keuntungan ekonomi maupun politik bagi pribadi maupun kelompoknya (Sommaliagustina, 2019).

Secara lebih spesifik, korupsi pejabat publik di daerah yang dilakukan oleh gubernur, bupati, dan walikota karena faktor monopoli kekuasaan dan diskresi kebijakan, yaitu membuat kebijakan yang tidak mengacu pada aturan, lemahnya akuntabilitas, dan membiayai pesta politik pilkada langsung yang mahal (Suhendi, 2020). Korupsi juga merupakan perilaku memperkaya diri sendiri, orang lain, dan kelompok dengan menyalahgunakan jabatannya yang berakibat merugikan negara melalui proyek fiktif (Nasution, 2020). Perizinan menjadi bagian dari bentuk korupsi yang melibatkan pejabat publik dan korporasi (Saleh & Perdana, 2019; Satria, 2020). Tak ketinggalan korupsi merambah sebagian politisi di parlemen (Kurniawan, 2019; Siburian, et al., 2021).

Inilah para barisan abdi negara berada pada pucuk pimpinan yang mencerminkan miskin negarawan. Seharusnya mereka memikul amanah mengangkat harkat martabat bangsa dan membahagiakan rakyat. Namun, realitasnya sibuk dengan diri sendiri memoles citra dan wibawa, harapannya bisa dipandang positif oleh rakyat untuk kembali terpilih atau meraih posisi lebih atas dalam kompetisi memperebutkan jabatan publik. Mereka menjadi gelap mata. Sesungguhnya ada harapan rakyat menginginkan kinerja abdi negara yang memiliki kuasa untuk meringankan beban hidup yang semakin berat menindihnya. Idealisasi ini ternyata masih sebatas angan-angan. Mereka tidak memikirkan nasib rakyat. Buktinya, bila sudah menjabat mereka melakukan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Tak peduli lagi dengan nasib rakyat yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Inilah negeri paradoks. Negeri yang kaya raya, tetapi realitasnya belum mampu membuat rakyat sejahtera. Hal ini karena sebagai suatu negeri tengah berada pada situasi miskin negarawan.

“

*Inilah negeri paradoks. Negeri yang kaya
raya, tetapi realitasnya belum mampu
membuat rakyat sejahtera.*

2

Cermin Retak Kebangsaan

Seperti yang sudah dideskripsikan pada buku *Merawat Perdamaian Metode Sistem Peringatan Dini Konflik* (Suyono, 2019) merefleksikan telah terjadi cermin retak kebangsaan. Indonesia sebagai negeri multikultural terdiri dari berbagai ragam suku, ras, etnik, keyakinan, status sosial, tingkat ekonomi, dan ideologi politik ternyata tidak mampu mengelola konflik dengan baik. Berdasarkan penelusuran *literature review* peristiwa konflik selalu hadir dari masa ke masa. Drama sejarah kebangsaan menunjukkan telah terjadi konflik pada era peralihan Orde Lama menuju era Orde Baru. Peristiwa kelam ini telah merenggut banyak korban jiwa dan kehilangan harta dalam jumlah besar. Bahkan luka kejadian tersebut telah menjadi memori kolektif dan membekas sampai sekarang yang memengaruhi situasi harmoni interaksi sosial antara elemen warga bangsa.

Tragedi sejarah memilukan yang pernah dialami oleh bangsa ini di masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru tidak menjadi pelajaran berharga. Buktinya masa transisi era Orde Baru menuju era reformasi mengulang sejarah sama, yaitu telah terjadi konflik kolosal. Kekerasan yang bersifat massal terjadi di berbagai daerah. Perusakan dan pembakaran fasilitas umum, penjarahan barang-barang di mall maupun toko, penganiayaan terhadap kelompok etnis tertentu, dan tindakan represif pengendali keamanan yang menyebabkan beberapa aktivis mahasiswa yang berdemonstrasi untuk menghentikan kekuasaan rezim Orde Baru waktu itu meninggal dunia.

Ketika memasuki babak baru pemerintahan era Reformasi. Ada harapan yang ingin dicapai oleh para aktivis yang menumbangkan rezim Orde Baru, yaitu terciptanya kebersamaan segenap elemen bangsa untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh masyarakat

Indonesia. Kemampuan merajut kebersamaan ini menjadikan tidak ada lagi kerusuhan yang disebabkan oleh faktor politik, etnis, keyakinan, dan memperebutkan sumber daya ekonomi. Situasi menenteramkan bisa terbangun karena era Reformasi terampil dalam merawat perdamaian di negeri yang masyarakatnya memiliki latar belakang multikultural.

Realitasnya yang terjadi harapan itu ternyata jauh panggang dari api. Pada era Reformasi masih banyak problematika yang dapat mengancam keutuhan sebagai bangsa. Konflik masih saja terus terjadi. Bahkan pada sisi kuantitas maupun kualitas konflik pada era Orde Baru lebih masif menunjukkan adanya cermin retak kebangsaan, yaitu ada tanda-tanda memudarnya ikatan persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Faktor Suku, Ras, dan Agama

Suyono (2019) mencatat pada era Refomasi telah terjadi kerusuhan etnis yang menyebabkan 2000 dari salah satu etnis yang bermusuhan meninggal dunia dan 10.000 etnis yang bertikai tersebut dipaksa eksodus meninggalkan wilayah konflik. Konflik etnis lain terjadi disebabkan oleh prasangka yang berlebihan pada kelompok etnis pendatang. Etnis pendatang dianggap memiliki perilaku negatif sehingga menimbulkan ketidaksukaan pada etnis pendatang tersebut. Problem ini yang menyebabkan terjadi benturan antara kelompok etnis (Indrawan & Lutfi, 2021).

Konflik bersinggungan dengan etnis dapat juga dilihat dari keterbelahan pribumi dan nonpribumi. Jarak sosial antara pribumi dan nonpribumi disebabkan oleh stereotip bahwa warga dari nonpribumi merupakan pendatang yang mencari penghidupan di daerah lain yang dapat mengancam kesempatan warga lokal memperoleh sumber kehidupan (Anggraini, 2022). Berkembangnya prasangka dan stereotip ini dapat menimbulkan konflik sosial antaretnis (Nirwanasari, 2019). Pada kondisi berbeda telah terjadi konflik etnis yang berlangsung secara berulang dipicu oleh stimulasi

struktural melibatkan pihak-pihak yang mempunyai pengaruh dengan menggunakan simbol etnis berakibat pada konflik horizontal. Konflik jenis ini dipicu oleh kompetisi memperebutkan lapangan pekerjaan dan penguasaan sektor pertanian (Pu, 2018). Pemicu konflik etnis yang mengemuka pada era Reformasi dapat ditambahkan berkenaan dengan pemanfaatan identitas etnis sebagai pendukung dalam perebutan kekuasaan di tingkat daerah (Nawir & Mukramin, 2019). Identitas etnis merupakan wujud dari identitas sosial yang menguat dapat memberi kontribusi untuk melahirkan konflik bernuansakan SARA (Abhusov, 2022).

Selain etnis, yang memicu tumbuhnya konflik di Indonesia adalah faktor agama. Bersumber dari berbagai literatur bahwa konflik agama secara beruntun pada era Reformasi terjadi yang berdampak pada kerusakan bangunan berupa rumah, tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintah, pasar, dan fasilitas publik berjumlah 16.465. Bukan hanya kerusakan bangunan. Konflik berlatar belakang agama di suatu wilayah menewaskan 5.000 orang dan 500.000 mengungsi karena sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi di daerah konflik tersebut (Suyono, 2019).

Konflik agama yang masih terus berlangsung sebagian disebabkan oleh penolakan terhadap pendirian rumah ibadah yang menyebabkan ketegangan antarpemeluk beragama (Hartani & Nulhaqim, 2020). Sebagian yang lain menunjukkan bahwa peletup konflik agama karena kurangnya saling menghormati, menghargai, dan toleransi antarumat yang mempunyai keyakinan berbeda (Fitriani, et al., 2020). Ada hal berbeda yang menjadi pemicu terjadinya konflik agama, yaitu fanatisme terhadap identitas komunal dengan menyertakan simbol agama bertujuan memobilisasi warga saat bertikai dengan kelompok lain (Saleh, 2022).

Faktor Politik

Setelah tumbang rezim Orde Baru mengubah tatanan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Sebagian ditandai oleh pemilihan kepemimpinan daerah dilakukan secara langsung. Harapan yang ingin diraih dalam memperebutkan tahta kepemimpinan dengan cara pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat, membangun kedewasaan berpolitik, dan sebagai agenda untuk pembelajaran berdemokrasi secara sehat bagi massa pemilih sehingga konstelasi persaingan yang tinggi tetap berada pada situasi damai. Kenyataannya pemilihan kepala daerah secara langsung banyak menimbulkan masalah. Selama proses politik meraih jabatan sebagai kepala daerah dari awal penentuan bakal calon oleh internal partai politik, penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum, strategi meraih pemilih, kampanye, dan hasil pemilihan menimbulkan konflik (Suyono, 2019).

Konflik politik berikutnya yang mengemuka setelah digelar peristiwa pemilihan kepala daerah langsung disebabkan oleh faktor institusi lokal sebagai penyelenggara tidak memiliki kemandirian dan tidak mempunyai kemampuan mengelola proses demokrasi selama pemilihan berlangsung di daerah. Dampaknya terjadi konflik dengan ditandai agresivitas, seperti aksi pendudukan dan perusakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah, perusakan fasilitas umum dan rumah warga, pembakaran kendaraan, serta bentrok antarpemilihan calon kepala daerah dan aparat keamanan yang menyebabkan korban jiwa (Suyono, 2019).

Faktor tambahan yang menyebabkan konflik politik adalah politik identitas. Pemahaman mengenai politik identitas merupakan gerakan politik yang memusatkan kegiatannya pada perbedaan berdasarkan kategorisasi bersumber dari keberagaman masyarakat. Politik identitas tersebut berpotensi menyebabkan intoleransi pada kelompok yang berbeda, seperti agama dan etnis. Proses politik identitas ini berakibat pada terjadinya kekerasan antarkelompok yang berbeda tersebut (Loy & Jacob, 2020). Faktor kekecewaan

karena jago yang diusung dalam pemilihan kepala daerah juga menjadi penyebab konflik politik. Suatu hal yang bisa dijelaskan pada keributan ini terjadi karena para pendukung tidak memandang secara objektif terhadap realitas sebenarnya mengenai konstelasi politik yang ada, tetapi lebih mempertimbangkan kedekatan secara emosional dan militansi yang tinggi. Identifikasi dari kedekatan secara emosional dan militansi menyebabkan frustrasi saat calon kepala daerah yang menjadi jagoannya kalah sehingga dilampiaskan dengan melakukan kekerasan pada pendukung pemenang, lembaga penyelenggara pemilu, atau perusakan terhadap fasilitas publik (Amruddin, 2020).

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang merupakan pencetus konflik berkaitan dengan problematika sumber daya alam yang mengusik kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam *realistic group conflict theory* dapat digunakan sebagai pijakan untuk menjelaskan konflik berkenaan dengan akses ekonomi. *Realistic group conflict theory* menerangkan konflik terjadi bukan hanya disebabkan faktor individu, melainkan dikarenakan oleh faktor situasi seperti mempersoalkan sumber-sumber penting yang menentukan kehidupan dan mengganggu keberlangsungan kearifan lokal di lingkungan masyarakat (Fetzer, 2018). Implementasi dari teori ini terlihat pada ancaman terhadap peran masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam akibat dari kegiatan penambangan emas yang dieksploitasi secara individual maupun dilakukan oleh perusahaan (Ahmad, 2018).

Gambaran mengenai konflik menyangkut ancaman terhadap kearifan lokal dikuatkan oleh pada aktivitas penambangan yang berdampak pada menipisnya sumber daya alam sehingga menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh sumber rezeki. Kesulitan ini terjadi karena area lahan dikelola dengan berpondasi pada tradisi yang merupakan kawasan sandaran utama untuk mendapatkan penghasilan semakin terbatas akibat digusur untuk penambangan. Proses tersebut yang menjadikan resistansi masyarakat petani dengan ditunjukkan oleh perlawanan

terhadap proyek pertambangan. Resistansi ini dihentikan dengan cara represif menggunakan jasa kelompok masyarakat setempat untuk melawan kelompok yang menolak kegiatan pertambangan. Benturan kelompok masyarakat yang pro pertambangan dan kelompok masyarakat yang menolak pertambangan dapat menyebabkan konflik horizontal. Selain menggunakan kelompok masyarakat, perusahaan bekerja sama dengan pihak aparat keamanan untuk meredam konflik. Pendayagunaan aparat keamanan untuk memaksa warga menerima aktivitas pertambangan memperoleh perlawanan. Perlawanan dilakukan oleh warga karena merasa dirugikan dari aktivitas pertambangan menyebabkan konflik vertikal dengan aparat keamanan tersebut (Setiwawan & Ubaidullah, 2019; Cadith, 2019).

Sengketa lahan menjadi bagian penting yang tak boleh ditinggalkan untuk menjelaskan konflik karena disebabkan oleh faktor ekonomi. Sengketa lahan tersebut mengemuka berasal dari kepemilikan lahan pribadi yang digunakan untuk pembangunan fasilitas publik dan perkebunan (Rumopa, 2020; Mustofa & Bakce, 2019). Problem lahan yang dimanfaatkan untuk fasilitas publik seperti pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan kereta api, bandara, bendungan, dan pelabuhan dapat menimbulkan konflik dengan warga. Konflik terjadi karena warga terdampak pengusuran lahan merasa tidak memperoleh ganti rugi yang layak sehingga menjadikan warga melakukan protes terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut.

Berawal dari protes warga dapat menimbulkan masalah yang lebih meluas karena penanganan pencegahan konflik tidak dilakukan secara tepat, yaitu tidak mengedepankan cara persuasif, tetapi lebih menggunakan cara represif. Pemilihan strategi penanganan konflik dengan cara represif ini menyulut kobaran penolakan lebih besar sehingga menyebabkan terjadinya benturan fisik antara warga dengan aparat yang bertugas mengamankan pengerjaan proyek infrastruktur yang termasuk dalam kategori proyek strategis nasional tersebut (Nulhaqim, et al., 2020; Yuana, 2020, Ibrahim, et al., 2022; Anggraini, 2022).

Dampak Pandemi Covid-19

Keterpurukan Pelaku Usaha

Covid-19 menjadi pandemi melanda pada aras global, tak terkecuali menimpa di Indonesia. Negara ini termasuk yang ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Seperti seluruh sektor mengalami penyesuaian akibat dari serangan Covid-19 yang belum ditemukan obat mujarab bila seseorang dijangkiti oleh penyakit tersebut. Sektor ekonomi memiliki hambatan besar melawan terjangkit badai Covid-19. Terbukti berbagai bidang usaha dalam skala besar, menengah, kecil, dan mikro tidak sedikit mengalami kelesuan dalam mengelola aktivitas bisnisnya karena tak tahan digulung krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Seperti pada industri ekonomi kreatif pariwisata yang dipaksa berhenti total saat berlangsung pandemi Covid-19. Pelaku pariwisata tak mampu menjalankan usahanya karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Orang tak berani melakukan kunjungan wisata dan memilih berdiam di rumah untuk menghindari tertular Covid-19. Realitas menunjukkan lemahnya pariwisata selama pandemi Covid-19 ternyata menimbulkan masalah yang dapat dilihat dari tertutupnya kesempatan lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata sebanyak 75 juta lapangan pekerjaan dan berpotensi kehilangan pendapatan sebesar 21 triliun dolar Amerika.

Masalah terjadi karena penurunan jumlah kunjungan wisatawan luar negeri sebanyak 53,36% dari 6,3 juta menjadi 2,9 juta pada kurun waktu Januari-Mei 2020 (Utami & Kafabih, 2021). Data lebih lengkap disajikan bahwa pada tahun 2020 telah terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 74,8% dari tahun 2019.

Peristiwa penurunan ini ternyata terus terjadi pada tahun 2021. Data lain menunjukkan selama pandemi Covid-19 ada penurunan hunian hotel berbintang di berbagai wilayah di Indonesia, seperti pada tahun 2020 ada penurunan sebesar 36% di Jakarta, 73,8% di Bali, 41,2% di Yogyakarta, dan 39,8% di bagian wilayah berbeda di seluruh Indonesia. Penurunan ini karena jumlah kunjungan wisatawan yang semakin kecil saat pandemi Covid-19 (Paludi, 2022).

“

Negara ini termasuk yang ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Seperti seluruh sektor mengalami penyesuaian akibat dari serangan Covid-19 yang belum ditemukan obat mujarab bila seseorang dijangkiti oleh penyakit tersebut.

Melemahnya sektor pariwisata tersebut mempunyai efek pada keberlangsungan usaha menengah, kecil dan mikro seperti terjadi di Bali. Hal ini dibuktikan dengan pengelolaan bisnis yang dijalankannya terkoreksi menjadi 37 % pada usaha minuman dan makanan serta kerajinan menjadi 17,03 % (Rosita, 2020). Ancaman terhadap keberlanjutan usaha menengah, kecil, dan mikro sebagai akibat dari penurunan jumlah pengunjung berbagai objek wisata selama pandemi Covid-19 juga terjadi di Dieng yang merupakan andalan wisata di Jawa Tengah (Afriana & Widiyanto, 2021), objek wisata negeri atas awan di Benteng Mamullu yang menjadi destinasi wisata utama di Sulawesi Selatan (Dappa, et al., 2021), dan wisata sungai gelombang yang menjadi salah satu wisata alam di provinsi Riau (Risman, et al., 2021).

Bukan sebatas pada usaha menengah, kecil, dan mikro yang menjadi bagian dari sektor pariwisata, melainkan pada pengelolaan

wirausaha pada umumnya juga mengalami nasib sama. Pandemi menggoyahkan bangunan bisnis yang sudah dikelola oleh usaha menengah, kecil, dan mikro secara mapan sebelum merebaknya Covid-19. Indikatornya tampak pada data dengan jumlah 1.785 koperasi dan 167.713 pelaku UMKM menjadi terganggu dalam menjalankan usahanya sejak adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya data memperlihatkan usaha menengah kecil dan mikro yang secara serius sudah tidak lagi mampu memproduksi ada 37.000 dengan persentase 56% sebagai dampak dari pandemi Covid-19 (Thaha, 2020). Usaha menengah, kecil, dan mikro mengalami tekanan dalam mengelola bisnisnya dalam kurun waktu pandemi Covid-19 sehingga terancam gulung tikar bahkan sudah ada yang berhenti melakukan usaha, pemicunya adalah penurunan penjualan sebanyak 56%, kesulitan permodalan sebanyak 22%, hambatan distribusi produk sebanyak 15%, dan kesulitan bahan baku sebanyak 4% (Sugiri, 2020).

Tidak sekadar menerjang usaha menengah, kecil, dan mikro. Ternyata pandemi Covid-19 menjadi bencana bagi perusahaan. Fenomena ini dibuktikan oleh kajian yang menjelaskan ada 25 perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan menipisnya kemampuan berkembang sehingga mengindikasikan terjadinya kebangkrutan (Armadani, et al., 2021), 22 perusahaan menderita penurunan laba (Hidayat, 2021), banyak perusahaan yang terpaksa menjual aset untuk membiayai permodalan (Hadiwardoyo, 2020), dan terjadi perbedaan profitabilitas sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 yang disebabkan menurunnya total pendapatan yang diperoleh perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan sehingga laba menjadi lebih kecil (Evany, et al., 2022). Nasib serupa juga menimpa perusahaan yang spesifik bergerak dalam bidang perhotelan (Harahap, et al., 2021), transportasi (Lumenta, et al., 2021), ritel (Pratama, et al., 2021), manufaktur (Sari & Setyaningsih, 2022), dan industri barang konsumsi (Ofeser & Susbiyantoro, 2021), pandemi Covid-19 menjadikan kesehatan perusahaan terganggu.

Kemiskinan Bertambah Besar

Berdasarkan data di atas membuktikan perusahaan yang mengelola berbagai bidang bisnis mengalami krisis karena tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Bahaya yang ditimbulkan dari krisis yang menimpa perusahaan menyebabkan kemiskinan semakin bertambah besar. Pemantiknya adalah efisiensi perusahaan karena situasi keuangan yang kurang sehat menempuh strategi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Peristiwa senada juga terjadi pada usaha menengah, kecil, dan mikro, baik yang mengelola bisnis pariwisata maupun sektor lain memberi dampak pada peningkatan kemiskinan. Penyebabnya adalah usaha menengah, kecil, dan mikro memilih jalan mengurangi tenaga kerja sebagai strategi bertahan menghadapi pandemi Covid-19. Kehilangan pekerjaan ini bukan menerpa karyawan saja, tetapi *entrepreneur* berskala usaha menengah, kecil, dan mikro ikut kehilangan pekerjaan karena bisnis yang dijalankannya bangkrut gara-gara pandemi Covid-19 (Muslim, 2020; Faizi, et.al., 2022; Arafa & Nurwati, 2020).

Kemiskinan semakin tergelar nyata sebagai konsekuensi terpuruknya kondisi perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19 membuat ruang gerak memperoleh penghasilan menjadi terbatas. Kesempatan yang relatif minimalis memperoleh pendapatan ini disebabkan oleh perusahaan melakukan langkah penghematan dengan melakukan efisiensi pemanfaatan tenaga kerja. Ada dua hal yang dilakukan perusahaan untuk mengimplimentasikan efektivitas pendayagunaan karyawan, yaitu melakukan kebijakan tidak akan menambah tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja. Akibatnya menutup kemungkinan bagi para pencari kerja yang jumlahnya sangat besar untuk memperoleh pekerjaan dan karyawan kehilangan pekerjaan.

Ada semangat yang dilakukan oleh karyawan yang kehilangan pekerjaan dan pencari pekerjaan dengan strategi mengalihkan rencana dengan membangun usaha menengah, kecil, dan mikro. Strategi yang diputuskan untuk mengatasi kehilangan pekerjaan dan kesulitan memperoleh pekerja dengan membuka usaha baru, saat

diterapkan bukan perkara mudah. Hal ini dilatarbelakangi saat masa pandemi berlangsung, untuk wirausahawan dikategorikan menengah, kecil, dan mikro yang sudah mengelola bisnis tidak kuat menghadapi situasi pandemi Covid-19. Tak sedikit pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro menghentikan usahanya karena omzet penjualan tak sebanding dengan ongkos operasional.

Sebagai jalan terbaik pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro terpaksa berhenti menjalankan aktivitas roda bisnis daripada menanggung kerugian lebih besar. Bagi yang sudah memiliki pengalaman menjalankan usaha pun merasa kesulitan, apalagi bagi wirausahawan yang baru melangkah mendirikan bisnis, tentu akan lebih banyak hambatan. Tantangan begitu berat memulai bisnis di masa pandemi Covid-19 menjadikan dirinya mengurungkan niat untuk membuka usaha, meski dalam skala kecil dan memaksa untuk menjadi pengangguran. Realitas ini yang menjadikan jumlah kemiskinan terus membengkak selama pandemi Covid-19 (Setyadi & Indriyani, 2021; Kasna, 2021; Ihsani & Rohman, 2022).

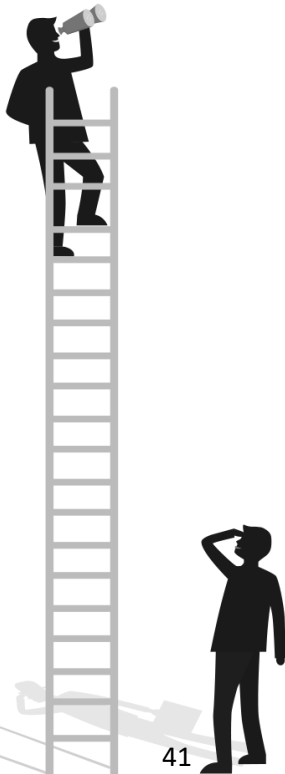
Situasi ekonomi dalam keadaan tidak baik-baik saja semakin memberi gambaran membengkaknya kemiskinan di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Situasi ini ditandai dengan meroketnya harga kebutuhan pokok dan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok terasa mahal karena ongkos produksi berbiaya tinggi. Selain pembiayaan tinggi bahwa barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari harganya menjulang dipicu oleh kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Sayangnya harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi kebutuhan sehari-hari mahal tidak dimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Realitasnya justru sebaliknya, daya beli masyarakat semakin menurun akibat susahny mendulang rezeki di era pandemi Covid-19. Penghasilan yang amat minim ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, sekalipun yang paling mendasar, yaitu kebutuhan pokok. Untuk mencukupi kebutuhan pokok saja terasa susah untuk diperoleh, apalagi kebutuhan lain, seperti membiayai

pendidikan yang memadai dan kesehatan yang layak terlalu berat untuk dijangkau oleh dirinya. Ketika indikator kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan tidak terpenuhi menjadi pertanda bahwa dirinya telah jatuh pada jurang kemiskinan. Masyarakat yang mengalami peristiwa ini, jumlahnya bertambah besar saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia (Wardani, et al., 2022; Sakharina, 2020; Prayoga & Sukim, 2021; Anggita, et al., 2020; Putri & Wulansari, 2022).

BAGIAN 2

MENGAPA *SOCIAL* *ENTREPRENEURSHIP* PENTING?



1

Berangkat dari Problematika Negeri Paradoks dan Kemiskinan

Tanah airku Indonesia
Negeri elok amat kucinta
Tanah tumpah darahku yang mulia
Yang kupuja sepanjang masa

Tanah airku aman dan makmur
Pulau kelapa yang amat subur
Pulau melati pujaan bangsa
Sejak dulu kala

Melambai-lambai
Nyiur di pantai
Berbisik-bisik
Raja kelana

Memuja pulau
Nan indah permai
Tanah airku
Indonesia

Lirik lagu di atas merupakan karya salah satu komponis besar di Indonesia, yaitu Ismail Marzuki. Lagu yang berjudul *Rayuan Pulau Kelapa* tersebut mencerminkan Indonesia memiliki keindahan alam yang begitu memukau. *Wonderland* Indonesia. Gunung-gunung, pulau-pulau, lautan, dan daratan menyajikan keelokan luar biasa yang tiada duanya di antara negara-negara lain di dunia. Bukan hanya sekadar indah, Indonesia adalah negeri makmur. Kekayaan alamnya amat melimpah menjadi anugerah tersendiri yang dilimpah oleh Allah Swt. Tentang kekayaan alam Indonesia, ada baiknya

menyimak lirik lagu karya cipta Tonny Koeswoyo salah satu punggawa band legendaris Koes Plus.

Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai tiada topan kau temui
Ikan dan udang mengampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah sorga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
.....

“

***Bukan hanya sekadar indah, Indonesia
adalah negeri makmur. Kekayaan
alamnya amat melimpah menjadi
anugerah tersendiri yang dilimpah oleh
Allah Swt.***

Lirik lagu itu menunjukkan realitas mengenai kekayaan alam Indonesia begitu melimpah. Terkandung di lautan, berbagai ragam hayati maupun nonhayati dapat menjadi sandaran hidup untuk rakyat. Begitu juga di daratan, terdapat banyak jenis flora, fauna, dan kandungan bumi bisa menopang kehidupan warga. Namun sayangnya, seperti yang sudah dipaparkan pada bagian satu. Kita hidup di negeri paradoks. Hidup di suatu negeri yang subur, makmur, dan kekayaan alam kaya raya, tetapi rakyatnya masih banyak yang hidup miskin.

Hidup di negeri paradoks, faktor penyebabnya adalah keindahan dan kekayaan alam Indonesia banyak dikuasai oleh oligarki. Dampaknya mengimbas pada hasil pengelolaan alam Indonesia hanya mengalir pada segelintir orang. Dirinya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengelola alam secara

serampangan sehingga rakyat tidak memperoleh kemanfaatan dari pengelolaan alam tersebut. Realitas ini menjadikan kekayaan alam yang dikelola oleh oligarki tak memberi arti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Tidak berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat, tetapi mengelola alam dengan sembarangan akhirnya membuat rakyat susah. Proyek-proyek berbasis ekonomi yang dilakukan oligarki justru menjadi bencana bagi masyarakat sekitar, terutama kerusakan lingkungan yang membuat masyarakat di lingkungan proyek kehilangan pekerjaan.

Bagian lain yang dijelaskan pada bagian satu adalah hidup negeri miskin negarawan. Barisan yang diberi amanah memimpin negeri ini, ternyata tidak banyak yang bertindak sebagai negarawan. Ulah dirinya sekadar pencitraan untuk melanggengkan kekuasaan. Hanya sedikit yang berani tidak populer memperjuangkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi rakyat. Hal ini terjadi karena pemimpin sekadar meladeni para elite yang bisa melapangkan jalan mempertahankan jabatan atau meraih jabatan lebih tinggi lagi.

Memang sudah ada upaya dilakukan pemegang kebijakan dengan meluncurkan program bantuan sebagai intervensi perbaikan ekonomi masyarakat. Namun, hasilnya ternyata tidak efektif membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial, seperti *pertama* Program Keluarga Harapan belum manjur membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia (Juaranas, 2017; Najidah & Lestari, 2019; Infitah, et al., 2019). *Kedua*, program Indonesia Pintar belum mujarab sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan (Retnaningsih, 2019; Yusup, et al., 2019; Zulvia & Suyanto, 2017). *Ketiga*, program raskin hanya berguna sebagai *charity* memenuhi kebutuhan pokok saja sehingga belum bisa menjadi variabel untuk memberi sumbangan bagi penurunan kemiskinan (Rahayu, et al., 2019; Kusuma & Dewi, 2017; Rifal & Sulaeman, 2016). *Keempat*, bantuan langsung tunai belum memberi kemanfaatan bagi keberlanjutan menaikkan kesejahteraan warga miskin (Hikmah & Firdaus, 2018; Akib & Risfaisal, 2015; Oktanto, et al., 2015).

Merebaknya pandemi Covid-19 memberi andil dalam memperpuruk keadaan. Ketahanan ekonomi yang rapuh diterpa pandemi Covid-19 membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja agar bisa *survive*. Dampak lain adalah usaha menengah, kecil, dan mikro banyak yang menghentikan bisnisnya karena tak kuat melawan serangan pandemi Covid-19. Situasi ini semakin menambah jumlah pengangguran, karena usaha menengah, kecil, dan mikro terpaksa memulangkan karyawannya sebagai akibat dari memilih jalan menghentikan aktivitas bisnis. Hal ini terjadi karena pada masa pandemi Covid-19 kondisi keuangan usaha menengah, kecil dan mikro merugi. Melihat kondisi demikian, jalan terbaik yang ditempuh adalah mengakhiri bisnisnya. Jumlah pengangguran yang terus menumpuk di masa pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya kemiskinan. Ketiadaan penghasilan membuat dirinya tak mampu memenuhi kebutuhan pokok.

Sebenarnya pemangku kepentingan sudah membuat bermacam-macam program bantuan sosial untuk membantu masyarakat terkena dampak pandemi Covid-19. Seperti agenda program bantuan sosial ada yang secara khusus diberikan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Namun, program bantuan sosial yang diberikan pada saat pandemi ternyata belum mampu mengurai masalah. Indikatornya adalah kemiskinan tetap dalam jumlah besar meski program bantuan sosial telah diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Hal ini dibuktikan oleh realitas, yaitu *pertama*, implementasi bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial tidak berjalan semestinya (Noerkaisar, 2021; Wahidah, et al., 2022; Latif & Pangestu, 2022). *Kedua*, bantuan berwujud program keluarga harapan belum sepenuhnya memberi manfaat pada saat pandemi Covid-19 karena tidak mencerminkan keadilan bagi keluarga penerima manfaat, sosialisasi tidak efektif, dan data administrasi banyak menemui masalah (Mediana & As' ari, 2021; Jatmiko, dkk., 2021; Kalsum & Mubarak, 2022). *Ketiga*, bantuan sosial tunai dan dana desa ternyata belum efektif dan menimbulkan masalah bagi yang mendistribusikan dan penerimanya (Mufida, 2021; Tutdin & Thahura, 2021; Firmansyah & Fanida, 2022).

Keempat, pemberian bantuan sembako tidak sesuai rencana karena problem penyaluran tidak tepat sasaran, ketidaksesuaian pendataan, dan ketidakselarasan jadwal penyaluran sehingga belum efektif menanggulangi kemiskinan (Sianturi, dkk., 2021; Tari, 2021; Darajati, et al., 2022). *Kelima*, kartu prakerja kurang memberi kontribusi dalam mengatasi pengangguran karena dana yang diperoleh hanya bersifat konsumtif memenuhi keperluan sehari-hari sehingga tidak berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ginting & Herdiyana, 2020; Mardewi, 2021; Rahman & Rahman, 2021).

Realitas di atas menunjukkan bahwa pemimpin yang diberi amanah mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat tidak selamanya berhasil. Hal ini terlihat pada kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber utama membantu masyarakat agar memiliki kekuatan ekonomi memadai sehingga dapat hidup layak, tetapi realitasnya berbeda. Hasil dari eksploitasi kekayaan alam tidak dikelola dengan baik oleh pemimpin yang menyebabkan jumlah kemiskinan tak berkurang justru semakin bertambah besar. Saat memahami kenyataan itu sudah selayaknya berkembang kesadaran menjadi warga tak bisa menggantungkan nasib pada orang-orang yang mengendalikan kekuasaan. Bila ingin memperbaiki kualitas hidup berpijaklah pada religi! Bahwa suatu kaum tak akan berubah, kecuali dirinya mengubah nasib sendiri.

Belajar dari pondasi religi itu ada hikmah yang bisa dipetik, seperti sebagai warga, tak boleh menyandarkan kehidupan hanya pada belas kasih dari punggawa birokrasi. Hal tersebut perlu menjadi perenungan karena punggawa birokrasi belum tentu bertanggung jawab melaksanakan tugas dengan baik untuk memakmurkan rakyat. Pemahaman ini dapat menjadi sumbu energi untuk menumbuhkan motivasi berusaha sungguh-sungguh dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan secara mandiri. Tidak perlu terlalu bergantung dan menunggu punggawa birokrasi, cara yang bisa ditempuh agar rakyat memiliki kemandirian membangun kesejahteraan dengan mengimplementasikan kewirausahaan sosial yang disebut sebagai *social entrepreneurship*.

2

Kewirausahaan Sosial sebagai Solusi

Kewirausahaan sosial dapat dijadikan jalan keluar mengurai benang kusut problematika kemiskinan yang jumlahnya kian membengkak. Hal tersebut karena kewirausahaan sosial merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan menyelesaikan persoalan yang menjerat individu maupun komunitas. Persoalan-persoalan yang dialami individu maupun komunitas bisa diatasi dengan baik dilatarbelakangi oleh kewirausahaan sosial menjadi gerakan sosial yang dimotori oleh orang-orang memiliki jiwa sosial tinggi dengan disertai komitmen kuat, memiliki daya inovasi, kreativitas, berani mengambil risiko tinggi, kemampuan melakukan adaptasi, dan terampil menggerakkan partisipasi masyarakat. Kemampuan *soft skills* ini merupakan bekal utama memecahkan persoalan yang dialami oleh masyarakat dengan cara berdiri di atas kaki sendiri sehingga kesejahteraan hidupnya bisa terpenuhi. Kemandirian menjadi proses yang penting karena individu maupun komunitas saat menghadapi masalah tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada pemerintah. Mengapa? Karena pemegang kebijakan yang seharusnya memiliki kewajiban membantu belum tentu memiliki ketepatan sasaran menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Seperti dapat dilihat pada berbagai program bantuan sosial memang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Sayangnya belum mampu membangun kemandirian karena bantuan yang diberikan bersifat *charity* dengan cara bederma. Akibatnya, bantuan sosial yang disalurkan dengan beragam jenis, terbukti tidak efektif mengatasi kemiskinan sehingga harapan mencapai kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Pemberian bantuan bersifat *charity* justru

menimbulkan dampak, yaitu membentuk mental peminta-minta. Hal ini terlihat pada persoalan yang dihadapinya, untuk terbebas dari jerat kemiskinan, hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat dirinya tidak beranjak dari kemiskinan meski bermacam-macam paket bantuan sosial diluncurkan oleh pemerintah.

Pemberian bantuan sosial terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka memerlukan alternatif lain yang bisa menggerakkan masyarakat mencapai kelimpahan rezeki tanpa bergantung pada donasi pemerintah. Cara yang bisa dilakukan dengan mengelola kewirausahaan sosial. Kemandirian bisa terwujud dari pengembangan kewirausahaan sosial karena idenya bersumber dari gagasan sendiri, pelaksanaannya diupayakan secara pribadi, dan buah keberhasilan yang dipetik penuh mengandung makna, yaitu keberhasilan usaha yang dilakukan dapat dilihat dari seberapa besar memberi kemanfaatan untuk masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan mulia ini, realisasinya tidak seperti bisnis pada umumnya, yaitu keberhasilannya dihitung dari seberapa keuntungan yang diperoleh untuk pemiliknya. Beda halnya dengan model kewirausahaan sosial. Di dalamnya mengandung sari pati menekankan sebagai individu, komunitas, organisasi atau lembaga yang mengelola kewirausahaan social bergerak untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya. Gerakan kewirausahaan sosial ini berangkat dari keprihatinan terhadap situasi sosial yang mendorong terbentuknya model bisnis baru merupakan campuran dari motivasi tinggi mewujudkan misi sosial menyatu dengan disiplin, inovasi, dan keteguhan layaknya dunia bisnis. Jadi, dalam prosesnya, orang yang terampil mengemudikan kewirausahaan sosial merupakan sosok sebagai seorang wirausaha yang menjalankan usaha dengan profesional dan secara spesifik memiliki misi suci melakukan pemberdayaan pada bidang ekonomi, sosial, perdamaian, politik, budaya atau bidang yang lain di masyarakat.

“

Kemandirian bisa terwujud dari pengembangan kewirausahaan sosial karena idenya bersumber dari gagasan sendiri, pelaksanaannya diupayakan secara pribadi, dan buah keberhasilan yang dipetik penuh mengandung makna, yaitu keberhasilan usaha yang dilakukan dapat dilihat dari seberapa besar memberi kemanfaatan untuk masyarakat.

Ada tujuan agung dari pemberdayaan yang dilakukan menggunakan kewirausahaan sosial, yaitu bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini bisa tercapai karena kewirausahaan sosial didasari oleh nilai sosial, yaitu menyediakan kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, menumbuhkan kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas, merintis jalan bagi orang-orang termarginalkan, dan membukakan kesempatan agar individu-individu terpinggirkan menikmati kemakmuran secara mandiri. Selanjutnya alternatif program yang bisa dikelola untuk mewujudkan nilai sosial adalah penanggulangan kemiskinan, membantu pelayanan kesehatan, baik secara psikologis maupun fisik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non formal, menjaga kelestarian lingkungan, dan perbaikan kesejahteraan sosial. Pilihan program yang dilaksanakan tersebut mampu membawa transformasi dengan menguatkan kapasitas lokal untuk mewujudkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Secara khusus kapasitas lokal tersebut bisa melakukan perbaikan ekonomi secara mandiri. Efek positifnya adalah memiliki posisi

tawar memadai dalam proses pembangunan sehingga tidak menjadi objek politik bagi para penguasa.

Penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan *situational analysis* (Clarke, et al., 2022) yang mengkaji *social entrepreneurship* (Suyono, 2022) terbukti sebagai solusi untuk melepaskan dari belenggu kemiskinan yang menjadikan komunitas setempat hidup sejahtera, harkat dan martabat terjaga, serta secara sosiologis derajat sosialnya terangkat. Bersumber data dari hasil wawancara dengan subjek dapat dinyatakan bahwa kelurahan Mangunan secara geografis termasuk wilayah memiliki *landscape* perbukitan menjadikan kondisi tanah kurang subur untuk jenis tanaman produktif. Tanah di daerah Mangunan sebagian besar hanya bisa dibudidayakan untuk tanaman yang tidak memiliki ekonomi tinggi. Lingkungan alam yang tidak subur menyebabkan masyarakat hidup kekurangan dan tak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga sudah bisa makan dari bahan pokok ketela pohon sudah merasa bersyukur. Hidup yang serba terbatas membuat warga tak bermimpi muluk-muluk. Seperti dirinya tidak berani bercita-cita untuk menempuh pendidikan karena ketiadaan biaya. Akibatnya sebagian besar warga berpendidikan rendah. Dirinya juga tidak berani untuk memberi gizi terbaik anggota keluarga agar memiliki tumbuh kembang yang baik sesuai dengan usianya karena tak ada lagi uang tersisa, selain untuk memperoleh kebutuhan pokok.

“Kondisi alam yang tidak menguntungkan secara ekonomi membuat hidup kami terpinggirkan. Orang-orang berasal dari daerah lain selalu memandang rendah kami. Kami dilihat sebagai warga miskin, tertinggal, dan terbelakang,” ungkap salah satu tokoh masyarakat. Berasal dari ungkapan tokoh ini boleh dibilang warga menjadi termarginalkan sehingga memiliki status sosial rendah. Dampak dari warga yang termarginalkan secara ekonomi maupun sosial membuat kaum mudanya tak mau tinggal di kampung. Mereka malu dan rendah diri dianggap sebagai warga yang miskin, tertinggal, dan terbelakang. “Sebagai jalan keluar mengatasi rasa rendah diri memilih untuk pergi. Sebisa mungkin bekerja di daerah lain. Bila tidak ada kesempatan bekerja pun tetap tidak mau pulang. Memilih

tinggal di tempat lain meski menjadi pengangguran, yang penting tidak tinggal di daerahnya supaya tidak dipandang rendah lagi oleh orang lain,” kata tokoh itu lagi.

Kehendak dari tenaga kerja produktif yang lebih memilih bekerja di daerah lain membuat banyak kehilangan sumber daya manusia untuk membangun desa. Yang masih tinggal di desa memang tidak ada alternatif lain, satu-satunya pilihan bekerja di daerah asal. Faktor penyebabnya adalah dirinya tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di tempat lain. Ketiadaan kesempatan merantau karena kurang mampu bersaing untuk memasuki dunia kerja di luar daerahnya, terpaksa bekerja di kampung halaman meski penghasilannya kecil sebagai buruh serabutan. Salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh warga adalah menyadap getah dan menebang pohon pinus yang tumbuh di hutan lindung. Sebenarnya menyadap getah dan menebang pohon pinus adalah kegiatan ilegal dan melanggar hukum. Tindakan menyimpang dari hukum yang berlaku ini karena hutan pinus merupakan hutan lindung yang harus dijaga kelestariannya. Masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyadapan dan penebangan hutan pinus dibiarkan begitu saja mengancam kerusakan lingkungan.

Pekerjaan sebagai penyadap getah dan menebang pohon pinus yang mengakibatkan kerusakan lingkungan itu ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi. Dirinya tetap saja hidup miskin. Secara ekonomi tidak ada perubahan dari pekerjaannya menebang pohon pinus, hidup tetap susah. Memang tidak banyak yang bisa diharapkan dari penebangan pohon pinus karena terbukti warga tetap miskin dan ongkos kerugiannya terlalu besar. Hal ini dinilai sudah tidak ada efek positif bagi ekonomi keluarga karena kondisi warga terus miskin, tetapi ulah penebangan hutan pinus menyebabkan perbukitan menjadi gundul. Akibatnya berpotensi terjadinya bencana kekeringan dan tanah longsor. Kalau bencana ini terjadi, warga merasakan penderitaan lebih berat lagi, seperti hidup sudah serba kekurangan, masih ditambah menjadi warga yang terdampak bencana.

Rupanya permasalahan penyadapan dan penebangan pohon pinus secara tak terkendali menyebabkan kerusakan lingkungan menembus radar pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab mengelola hutan pinus. Pemangku kepentingan mengajak salah satu tokoh masyarakat itu berembung mencegah penyadapan dan penebangan pohon pinus untuk menyelamatkan keberadaan kawasan hutan lindung. Diskusi tersebut membicarakan upaya kesadaran warga menjaga kelestarian hutan dengan rela meninggalkan pekerjaannya. Namun, sekadar melarang warga dengan tindakan represif agar tidak menyadap getah dan menebang hutan pinus tanpa mencarikan alternatif pekerjaan, bukan langkah bijak. Diperlukan lapangan pekerjaan baru agar warga tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok. Barangkali dari lapangan pekerjaan baru, penghasilannya menjadi lebih baik sehingga dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan modal usaha dengan harapan tingkat perekonomian warga menjadi meningkat.

Tawaran gagasan dari pemangku kepentingan disambut baik oleh salah satu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini memikirkan cara untuk mewujudkan rangkuman diskusi dengan pemangku kepentingan. Setelah melalui proses menggali pemikiran dari unsur birokrasi lokal, kelembagaan masyarakat, dan tokoh masyarakat lain untuk memperoleh ide kreatif mengenai program yang dapat menjadi lahan pekerjaan bagi warga. Secara ideal program tersebut membuka kesempatan lapangan pekerjaan dan bermanfaat menumbuhkan kerelaan dari warga untuk merawat hutan pinus sehingga terjaga kelestariannya. Setelah melakukan refleksi hasil olah pikir pribadi dan masukan dari pihak lain, maka ditemukan buah pikiran cemerlang mengembangkan desa wisata mengusung tema utama *ecotourism*. Pemahaman mengenai *ecotourism* merupakan model pariwisata menekankan pada konservasi yang berusaha mempertahankan kelestarian lingkungan di suatu kawasan. Manfaat yang diperoleh dari menjaga kelestarian lingkungan dapat menjadi daya tarik wisata sehingga memberi nilai tambah secara ekonomi dengan mengutamakan potensi budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan pemahaman mengenai *ecotourism* dapat menjadi solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Mangunan saat meninggalkan pekerjaan sebagai penyadap getah dan menebang hutan pinus akan menjadi pengangguran. Solusinya adalah hutan pinus dapat dijadikan kawasan *ecotourism* dengan menggunakan model kewirausahaan sosial. Sesuai dengan konsep mengenai kewirausahaan sosial yang membangun usaha menggunakan kaidah bisnis yang dikelola secara profesional, tetapi tujuan bukan semata mencari keuntungan. Adapun tujuan utama memiliki misi sosial, yaitu memecahkan persoalan yang ada di komunitas.

Seperti yang terjadi di Mangunan, hutan pinus dijadikan kawasan *ecotourism*. Manajemen dalam menyelenggarakan *ecotourism* mengacu pada prinsip-prinsip kewirausahaan sosial, yaitu ada operator yang menjalankan bisnis pariwisata yang berbasis lingkungan tersebut. Operator mengoperasikan bisnis pariwisata tersebut mengikuti langkah-langkah bisnis secara profesional. Saat ada keuntungan yang diperoleh, bukan dinikmati oleh operator saja, tetapi laba yang diperoleh memberi banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Keuntungan lain lebih besar yang bisa didulang adalah kesadaran masyarakat berkembang dengan sendirinya untuk menjaga kelestarian hutan pinus. Kesadaran ini bisa mekar karena kelestarian hutan pinus merupakan aset utama bagi warga untuk mengembangkan *ecotourism*. Daya tarik wisata ini tergantung pada tumbuhnya hutan pinus di kawasan hutan lindung. Hutan pinus yang dipelihara dengan baik mengukir lingkungan yang nyaman, teduh, asri, dan menjadi potensi untuk menarik wisatawan berkunjung di destinasi hutan pinus. Wawasan tersebut yang membentuk kesadaran warga untuk tidak menyadap getah dan menebang pohon pinus lagi.

Ketika warga keluar dari pekerjaannya menyadap getah dan menebang pohon pinus, tidak ada kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan. Pembangunan kawasan *ecotourism* menjadikan peluang untuk memasuki profesi baru yang tak pernah ada sebelumnya. Warga bisa menjadi operator, membuka usaha kuliner dan mengelola

parkir. Inilah keunggulan dari *ecotourism* menggunakan pendekatan *social entrepreneurship*. Kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Berbeda dengan manajemen yang sepenuhnya berada di tangan investor, seluruh keuntungan menjadi miliknya. Warga hanya jadi penonton, tidak ada kesempatan menjadi pengelola dalam bisnis *ecotourism* tersebut.

“

Pembangunan kawasan *ecotourism* menjadikan peluang untuk memasuki profesi baru yang tak pernah ada sebelumnya. Inilah keunggulan dari *ecotourism* menggunakan pendekatan *social entrepreneurship*.

Hal itu terlihat pada pengelolaan hutan pinus yang diamankan pada operator di bawah naungan koperasi dalam menjalankan *ecotourism* berpijak pada kewirausahaan sosial ternyata menjadi berkah bagi masyarakat setempat. Kawasan Hutan Pinus Mangunan memiliki pesona bagi wisatawan. Tidak terlalu lama *ecotourism* hutan pinus dibuka menjadi perhatian wisatawan. Jumlah kunjungan pada destinasi hutan pinus menembus jumlah yang sangat besar. Saat wisatawan yang berkunjung ke kawasan hutan pinus menjulang ternyata berefek positif bagi bisnis pendukungnya, seperti layanan bisnis kuliner menjadi laris manis dan berbagai produk kerajinan lokal sebagai souvenir menjadi laku sehingga menjadikan warga lebih sejahtera.

Operator terus mengembangkan ide kreatifnya agar lebih banyak memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Ide pengembangannya bekerja sama dengan donatur yang berasal dari kalangan swasta mendirikan *glamping*, yaitu menginap di alam terbuka menggunakan fasilitas layaknya seperti di hotel. *Glamping* ini dibuat

dalam rangka merealisasikan pengembangan dari *mass tourism* yang memfokuskan pada jumlah kunjungan wisata dalam jumlah besar menjadi *quality tourism* yang memperhatikan jumlah kunjungan tidak terlalu besar, tetapi mendatangkan pemasukan yang tinggi.

Keberhasilan mengembangkan kawasan *ecotourism* hutan pinus menstimulasi berdirinya kawasan desa wisata di Mangunan. Melalui koordinasi kelompok sadar wisata dibuka berbagai destinasi wisata. Semua diinisiasi dan dikerjakan menggunakan sumber daya setempat, mengedepankan kemandirian, dan tidak mengandalkan pengajuan proposal bantuan. Penggagas memaksimalkan kemampuan lokal berjuang mewujudkan desa wisata. Setelah destinasi wisata berjalan dan memperlihatkan hasil positif, baru memikirkan pengembangan agar destinasi wisata semakin banyak diminati wisatawan. Caranya adalah mempresentasikan pengembangan tersebut ke eksekutif maupun legislatif. Harapannya pengembangan yang dilakukan mendapat dukungan kebijakan maupun finansial. Strategi presentasi mengenai *blue print* pengembangan ternyata memperoleh respons. Terbukti instansi percaya terhadap rencana pengembangan desa wisata dapat direalisasikan dengan baik membutuhkan dukungan kebijakan dan finansial. Atas pertimbangan ini, instansi membuat kebijakan sebagai payung legalitas dan memberikan anggaran untuk pembiayaan pengembangan desa wisata. Strategi ini terbukti efektif dengan indikator destinasi yang dikembangkan semakin mendatangkan wisatawan.

“Dengan cara ditangani secara mandiri dapat memberi kemanfaatan lebih banyak untuk masyarakat. Keuntungan dari desa wisata tidak kami nikmati sendiri. Masyarakat bisa mendapatkan banyak kelimpahan rezeki. Sejak membangun desa wisata sudah ada kesepakatan yang jelas untuk bagi hasil antara operator dan masyarakat,” jelas tokoh pemuda yang menjadi penggerak desa wisata Mangunan. Buah dari bagi hasil yang bisa dipetik dari desa wisata diperuntukkan membangun fasilitas infrastruktur sampai wilayah rukun tetangga. “Tidak terbayangkan sebelumnya. Dulu daerah sini minim fasilitas. Sekarang fasilitas umum sudah sangat memadai. Seperti jalan utama sampai gang-gang di dusun dalam

kondisi bagus. Lingkungan juga terlihat bersih,” jelasnya lagi. Selain infrastruktur ternyata desa wisata meningkatkan pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat menjadi lebih baik karena sejak adanya desa wisata memicu layanan *home stay*, industri ekonomi kreatif, dan kuliner tradisional memiliki harga yang tinggi.

Sesuai dengan mimpi dari penggerak desa wisata, kini telah terwujud kekuatan ekonomi yang melebihi dari daerah lain. Kelurahan Mangunan menjadi desa yang makmur. Keberhasilan menjadi daerah yang sejahtera tidak terlepas dari hakikat pengelolaannya berpondasi pada kewirausahaan sosial. Potret keberhasilan ini memberi gambaran mengenai penerapan kewirausahaan sosial mampu menyejahterakan masyarakat.

Bukan hanya terjadi di Mangunan, dari berbagai kajian yang ada menunjukkan bahwa intervensi melalui kewirausahaan sosial berhasil membangkitkan kesejahteraan di daerah lain. Seperti dapat dilihat pada kewirausahaan sosial menjadi program andalan untuk pemberdayaan perempuan. Program pemberdayaan melalui kewirausahaan sosial ternyata berhasil mengentaskan kemiskinan pada komunitas di Kabupaten Semarang (Rusdianti, et al., 2019). Penelitian lain membuktikan bahwa kewirausahaan sosial yang dilaksanakan pada pondok pesantren mampu memberi kesejahteraan bagi perempuan janda, kaum duafa, dan karyawati yang terkena pemutusan hubungan kerja di Surakarta (Prasetyawan & Rohimat, 2019). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan pada badan usaha milik desa menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial terutama dalam hal inovasi berhasil membuat warganya menjadi sejahtera di Kabupaten Buleleng (Utami, et al., 2019). Penelitian berikutnya menemukan ternyata kewirausahaan sosial mampu membantu masyarakat saat mengalami kesulitan ekonomi di era pandemi Covid-19. Kerajinan berbahan benang kur yang dikelola oleh masyarakat mengacu pada kewirausahaan social dan mampu menyejahterakan masyarakat karena menghidupkan kembali usaha menengah, kecil, dan mikro di era pandemi Covid-19. Dinamika kewirausahaan sosial yang digerakkan oleh partisipasi masyarakat memberi manfaat menampung warga yang terkena

pemutusan hubungan kerja di saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto (Susanti, et al., 2022). Tak jauh berbeda dengan penelitian yang memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan kewirausahaan sosial mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat status sosial tuna grahita di wilayah yang termarginalkan secara ekonomi di Kabupaten Ponorogo (Safira & Roseta, 2021).

Karakteristik Wirausahawan Sosial

Berjiwa Prososial

Wirausahawan sosial memberi kontribusi membangun kesejahteraan masyarakat. Keberhasilannya dalam menyejahterakan masyarakat karena di dalamnya ada pribadi yang menggerakkan kewirausahaan sosial memiliki jiwa prososial terutama diwujudkan dalam pemberian bantuan pada pihak lain yang tidak mementingkan diri sendiri dan tindakannya semata-mata bertujuan menumbuhkan kesejahteraan orang lain. Pemahaman mengenai prososial secara spesifik juga dijelaskan sebagai perilaku sukarela membantu orang lain dan tanpa ada pamrih di belakangnya. Aktivitasnya menolong murni untuk tujuan kebaikan, yaitu memakmurkan kehidupan orang lain. Keinginannya untuk membantu karena ada nilai sosial yang diberikan, yaitu memberi kemanfaatan untuk masyarakat (Koehne, et al., 2022; Caviola, et al., 2021; McMullen & Bergman, 2017).

Dinamika psikologis yang bisa menjelaskan seseorang mempunyai jiwa prososial menggerakkan hatinya untuk membangun kewirausahaan sosial karena ada pengaruh dari empati. Proses yang terjadi adalah empati merupakan tanggapan yang lengkap melibatkan dimensi aspek emosi, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan kognitif, yaitu memahami sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Berpondasi pada pengertian ini, individu sebagai wirausahawan sosial karena mampu merasakan orang lain yang mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak akan nyaman. Ketidaknyaman terjadi karena dirinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang memang harus dipenuhi, seperti memperoleh tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan,

dan kesehatan. Bukannya tidak mau berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, dirinya sudah berusaha mencari penghasilan semaksimal mungkin agar kebutuhannya tercukupi. Namun, karena kemampuan sumber daya manusia yang tidak memadai dan terjebak dalam kemiskinan struktural membuat dirinya dalam lingkaran keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Latar belakang ini menjadikan wirausahawan sosial bisa memahami, bila orang itu serba kekurangan akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Maka agar kesejahteraan orang itu menjadi lebih baik, memerlukan bantuan dari wirausahawan sosial agar bisa keluar dari pusaran masalah membelenggu dirinya (Cheng, 2021; Tucker, et al., 2019; Bacq & Alt, 2018).

Mengapa wirausahawan sosial bersedia melakukan kebijakan itu? Jawabannya ada pada teori hipotesis empati-altruisme yang menjelaskan saat individu melihat penderitaan berkembang, muncul perasaan untuk menstimulasi tindakan menolong orang lain. Proses ini bisa terjadi karena perasaan yang ditimbulkan oleh empati berbuah dorongan dalam diri untuk mengurangi penderitaan orang lain tersebut. Meski ada risiko yang ditanggung oleh *social entrepreneur*, yaitu tindakan yang dilakukan penuh dengan hambatan, membutuhkan energi yang berlebih, banyak mengeluarkan donasi secara *private*, dan *benefit* yang diperoleh secara pribadi tidak terlalu besar. Individu itu tahu ada beban berat yang ditanggung oleh seorang *social entrepreneur*. Namun, karena tumbuh empati dalam dirinya tetap bersedia dengan ikhlas menubar kebaikan untuk orang-orang yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara ekonomi, sosial, pendidikan, politik, maupun kultural (Batson, 2017).

Selain empati yang memberi kontribusi terhadap berkembangnya altruisme bagi wirausahawan sosial untuk membantu orang lain dan komunitasnya adalah adanya norma sosial. Seperti tampak saat menolong orang lain, tidak memperoleh kemanfaatan maksimal bagi dirinya dalam mengelola usaha, tetapi dirinya tetap menginginkan bahwa sumber daya yang dimilikinya memberi keberkahan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kehendak ini bisa berkembang

dalam dirinya karena hadir norma sosial yang merupakan bagian dari pemenuhan terhadap harapan masyarakat.

“

Selain empati yang memberi kontribusi terhadap berkembangnya altruisme bagi wirausahawan sosial untuk membantu orang lain dan komunitasnya adalah adanya norma sosial.

Dalam rangka untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut berkembang norma tanggung jawab sosial yang berwujud individu perlu memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa harus diminta terlebih dahulu dan tidak terlalu memikirkan imbal balik yang diterima atas kebaikan yang diberikan pada orang lain. Motivasi ini yang mendorong *social entrepreneur* memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan agar kehidupannya menjadi lebih sejahtera (Bykov, 2017; Hockerts, 2015).

Masih membahas tentang *social entrepreneur* memiliki kemampuan dalam memakmurkan masyarakat karena memiliki unsur *big-five personalty traits*. Konsep ini merupakan bagian dari kajian kepemimpinan yang menekankan pada sifat-sifat kepribadian yang dimiliki oleh seorang individu. Seperti yang dijelaskan dalam *big-five personalty traits* bahwa pemimpin memerlukan karakteristik kepribadian tertentu agar berhasil mengemban amanah, tugas, dan tanggung jawab yang dibebankan padanya. Karakteristik kepribadian yang melekat pada dirinya mengandung sifat-sifat berikut.

Pertama, openness to experience. Sifat kepribadian yang memiliki kemampuan terbuka dalam hal pengalaman cenderung memiliki dorongan rasa ingin tahu tinggi untuk mengkreasi ide baru, menggunakan imajinasi dan kreativitas untuk melahirkan karya yang bermanfaat. Sifat kepribadian terbuka pada pengalaman baru ini

bermanfaat bagi seorang *social entrepreneur* karena pengelolaan kewirausahaan sosial membutuhkan pribadi untuk terus belajar agar menemukan hal-hal baru agar usaha yang dijalankannya memberi keberkahan bagi orang lain. Kesediaan belajar demi menuntaskan rasa ingin tahu juga berfungsi menciptakan ide-ide segar sehingga usaha yang dijalankannya spesifik mengusung kewirausahaan sosial mempunyai produk unggulan yang banyak diminati oleh masyarakat. Sifat mengenai keterbukaan pengalaman baru yang membuat dirinya sanggup untuk terus menumbuhkan rasa ingin tahu yang berdampak pada kehendak untuk belajar secara-terus menerus sehingga memberi manfaat positif untuk menumbuhkan kreativitas dan ide-ide alternatif sebagai jalan keluar memecahkan problem yang terjadi di masyarakat karena sejatinya *social entrepreneur* adalah seorang inovator.

Kedua, extraversion, yang ditandai oleh ciri kepribadian menyukai tantangan, aktif, menghadapi berbagai pengalaman dengan positif, emosi stabil, dan antusias tinggi. Sifat kepribadian seperti ini memberi kontribusi untuk mengarahkan pada pilihan karier yang lebih baik. *Extraversion* memberi arah terhadap pengambilan keputusan pemilihan karier yang tepat karena memiliki sifat dalam dirinya yang cenderung ramah, ceria, asertif, aktif dan senang berkomunikasi dengan orang lain. Sifat kepribadian seperti ini yang memberi kontribusi bagi *soft skills* seseorang yang memiliki minat untuk mengembangkan kewirausahaan sosial.

Ketiga, agreeableness mengacu pada kasih sayang, empati, dan kehangatan individu. Manfaat yang bisa dipetik dari sifat kepribadian ini adalah menumbuhkan kepercayaan orang lain, menaruh perhatian tinggi dan sebagai sosok yang pemaaf. Seseorang yang mempunyai *agreeableness* menjadi aspek penting untuk mengembangkan *social entrepreneurship* karena saat berkolaborasi dapat dipercaya oleh *stakeholders*. Selain hal tersebut, karakteristik kepribadian *agreeableness* yang berpotensi membangun *social entrepreneurship* karena di dalam dirinya ada dorongan memperhatikan dan empati pada orang lain. Pondasi sifat kepribadian tersebut yang membuat seseorang mempunyai visi sosial untuk

membangkitkan nilai kebaikan memecahkan problem di masyarakat. Dalam mengimplementasikan visi sosial bisa saja banyak kendala yang ditemui, yaitu ada konflik karena berbenturan dengan kepentingan pihak lain. Namun, bagi seseorang yang memiliki *agreeableness* tidak gampang putus asa, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menaruh dendam. Sebaliknya orang tersebut berjiwa besar untuk memaafkan kepada pihak-pihak yang berseteru dengannya, Kesediaan secara tulus memberi maaf ini menjadi modal penting mencari pemecahan masalah untuk kemaslahatan demi tercapainya tujuan mulia membangun kewirausahaan sosial agar kesejahteraan masyarakat bisa dinikmati secara bersama-sama dalam suatu masyarakat.

Keempat, conscientiousness, melibatkan sifat seperti kemampuan mengorganisasi, ulet, tangguh, cermat, dan tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Modal kepribadian ini merupakan variabel penting dalam mengelola usaha kewirausahaan sosial. Keberhasilan dalam menjalankan kewirausahaan sosial tergantung pada kemampuan mengorganisasi secara internal yang terdiri dari para penggiat yang menggerakkan kewirausahaan sosial pada suatu komunitas tertentu. Selain mengoordinasi secara internal, memerlukan pelibatan dan dukungan sosial dari masyarakat pada komunitas. Pelibatan dan dukungan sosial masyarakat tidak cukup. Pengalaman menunjukkan kewirausahaan sosial bisa berkembang dengan baik apabila mengikutsertakan *stakeholders* lebih luas seperti pemegang kebijakan, lembaga swasta, maupun lembaga pendidikan. Kewirausahaan sosial membutuhkan kemampuan manajerial, baik dalam lingkup internal, kelompok masyarakat sekitar, maupun lembaga sekitar tentu tidak mudah dalam pelaksanaannya. Membutuhkan tantangan yang besar dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak-pihak karena memiliki latar belakang secara budaya, pendidikan, keyakinan, ekonomi, dan pandangan politik berbeda-beda. Berdasarkan pertimbangan ini maka wirausahawan sosial memerlukan kepribadian yang tangguh, ulet, cermat, dan tepat dalam mengambil keputusan maupun tindakan agar segala hambatan

yang menghadang dalam mengoordinasi berbagai pemangku kepentingan dapat diatasi dengan baik.

Kelima, neuroticism, berkaitan dengan kestabilan emosi yang ditunjukkan oleh sifat tenang saat menghadapi situasi yang menekan dan penuh stres, menunjukkan harga diri yang tinggi dan menjaga suasana hati dalam situasi nyaman. Kestabilan emosi memang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kewirausahaan sosial yang bertujuan untuk mengatasi berbagai problem yang sedang dialami oleh komunitas. Tentu saja saat berproses memecahkan masalah banyak tantangan yang datang dari pihak internal maupun eksternal. Tantangan ini bisa berwujud ancaman, perlawanan, hinaan, dan ketidakpercayaan dari pihak lain tersebut ketika mengelola kewirausahaan sosial. Situasi ini dapat menjadikan seseorang merasa tertekan dan mengalami stres. Oleh karena itu, seseorang yang mengurus kewirausahaan sosial memerlukan kestabilan emosi yang baik agar tetap tenang, mampu mempertahankan harga diri, dan tetap dalam suasana hati yang nyaman meski banyak tekanan yang menghampirinya dari pihak lain sebagai konsekuensi telah memilih kewirausahaan sebagai pilihan dalam menjalani karier (Luc, 2022; Hossain, et al., 2021; Liu, et al., 2021; İrengün & Arıkboğa 2015).

Variabel lain yang menjadi penanda karakteristik wirausahawan sosial adalah tergantung pada motivasinya (Collavo, 2022). Motivasi dari seseorang tergerak hatinya untuk memilih karier sebagai seorang wirausahawan sosial karena mengalami atau melihat secara langsung mengenai berbagai masalah yang menerpa di lingkungan sekitarnya. Keinginannya menyelesaikan persoalan yang terjadi di lingkungan didorong oleh cita-cita memperjuangkan kebenaran dan merealisasikan keyakinan di dalam dirinya yang kuat untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut bisa dijalani oleh wirausahawan sosial dilandasi oleh sikap politik bahwa ada strategi, cara, dan pendekatan baru yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah sosial dibandingkan dengan aktivitas yang sudah dikerjakan sebelumnya.

Secara khusus aspek yang menunjukkan adanya motivasi seseorang untuk menekuni kewirausahaan sosial, terdiri dari *pertama*, altruisme membela kepentingan dan mewujudkan kesejahteraan bagi orang lain tanpa pamrih. Altruisme terkait dengan kewirausahaan sosial memiliki dua unsur, yaitu *pure altruism* merupakan bentuk ideal altruisme yang sulit untuk dicapai oleh individu dan *relative altruism* merupakan altruisme bertujuan untuk memperoleh kepuasan secara pribadi. *Kedua*, *community engagement*, dapat dijelaskan sebagai keterlibatan untuk melaksanakan tugas yang dilaksanakan masyarakat sipil sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keprihatinan yang ditunjukkan melalui kerja nyata untuk memecahkan problem sehingga menjadikan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. *Ketiga*, *generosity*, berupa kemurahan hati untuk menyediakan waktu lebih banyak melakukan aktivitas pekerjaan yang memberi kemanfaatan lebih banyak orang. Aktivitas yang dijalani menghasilkan *benefit* yang diperoleh bukan hanya mengejar keuntungan secara pribadi. Namun, ada tujuan lain, yaitu usaha yang dijalankannya lebih banyak memberi keuntungan bagi banyak orang di sekitarnya atau untuk masyarakat lebih luas. *Keempat*, *compassion* dan *simpaty* yang mengandung nilai inti memberi pelayanan dan kepedulian kepada orang lain yang diwujudkan dalam bentuk semangat berbagi dan dukungan sosial atas dasar kemanusiaan yang berpondasi pada religiositas. *Kelima*, *serious leisure*, merupakan pilihan karier yang menarik secara pribadi dan mewujudkan karier tersebut dilakukan secara mandiri yang memberi imbalan berupa kepuasan batin lebih besar dibanding dengan sebatas keuntungan materi saja. *Keenam*, *a strong sense of commitment* yang diimplementasikan dalam tindakan, yaitu keinginan yang kuat untuk merealisasikan gagasannya meski harus banyak mengalokasikan waktu, mengeluarkan segala energi, mengeluarkan sumber dana secara pribadi, lebih banyak mengerahkan kemampuan personal yang dimilikinya dan mencurahkan pengetahuan untuk merintis usaha *social entrepreneurship*. *Ketujuh*, *sense of moral obligation* dengan mempunyai pondasi religius yang kokoh untuk mengikhtiarkan keadilan bagi masyarakat. Unsur

berikutnya yang menjadi bagian penting untuk membangkitkan motivasi pada wirausahawan sosial adalah berikut.

Pertama, determination merupakan karakteristik kepribadian yang diwujudkan pada sikap dan mental melalui komitmen yang amat kuat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Meski ada hambatan dan rintangan yang menghadang dirinya tetap melaju terus. Wirausahawan sosial berusaha untuk menyelesaikan berbagai kesulitan yang menerpa tersebut. *Determination* ini perlu dimiliki oleh wirausahawan sosial karena bermanfaat untuk terus konsisten dalam merintis, mengembangkan, menjalankan, dan tak akan berhenti sebelum mencapai keberhasilan dalam mengelola kewirausahaan sosial. Berkaitan dengan *determination* ini bahwa ada pengalaman yang datang dari membangun ekowisata Hutan Pinus Mangunan.

Pengalaman ini bersumber dari cerita tokoh sentral yang menjadi pelopor mengembangkan kawasan hutan pinus menjadi destinasi wisata. Tokoh sentral mengawali kegiatannya membangun hutan pinus dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Warga yang dilibatkan untuk bekerja mewujudkan hutan pinus sebagai wahana ekowisata adalah para penyadap dan penebang pohon pinus yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Agar warga tersebut tidak lagi melakukan tindakan yang mengancam kelestarian hutan pinus, maka diberikan alternatif sumber penghasilan ikut terlibat merintis pendirian ekowisata hutan pinus. Sementara waktu untuk penganggaran membiayai akomodasi warga yang bekerja menata hutan pinus sebagai area ekowisata menarik dana dari penitipan kendaraan yang mengunjungi hutan pinus.

Ketiadaan payung hukum meminta biaya parkir di kawasan hutan pinus dianggap sebagai pungutan liar. Ada salah satu lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan tokoh sentral ke pihak berwajib. Aparat keamanan menindaklanjuti laporan dengan memeriksa tokoh sentral. Atas tindakan memungut biaya parkir memperoleh ancaman hukuman penjara. Namun, ancaman masuk bui tidak menyurutkan tekadnya untuk membangun hutan pinus

sebagai wilayah kunjungan ekowisata. Tokoh sentral tetap memiliki komitmen tinggi merealisasikan gagasannya membangun ekowisata hutan pinus. Tekanan dari pihak luar yang berupaya mengantarkan dirinya dalam kasus hukum tidak menyurutkan nyali untuk terus maju. Tokoh sentral berusaha melewati hambatan dan rintangan. Tokoh sentral berupaya menyelesaikan berbagai masalah yang menghadangnya. Berkah dari komitmennya mengembangkan ekowisata hutan pinus membuahkan hasil. Kini Hutan Pinus Mangunan menjadi ekowisata yang menarik minat wisatawan lokal maupun nasional. Keberhasilan mengelola hutan pinus memiliki kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Suyono, 2022).

Kedua, passion dan dedication. *Passion* merupakan dinamika psikologis yang ada di dalam diri seseorang yang memuat unsur semangat, antusiasme, gairah, keyakinan, dan tekad yang kuat saat untuk mencapai tujuan tertentu. Modal *passion* ini membuat wirausahawan sosial merasa senang, tanpa beban, dan ringan mengerjakan sesuatu hal meskipun sejatinya merupakan pekerjaan yang membutuhkan energi besar untuk menyelesaikannya. Buah yang bisa dipetik dari menyelesaikan pekerjaan tersebut berupa kepuasan batin sehingga saat *reward* yang diterimanya tidak sebanding dengan energi yang dikeluarkan dirinya, tetap melakukan sepenuh hati dengan mengupayakan hasil terbaik. Hal ini karena wirausahawan sosial sudah bahagia berhasil menyelesaikan pekerjaan yang dilakoninya. Selanjutnya mengenai *dedication* pada wirausahawan sosial dapat dimaknai sebagai sumbangsih pemikiran, sumber daya, dan lebih banyak waktu yang digunakan dalam mengelola usaha. Bahwa *benefit* yang diperoleh bukan sekadar untuk kepentingan pribadi, tetapi lebih banyak memberi berkah karena mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi, usaha yang dijalani dan diniati sebagai pengabdian dengan dilandasi keyakinan membaja untuk mewujudkan cita-cita luhur mengenai kegiatan usaha yang dijalannya turut menjaga harkat dan martabat kemanusiaan.

Realitas membuktikan *passion* dan *dedication* mampu menjadi kekuatan psikologis bagi wirausahawan sosial untuk mewujudkan program desa wisata. Hal ini didasarkan pengalaman dari tokoh sentral, yaitu ada kebahagiaan dan kepuasan batin tersendiri saat kerja kerasnya membangun desa wisata membuahkan hasil. Desa wisata yang dirintisnya ternyata bisa mengubah yang dulunya sebagai desa termarginalkan hingga berkembang menjadi besar. Kini merupakan desa yang maju dibuktikan dengan tingkat ekonomi masyarakat yang relatif lebih baik, fasilitas infrastruktur memadai, dan desanya lebih berkembang dibanding dengan desa lain, bukan hanya tingkat lokal, melainkan tingkat nasional. Terbukti tidak sedikit perangkat desa dari berbagai daerah melakukan studi banding untuk belajar mengenai kesuksesan membuat program desa wisata yang memakmurkan masyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan itu didukung oleh semangat, gairah, dan tekad kuat demi meraih tujuan menjadikan desa itu menjadi desa wisata yang mampu menyejahterakan rakyat. Semangat, gairah, dan tekad yang kuat menimbulkan dorongan untuk bekerja keras dengan kerelaanya berkorban secara personal, mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya, dan memberikan lebih banyak sumber daya untuk menggapai keinginan membangun desa wisata yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kinerja yang dilakukan ini tidak menjadi beban, tetapi setiap langkah melaksanakan program membangun desa wisata dilakukan dengan senang hati sehingga pekerjaan berat terasa ringan. Proses ini yang mengarahkan bekerja membangun desa wisata merupakan suatu bentuk pengabdian untuk memajukan desanya (Suyono, 2022).

Ketiga, confidence dan *self belief* yang bisa dimaknai sebagai wirausahawan sosial memiliki kepercayaan diri karena adanya keyakinan mampu merealisasikan tujuan yang diinginkannya. Kepercayaan diri tersebut tumbuh karena distimulasi oleh kesadaran mengenai keterampilan yang dimilikinya cukup memadai untuk melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Tugas ini dapat dikerjakan dengan baik dilandasi oleh seseorang yang memiliki keyakinan diri ditandai dengan karakteristik pribadi, yaitu

bisa melaksanakan beban pekerjaan dengan maksimal, optimis menyelesaikan pekerjaan dengan baik, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, dan berusaha mengerjakan tugas secara mandiri sehingga tidak bergantung kepada orang lain. *Confidence* dan *self belief* ini menjadi bekal utama kemampuan *soft skills* bagi wirausahawan sosial mencapai keberhasilan dalam menjalankan programnya yang mampu memberi kemanfaatan bagi orang lain. Kajian menunjukkan bahwa *self confidence* memberi kontribusi penting bagi intensi berwirausaha (Gelaidan & Abdullateef, 2017) dan *self confidence* terbukti memperkuat orientasi berwirausaha dan meminimalisasi takut gagal dalam menjalankan tugasnya (Martins, 2018).

“

Semangat, gairah, dan tekad yang kuat menimbulkan dorongan untuk bekerja keras dengan kerelaanya berkorban secara personal, mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya, dan memberikan lebih banyak sumber daya untuk menggapai keinginan membangun desa wisata yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Keempat, tetap merasa nyaman dengan ketidakpastian dan situasi penuh dengan risiko. Keterampilan psikologis ini perlu dimiliki oleh wirausahawan sosial karena usaha yang dijalankan tidak dilaksanakan sendiri, tetapi melibatkan banyak orang. Ketika dalam proses pelaksanaannya mengikutsertakan individu lain yang berbeda latar belakang, keinginan, kehendak, dan sifat pribadi yang berbeda-beda, tentu tidak akan mudah mengendalikannya. Latar belakang tersebut menjadikan wirausahawan sosial siap dengan berbagai masalah yang ada. Masalah sekarang bisa berbeda dengan

masalah kemarin atau esok. Suasananya penuh dengan ketidakpastian dan penuh risiko. Oleh karena itu, seorang wirausahawan sosial perlu memiliki keterampilan tetap mampu menjaga suasana hati dalam keadaan stabil sehingga apa pun masalah yang menimpa setiap saat dapat dihadapi dengan tenang. Kondisi psikologis ini semakin menguatkan pribadinya untuk menyelesaikan masalah yang bisa diterima oleh banyak pihak yang bekerja sama dengan dirinya untuk mengorganisasi usaha menggunakan pendekatan kewirausahaan sosial. Pemahaman ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa keterampilan psikologis individu tetap berada dalam suasana hati stabil meski mengerjakan suatu aktivitas yang berada pada ketidakpastian dan penuh risiko, mendukung keberhasilan wirausahawan sosial (Dwivedi & Weerawardena, 2018), dan individu melewati masa sulit selama pandemi Covid-19 dalam mengelola kewirausahaan sosial karena bisa menjaga diri tetap tenang dan berpikir jernih untuk mengambil tindakan bertujuan menyelesaikan masalah dalam situasi ketidakpastian (Weaver, 2020).

Kelima, independence dapat dipahami sebagai suatu situasi yang memperhatikan seseorang sebagai pribadi mandiri yang tidak tergantung pada pihak lain. Penerapannya dapat berupa sikap tidak mudah goyah. Keputusan-keputusan yang diambil dari buah pemikirannya yang original untuk melakukan tindakan berintegritas, dilandasi objektivitas, dan berdasarkan profesionalisme. Wirausahawan sosial memiliki *independece* ini cenderung melakukan pekerjaan dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, mempunyai sumber daya memadai, fokus melaksanakan tugas, dan teguh pendirian untuk mencapai tujuan. Kajian ilmiah memperkuat adanya *independence* pada diri individu dapat menunjang keberhasilan dalam melaksanakan usaha yang berpedoman pada prinsip kewirausahaan sosial (Bacq, et al., 2020; Chou, 2018; Yunis, et al., 2020).

Keenam, proactivity perlu dilakukan oleh *social entrepreneur* karena gagasan dalam mendirikan kewirausahaan sosial tidak dikerjakan sendirian, tetapi dikerjakan secara kolektif yang menyertakan banyak *stakeholder*. Realitas ini menjadikan

keberhasilan dalam mengatur kewirausahaan sosial tergantung pada partisipasi masyarakat, membutuhkan dukungan social, dan merajut modal sosial. Aspek dari partisipasi masyarakat, dukungan social, dan modal sosial bisa terlaksana apabila *social entrepreneur* proaktif menyosialisasikan gagasan mengenai arti penting dari kewirausahaan sosial. Langkah ini berfungsi menggerakkan berbagai komunitas untuk terlibat dalam jejaring pelaksanaan program kewirausahaan sosial. Gerakan berbagai komunitas bisa berjalan karena adanya partisipasi masyarakat dan dukungan sosial yang menjadi modal sosial untuk menyukseskan kewirausahaan sosial (Tu, et al., 2021; Ianniello, et al., 2019; Lang & Fink, 2019; Hockerts, 2018).

Selanjutnya dapat dijelaskan dalam mengelola *social entrepreneurship* memerlukan keterampilan manajerial spesifik agar kewirausahaan sosial bisa tumbuh dan berkembang dengan baik yang kehadirannya memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Keterampilan manajerial perlu dikuasai karena menuntun wirausahawan sosial mempunyai kemampuan seperti menggerakkan manajemen, penyediaan anggaran, pemanfaatan sumber daya, menggunakan strategi secara tepat, kemampuan membangun komunikasi, membangun jejaring dengan pihak eksternal, perencanaan yang baik, keahlian dalam mengorganisasi, kompetensi memeriksa keluaran, dan mengoordinasi orang-orang yang terlibat dalam menjalankan kewirausahaan sosial. Keterampilan lain yang dibutuhkan dalam mengemudikan kewirausahaan sosial adalah kemampuan mengkreasi hal yang berbeda dari sebelumnya. Caranya dengan melakukan inovasi menghasilkan suatu produk baru atau bisa mereproduksi bahan yang sudah ada menjadi sesuatu model baru yang lebih baik.

Keterampilan berikutnya yang tak kalah penting, yaitu mencukupi kebutuhan sumber daya dan finansial dengan efektif, cakap mempersuasi orang, dan memperoleh dukungan. Hal ini dapat dilaksanakan tergantung kepada efektivitas komunikasi, akuntabilitas bersumber pada pengukuran dan pelaporan, membangun kepercayaan, serta memperluas relasi. Keterampilan tersebut akan

lebih lengkap apabila profil wirausahawan sosial mengungkapkan gagasan baru yang diwujudkan dalam visi untuk membimbing dan membangkitkan orang lain agar mengikutinya. Berani memperbaiki dan mengevaluasi keberadaan *status quo* dengan efektif dan bertanggung jawab serta melemahkan resistansi menggunakan gagasan alternatif sehingga mampu memperbaiki kebiasaan yang dapat menjadi hambatan untuk merealisasikan kewirausahaan sosial. Agar berbagai dimensi yang diperlukan dalam memangku kewirausahaan sosial tersebut bisa terlaksana dengan sukses memerlukan keterpaduan antara peran, sifat kepribadian, dan keterampilan yang tersaji pada tabel di bawah ini (Collavo, 2022).

Tabel 2.1 Peran, Sifat Kepribadian, dan Keterampilan *Social Entrepreneur*

Peran	Sifat Pribadi	Keterampilan
Menerjemahkan ide pada sesuatu yang konkret	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Determinasi ▪ <i>Passion</i> & dedikasi ▪ Kepercayaan & keyakinan diri ▪ Nyaman dengan ketidak-pastian & risiko ▪ Independen ▪ Proaktif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemampuan mempersuasi orang lain ▪ Kemampuan menerima umpan balik dan mengatasi kegagalan ▪ Kemampuan mengenali peluang dan kebutuhan ▪ Keterampilan manajerial ▪ Adaptasi dengan pendekatan inovasi ▪ Mendesain sesuatu yang baru berdasarkan model yang sudah ada sebelumnya. ▪ Penggalangan dana
Sumber daya yang potensial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Determinasi ▪ Kesabaran ▪ Proaktif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemampuan mempersuasi orang ▪ Kemampuan menerima umpan balik dan mengatasi kegagalan ▪ Kemampuan mengajak orang berperan serta & memobilisasi orang lain ▪ Kemampuan membangun jejaring kerja ▪ Kemampuan <i>storytelling</i> & komunikasi ▪ Membangun kepercayaan
Legitimasi ide baru, aktivitas atau organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Determinasi ▪ <i>Passion</i> & dedikasi ▪ Nyaman dengan risiko 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan visi ▪ Keterampilan komunikasi & <i>storytelling</i> ▪ Membangun aliansi ▪ Mendorong perubahan dari <i>status quo</i> ▪ Menciptakan dampak sosial

Melakukan Inovasi Sosial dan Melahirkan Perubahan Sosial

Melakukan Inovasi Sosial

Inovasi sosial mengandung pengertian sebagai pemberdayaan dengan cara-cara efektif sehingga memberi solusi terhadap berbagai masalah di lingkungan masyarakat. Bersumber dari pengertian ini, aktualisasi dari inovasi sosial dapat digerakkan oleh individu yang memiliki sumber daya unggul dan tertanam dalam dirinya, berupa karakteristik kepribadian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seseorang perlu memenuhi syarat sebagai pribadi yang memiliki karakteristik sebagai wirausahawan sosial berdasarkan pertimbangan melakukan inovasi sosial dan membutuhkan sosok yang memiliki dinamika psikologis di dalam dirinya, seperti berjiwa prososial yang altruistik dan motivasi yang kuat.

Inovasi sosial membutuhkan karakteristik kepribadian wirausahawan sosial karena memiliki dua fokus utama, yaitu fokus pada keluaran dan fokus pada proses. Memahami pengertian inovasi sosial yang perhatian utamanya pada keluaran dapat dijelaskan sebagai suatu solusi baru memecahkan masalah. Solusi baru tersebut ternyata bisa menciptakan nilai tambah menyelesaikan problem, bukan hanya berada pada ranah individu, melainkan bisa menuntaskan problem lebih luas, yaitu masyarakat. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut memerlukan perhatian spesifik pada proses menekankan aktivitas dan pelayanan inovatif yang didorong oleh tujuan memenuhi kebutuhan sosial. Dua hal mengenai fokus utama inovasi sosial tersebut dapat terlaksana apabila individu

memiliki kemampuan dalam memadukan antara peran, sifat kepribadian, dan keterampilan terutama berkaitan dengan *soft skills* dan *hard skills* yang dibutuhkan untuk mengelola kewirausahaan sosial (Collavo, 2022).

“

Seseorang perlu memenuhi syarat sebagai pribadi yang memiliki karakteristik sebagai wirausahawan sosial berdasarkan pertimbangan melakukan inovasi sosial dan membutuhkan sosok yang memiliki dinamika psikologis di dalam dirinya, seperti berjiwa prososial yang altruistik dan motivasi yang kuat.

Indikator yang dapat dijadikan tolok ukur wirausahawan sosial berhasil melakukan inovasi sosial dapat dinilai oleh elemen inti sebagai berikut (Portales, 2019). *Pertama*, individu mampu mengerjakan sesuatu hal yang mampu memenuhi kebutuhan sosial. Hal ini terlaksana dengan baik apabila berkembang kesadaran bahwa aktivitas yang dilakukan memiliki pondasi misi yang jelas dan bertujuan memecahkan masalah dengan cara bermartabat sehingga memperoleh *benefit* yang dinikmati oleh komunitas.

Kedua, menciptakan kebaruan memberikan solusi dengan menghasilkan kekhasan dari inovasi. Cara melakukannya adalah menciptakan sesuatu hal yang sama sekali baru, memperbarui secara menyeluruh atau mengevaluasi sesuatu yang telah ada sebelumnya untuk melahirkan karya baru yang lebih inovatif. Hasil dari cara ini dapat dikategorikan sebagai sesuatu hal baru yang berguna memperbaiki kondisi sekarang dan bermanfaat bagi kualitas hidup masa akan datang.

Ketiga, mengkreasi karya secara konkret. Elemen ini ditandai dengan operasional secara konkret dari karya yang dihasilkan bersumber pada gagasan orisinal. Strategi merealisasikan gagasan dengan melakukan tindakan pembaharuan produk, pelayanan, model, dan pemasarannya.

Keempat, efisiensi dan partisipatif. Inovasi sosial bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, melainkan lebih dari itu perlu melakukan efisiensi, yaitu tidak terlalu banyak mengeluarkan sumber daya dengan menghasilkan keluaran maksimal. Efisiensi ini terkait dengan pengelolaan sumber daya sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan, lingkungan, dan sumber daya lain yang dibutuhkan dalam melakukan inovasi sosial. Selain efisiensi, hal lain yang memerlukan perhatian adalah pelaksanaannya melibatkan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat seperti menemukan masalah, mencari solusi, menjalankan program sampai tahapan evaluasi. Proses tersebut berfungsi sebagai inovasi sosial yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kelima, kapasitas yang diperlukan dalam melakukan inovasi sosial berupa sumber daya untuk menjalankan sistem dengan melakukan jalinan hubungan antarmasyarakat yang kuat untuk memenuhi kebutuhan mempersiapkan masa depan lebih baik. Inovasi sosial tersebut dapat terlaksana apabila membuat perubahan persepsi, sikap, perilaku, praktik kehidupan sosial, kelembagaan, dan sistem baru memungkinkan terjadinya transformasi masyarakat dalam jangka waktu panjang.

Acuan yang bisa menandai terlaksananya proses inovasi sosial membedakan dari inovasi lainnya yang dilakukan oleh wirausahawan sosial terdiri dari delapan unsur, sebagai berikut.

Pertama, intersektoral. Inovasi sosial mencakup semua bidang kehidupan dengan melibatkan seluruh sektor yang ada di masyarakat. Antarsektor tersebut melakukan kerja sama dengan memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan inovasi sosial.

Kedua, terbuka dan kolaborasi. Inovasi sosial memegang prinsip keterbukaan, yaitu berusaha melibatkan aktor dari berbagai latar belakang profesi, keterampilan, dan pengalaman untuk melaksanakan program. Para aktor yang memberi kontribusi dalam inovasi sosial lebih banyak lebih baik. Pertimbangannya adalah semakin banyak aktor yang terlibat akan semakin banyak pula ide-ide baru yang dikumpulkan untuk menemukan solusi sebagai strategi memecahkan masalah dalam konteks inovasi sosial.

Ketiga, bottom-up. Proses pemberdayaan yang dilakukan dalam inovasi sosial adalah menggali gagasan arus bawah untuk menemukan kebutuhan yang memang benar-benar diinginkan oleh penerima manfaat. Bukan hanya melakukan penggalan gagasan, melainkan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan menempatkan arus bawah menjadi bagian penting memberikan solusi efektif mencapai tujuan. Arus bawah diposisikan sebagai mitra. Dirinya tidak menjadi objek sasaran pemberdayaan karena proses ini bermanfaat menjaga keberlangsungan inovasi sosial yang membutuhkan waktu lama.

Keempat, tanggung jawab bersama antara produsen dan konsumen. Inovasi sosial mensyaratkan adanya tanggung jawab bersama antara penghasil dan pengguna dari produk yang dihasilkannya. Implementasinya adalah antara produsen dan konsumen secara bersama-sama serta saling kerja sama menemukan solusi untuk pemeliharaan produksi yang bertahan lama dan berkelanjutan.

Kelima, mutualisme. Antarpihak yang terlibat memerlukan kesadaran saling memberi dan menerima dalam proses inovasi sosial sehingga menumbuhkan kesejahteraan psikologis secara pribadi maupun kolektif dalam komunitas.

Keenam, menciptakan peran baru dan menjalin hubungan. Keberhasilan dalam melakukan inovasi sosial tergantung dari sejauh mana memberikan peran pada para aktor, lembaga, maupun berbagai komunitas yang ada di masyarakat. Amanah peran yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya dapat terlaksana dengan

baik tergantung dari keterikatan hubungan yang terjalin dengan erat dan mengutamakan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan kemaslahatan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Ketujuh, menggunakan aset dan sumber daya terbaik. Pemanfaatan aset dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem sehingga terhindar dari kerusakan alam. Lingkungan yang tersedia seharusnya memberikan kesejahteraan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Kedelapan, mengembangkan aset dan kapabilitas. Tidak hanya memanfaatkan alam yang tersedia untuk memenuhi kesejahteraan. Namun, mencari alternatif aset yang bisa digunakan sebagai bahan yang bisa dikelola oleh masyarakat agar menjadi lebih sejahtera. Caranya adalah melakukan pemberdayaan yang memusatkan perhatiannya pada peningkatan kapabilitas masyarakat sehingga mampu menemukan sumber daya yang terbarukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut.

Kajian Ilmiah Kewirausahaan Sosial dan Inovasi Sosial

Dalam kajian ilmiah menegaskan kewirausahaan sosial merupakan bagian penting untuk memberikan sumbangan yang berarti bagi terbentuknya inovasi sosial (Grilo & Moreira, 2022; Philips, et al., 2015). Kajian ilmiah ini dibuktikan oleh penelitian mengenai inovasi sosial menggunakan intervensi kewirausahaan sosial ternyata mampu menghasilkan pembaharuan sistem merupakan revitalisasi dari pola lama yang memperkuat respons dan memberikan solusi sebagai jalan keluar dari problem pandemi Covid-19 mengambil kasus di Cina (Crupi, et al., 2022), mengangkat masyarakat yang termarginalkan di wilayah pedesaan di Eropa (Fink, et al., 2017), membantu komunitas mencapai kualitas hidup lebih baik di Kolombia dengan menggunakan modal sosial di daerah rawan konflik (Naranjo-Valencia, 2022), dan meningkatkan sumber daya

manusia terutama anak-anak di Yayasan Al-Barokah Indonesia (Wibowo, et al., 2021).

Selanjutnya inovasi sosial menggunakan aspek utama kewirausahaan sosial dalam pemberdayaannya dapat melahirkan perubahan sosial (Luke & Chu, 2013). Melalui pemberdayaan dengan menerapkan model usaha kewirausahaan sosial ternyata mampu membangun masyarakat dari situasi yang memiliki tingkat kekerasan tinggi menjadi masyarakat damai dan masyarakat berada pada garis kemiskinan menjadi masyarakat sejahtera (Rispa & Servantie, 2017). Perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari menjalankan kewirausahaan sosial yang mampu memecahkan berbagai problem sosial yang berkembang di masyarakat (Auvinet & Lloret, 2015). Bersumber dari pemahaman ini dapat digunakan sebagai pondasi untuk menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial memiliki arti penting bagi kemajuan bangsa ini. Realitas menunjukkan bahwa Indonesia masih dihadapkan berbagai problem disintegrasi yang diwarnai adanya beragam konflik, kemiskinan yang jumlahnya besar, dan masalah sosial yang terus berlangsung secara masif. Menyaksikan kenyataan seperti ini bahwa kewirausahaan sosial dapat menjadi terapi mujarab melakukan perubahan sosial yang bertujuan mengupayakan suatu kondisi masyarakat yang damai, sejahtera, dan tentram. Hal ini didasarkan pada berbagai studi yang membuktikan kewirausahaan sosial memberi manfaat untuk resolusi konflik, menurunkan jumlah kemiskinan, dan mengatasi masalah sosial (Dutta, 2019; Sserwanga, et al., 2014; Coffie, 2013).

Melahirkan Perubahan Sosial

Secara konseptual dapat dijabarkan lebih jauh mengenai kewirausahaan sosial memiliki peran penting dalam melakukan perubahan sosial. Kewirausahaan sosial memandang perubahan sosial sebagai transformasi sistematis pada pola pikir, perilaku, hubungan sosial, institusi, dan struktur sosial. Pelaksanaannya menggunakan metode pemberdayaan memfokuskan pada partisipasi dari bawah atau masyarakat. Pendekatan pemberdayaan ini

melibatkan pengembangan sosial dengan distimulasi oleh faktor motivasi dari dalam diri, bergerak mulai dari internal, kearifan lokal atau sistem berjalan mengikuti autodinamik (Praszkie & Nowak, 2012). Ada beberapa pandangan teori perubahan sosial perpesktif kewirausahaan sosial, sebagai berikut.

Pertama, teori Yunani kuno dan saat ini. Teori tersebut menjelaskan wirausahawan sosial memosisikan diri memberi penguatan untuk memahami, mempersiapkan, keberlangsungan dan mengelola perubahan. Agar perubahan dapat berjalan, seorang wirausahawan sosial memerlukan visi kokoh sebagai landasan mengatasi keterbatasan dan menyesuaikan kondisi terkini sehingga berhasil mencatat sejarah baru bagi kehidupan. Agar sejarah baru yang diciptakan memberi kemaslahatan, ada dua elemen mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu perubahan dan stabilitas. Pelaksanaannya adalah wirausahawan sosial perlu melakukan konsolidasi dan menjaga harmoni mengupayakan keberlangsungan perubahan secara damai. Hasilnya berupa perubahan yang terjadi berada dalam situasi stabil karena didasari oleh visi kuat.

“

***Seorang wirausahawan sosial
memerlukan visi kokoh sebagai landasan
mengatasi keterbatasan dan
menyesuaikan kondisi terkini sehingga
berhasil mencatat sejarah baru bagi
kehidupan.***

Kedua, teori perubahan sosiologis. Ada teori yang terdapat di dalamnya, yaitu teori evolusi menyatakan perubahan terjadi menyangkut dinamika sosial dilakukan secara gradual atau bertahap dari tingkat yang rendah menuju yang tinggi. Seperti halnya terjadi pada wirausahawan sosial yang berawal dari perasaan tidak suka, keterasingan, dan permusuhan. Wirausahawan sosial berusaha

mengubah problematika tersebut menuju tahapan membangun kepercayaan dan menjalin kerja sama. Upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan kerja sama berhasil sebagai pondasi untuk mencapai tahapan berikutnya. Tahapan selanjutnya, yaitu memanfaatkan modal sosial dan jejaring kerja sehingga mencapai peningkatan ekonomi pada masyarakat sipil.

Teori lain yang masih dalam kajian teori perubahan sosiologis adalah teori konflik. Berdasarkan pandangan teori ini, perubahan terjadi karena ada ketegangan yang menimbulkan konflik, baik yang terjadi antara individu maupun kelompok. Perubahan terjadi karena konflik yang bersifat destruktif diupayakan resolusi untuk memperoleh situasi konstruktif sehingga terwujud perdamaian. Kewirausahaan sosial memiliki peran dalam proses perubahan tersebut karena menurunkan kebencian atau prasangka yang bisa dilakukan oleh wirausahawan sosial yang menjalankan kewirausahaan disebabkan oleh penerapan nilai-nilai demokrasi yang dapat membentuk inklusivitas yang memberi kesempatan pada internal komunitas dan antar komunitas saling berbagi sumber daya agar bisa maju secara bersama-sama. Selain inklusivitas nilai demokrasi merealisasikan toleransi yang memberi manfaat, yaitu saat terjadi perbedaan dapat membuka jalan melakukan negosiasi bertujuan mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik.

Ketiga, teori fungsional dan struktural. Teori ini menekankan pada wirausahawan sosial melakukan dua hal, yaitu fungsi dan struktur. Dalam menjalankan kewirausahaan sosial memerlukan modifikasi untuk menciptakan tatanan baru dalam relasi sosial, baik secara personal maupun kelompok. Misalnya dalam melakukan praktik relasi sosial memerlukan regulasi sehingga menjadi pedoman melakukan kerja sama. Proses yang berjalan dengan baik akan melahirkan struktur sosial yang mapan. Struktur sosial bisa berlangsung secara berkelanjutan tergantung dari pelaksanaannya memiliki kesadaran timbal balik dengan pihak lain sehingga tercapai keseimbangan meski terjadi perubahan.

Keempat, teori psikologi sosial. Wirausahawan sosial menyadari setiap perubahan yang terjadi secara esensial ada faktor psikologi yang menyertainya. Faktor psikologi memberi sumbangan pada perubahan terkait dengan cara pandang, keyakinan, prasangka, dan sikap yang terdapat dalam diri seseorang. Variabel ini akan memengaruhi kepribadian individu. Dalam pandangan tradisional bahwa kepribadian yang terbentuk adalah pribadi yang tidak kreatif dan otoriter. Apabila orang-orang seperti ini berada di dalam suatu komunitas, komunitas tersebut tidak akan berkembang secara maksimal. Agar komunitas dapat tumbuh dengan baik memerlukan perubahan bagi para pengelolanya. Perubahan yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan pribadi inovatif. Ciri-ciri dari individu inovatif adalah memiliki daya kritis yang berani memberikan evaluasi terhadap sistem yang sudah mapan. Pribadi inovatif tidak hanya berhenti memberikan kritik, tetapi menemukan solusi baru agar perubahan yang dilakukan membuat keadaan menjadi lebih baik ditunjukkan oleh hadirnya pertumbuhan ekonomi. Perubahan ke arah pertumbuhan ekonomi bisa dikerjakan oleh wirausahawan sosial yang memiliki *need for achievement*. Kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi pada wirausahawan sosial menumbuhkan kepribadian kuat secara sosial untuk membantu masyarakat mencapai kehidupan yang lebih makmur.

Pada bagian lain, secara spesifik dalam teori psikologi bahwa wirausahawan sosial bersedia melakukan perubahan sosial karena ada proses internal individual. Seperti seorang wirausahawan sosial menggerakkan perubahan karena adanya motivasi internal dengan dilandasi adanya keinginan melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kesetaraan bagi masyarakat yang termarginalkan secara ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Harapan bisa terwujud tergantung kemampuan personal, yaitu kreativitas, keterampilan membangun kerja sama, pekerjaan yang dilakukannya merupakan *passion*, dan mempunyai sikap positif terhadap perubahan.

Dalam pandangan lebih luas wirausahawan sosial mampu memberi sumbangan berarti bagi perubahan sosial dapat dilihat dari model baru dalam aktivitas usaha yang menekankan adaptabilitas

dalam menjalankan organisasi maupun kelembagaan (Nicholls, 2006). Strategi tersebut mampu membangun perubahan sosial karena wirausahawan sosial tak lepas dari misi social sehingga membuka jalan bergerak lebih dinamis, strategis dan leluasa dalam mengelola usaha. Misi sosial menjadi energi memutar roda usaha berbasis kewirausahaan sosial untuk membangun jejaring relasi pada berbagai pihak. Relasi yang dibangun bisa menyatukan segala potensi di semua unsur, seperti individu, organisasi formal, kelembagaan non formal, lembaga swasta, dan instansi pemerintah. Menyatunya berbagai potensi dapat mewujudkan diversifikasi, meningkatkan aliran, dan memaksimalkan penciptaan berbagai usaha yang bernilai sosial. Upaya tindakan ini menjadi amunisi yang kuat meledakkan dampak sosial berupa perbaikan yang menyebarkan bagi masyarakat. Pencapaian perbaikan tersebut sebagai tanda telah terjadi perubahan sosial ke arah lebih positif.

Perubahan sosial menuju masa depan cerah itu bisa disandarkan pada para aktivis kewirausahaan sosial yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan memperbaiki sistem organisasi, mengevaluasi *status quo*, memaknai kembali nilai yang sebelumnya menjadi acuan, memperhatikan komunitas, serta menempuh jalan tengah, yaitu hibrid antara lembaga profit dan nonprofit dalam menjalankan programnya. Cara yang dilakukan adalah membuat pasar baru yang memperhatikan pada tujuan utamanya untuk memecahkan problem. Tindakan ini tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi pengambilan keputusan yang diambil, berguna membuat diversifikasi usaha yang mendukung kebijakan publik agar menghasilkan kemanfaatan bersama di masyarakat.

Penjelasan lebih detail mengenai kewirausahaan sosial di dalamnya mengandung banyak dimensi dan membentuk konstruksi secara dinamis melintasi sektor publik, swasta, dan sosial bertemu pada satu titik untuk menciptakan perubahan. Mekanisme pengelolaan organisasi merealisasikan perubahan tersebut bisa dilakukan oleh berbagai kalangan yang berasal dari latar belakang berbeda-beda dengan menghadirkan situasi, seperti *pertama*. sektor publik beradaptasi dengan keterampilan bisnis, menyetujui bisnis

yang bersifat sosial atau bisnis yang memfokuskan pada kebutuhan sosial, serta tindakan suka rela dan nonprofit yang menyatu pada pendekatan bisnis. *Kedua*, inovator sipil. Pengelola mengupayakan pendapatan sebagai pengusaha kewirausahaan sosial dan mengerjakan aktivitas yang memberi nilai tambah untuk mendukung visi sosial. Implementasinya adalah memberi layanan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh publik berdasarkan pertimbangan yang tidak disediakan oleh sektor swasta maupun pemerintah, menumbuhkan keterampilan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membuka kesempatan bagi orang-orang yang termarginalkan atau dikucilkan dalam suatu masyarakat untuk berkembang dan maju.

Penjabaran lebih luas lagi pencapaian dari kewirausahaan sosial dalam melakukan perubahan sosial dapat dinilai dari mengentaskan warga miskin dengan pemberdayaan melalui keuangan mikro, pelayanan kesehatan pada komunitas, serta pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memperluas cakrawala pengetahuan. Pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan sumber daya komunitas dari generasi sebelumnya, melaksanakan program kesejahteraan komunitas berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerja bagi pengangguran, penanganan penyalahgunaan minuman dan obat-obat terlarang, serta advokasi dan kampanye tentang penegakkan hak asasi manusia.

5

Mengukur Dampak

Dalam mengukur dampak terhadap program yang dijalankan dalam pengelolaan kewirausahaan sosial mempertimbangkan argumentasi yang melatarbelakangi pengukuran perlu dilakukan oleh pengelola, tantangan mengukur dampak, dan pendekatan pengukuran dampak (Rawhouser, et al. 2019). Penjelasan ada pada bagian di bawah ini.

Mengapa Pengukuran Dampak Perlu Dilakukan?

Dampak sosial merupakan upaya perbaikan pada level individu yang berkaitan dengan pekerjaan, organisasi yang berkenaan manajemen, dan komunitas yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan pada komunitas. Pengukuran dampak sosial perlu memperhitungkan, seperti:

- dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- dampak yang diinginkan dan tidak diinginkan;
- dampak positif dan negatif; dan
- dampak jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan perhitungan dari dampak sosial tersebut dapat didefinisikan sebagai proses memeriksa dan menganalisis sesuatu yang diinginkan maupun tidak diinginkan sebagai bagian dari konsekuensi dinamika sosial, lingkungan, dan ekonomi yang bersifat positif maupun negatif sebagai efek dari perubahan jangka pendek maupun jangka panjang yang dipicu oleh tindakan yang dilakukan oleh organisasi. Pengukuran dampak tersebut bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap hasil yang sudah dicapai organisasi dalam mengelola kewirausahaan sosial. Jadi, mengukur dampak dapat

memberi kesempatan pada organisasi untuk belajar mengenai, seperti berikut.

- Menilai kinerja organisasi dan dampaknya sesuai dengan yang diinginkannya. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan, peningkatan, dan peluang agar pada masa yang akan datang dalam menjalankan organisasi lebih efektif, efisien, dan berdampak lebih besar selaras dengan harapan dan penyesuaiannya dilakukan secara cepat.
- Membantu organisasi untuk memahami perubahan yang terjadi secara lengkap pada pemangku kepentingan.
- Memiliki validitas dalam menilai perubahan yang didasarkan pada teori perubahan sehingga bisa memperbaharui hasil yang sudah ada. Cara ini membuat organisasi berkembang lebih cepat.
- Menemukan dampak yang tidak diinginkan sehingga bisa digunakan sebagai pondasi untuk menangani masalah lebih cepat tertangani.
- Mendorong komitmen pada hasil dengan terus melakukan perbaikan.
- Menanamkan budaya organisasi berkaitan dengan perbaikan, mewujudkan dampak positif, motivasi kuat bagi staf, meningkatkan kepercayaan organisasi, dan menstimulasi organisasi terus berkembang menjadi lebih baik.

Selanjutnya pengukuran juga bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dalam pengembangan organisasi kewirausahaan sosial secara proporsional.

Tantangan Mengukur Dampak

Praktik kewirausahaan sosial yang dijalankan di berbagai tempat belum mapan sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pengukuran dampak. Hal ini karena pengukuran dampak merupakan aktivitas yang sistematis, frekuensi, dan bermakna dari pengukuran. Jadi, tantangan yang dirasakan dalam pengukuran dampak adalah

kurangnya pendekatan secara universal, karakteristik hasil secara intrinsik, belum tersaji pengetahuan secara baku, kurangnya keterampilan, dan pendanaan yang tidak tersedia.

“

Pengukuran dampak bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap hasil yang sudah dicapai organisasi dalam mengelola kewirausahaan sosial.

Pendekatan Utama Mengukur Dampak

Pendekatan dalam mengukur dampak menggunakan *Randomized Controlled Trial* (RCT). RCT ini merupakan pendekatan yang menekankan pada perbandingan dua kelompok yang sebanding. Satu kelompok memperoleh terlibat dalam program sehingga merasakan manfaatnya. Sedang satu kelompok tidak terlibat dalam program sehingga tidak menerima manfaat. Namun, ada kelompok yang mengelola kewirausahaan sosial menggunakan pendekatan lain yang dikembangkan sendiri berdasarkan kemampuan, minat, dan disesuaikan dengan konteks organisasi. Ada pengukuran jenis lain yang sudah mendapat pengakuan internasional, yaitu *Social Return on Investment* (SROI) yang menganalisis prinsip-prinsip *cost-benefit*. Pengukuran lain adalah *B Impact Assesment* yang mencakup empat area, yaitu pemerintah, pekerja, komunitas dan lingkungan, serta *Balanced Score Card* menggunakan perspektif internal dan eksternal (Lepoutre, et al., 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Addae, A. E., & Ellenwood, C. (2021). *Integrating Social Entrepreneurship Literature Through Teaching. Entrepreneurship Education and Pedagogy*, 251512742110219. doi:10.1177/25151274211021999
- Afifah, W., N., & Harianto, S. (2014). Dampak Negatif Industri Pt. Semen Indonesia terhadap Masyarakat Desa Temandang. *Paradigma*, 2(1).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/6667>.
- Afin, A. P., & Kiono, B. F. T. (2021). Potensi Energi Batubara serta Pemanfaatan dan Teknologinya di Indonesia Tahun 2020–2050: Gasifikasi Batubara. *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan*, 2(2), 144-122.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jebt/article/view/11429>.
- Afriana, F. N., & Widiyanto, N. (2021). Pandemi Covid-19 Dan Adaptasi Pelaku Pariwisata di Dataran Tinggi Dieng. *Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 55-68.
<http://ejournal.stipram.ac.id/index.php/kepariwisataan/article/view/26>
- Afrianti, S., & Purwoko, A. (2020). Dampak Kerusakan Sumber Daya Alam Akibat Penambangan Batubara di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. *Agroprimatech*, 3(2), 55-66.
<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/Agroprimatech/article/view/916>.
- Anggita, E., Karina, K., Suriyatni, N., & Alfarizi, W. A. (2020). Analisis Pandemic Covid-19 terhadap Harga Sembako. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 43-51.
<http://ejournalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/34>

- Ahmad, T. (2018). Masyarakat Adat dan Konflik-Konflik Pertambangan: KasusASUS Pertambangan Emas di Moronen, Bombana, Sulawesi Tenggara. *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 255-270.
<https://jurnalpangadereng.kemdikbud.go.id/index.php/pangadereng/article/view/45>.
- Akib, I., & Risfaisal, R. (2015). Bantuan Langsung Tunai. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2).
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/283>
- Al-Rahmi, W. M., Yahaya, N., Aldraiweesh, A. A., Alamri, M. M., Aljarboa, N. A., Alturki, U., & Aljeraiwi, A. A. (2019). Integrating technology acceptance model with innovation diffusion theory: An empirical investigation on students' intention to use E-learning systems. *Ieee Access*, 7, 26797-26809.
 DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2899368
- Al-Emran, M., Arpaci, I., & Salloum, S. A. (2020). An empirical examination of continuous intention to use m-learning: An integrated model. *Education and information technologies*, 25(4), 2899-2918.
<https://doi.org/10.1007/s10639-019-10094-2>
- Amilia, W., Rokhani, R., Prasetya, R. C., & Suryadharna, B. (2020). Pembangunan Desa Wisata Gadingan dan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pendekatan Community Based Tourism. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 93-102.
<http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JPPM/article/view/4268>
- Amruddin, A. (2020). Pilkada Serentak dan Potensi Konflik di Sulawesi-Selatan. *Jurnal Arajang*, 3(1), 30-42.
<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/584>.
- Anggraini, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *El-Dusturie*, 1(1).
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/1-22>

- Anggariani, D., Sahar, S., & Sayful, M. (2020). Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai. *SIGN Journal of Social Science*, 1(1), 15-29.
<http://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjss/article/view/v1n1-2>.
- Anggarini, D. R. (2021). Dampak Sektor Pariwisata pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 7(2), 116-122.
<https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/JurnalBisnis/article/view/3089/1373>
- Anggreini, D., & Sri, A., M., W., H. (2020). Pemberdayaan di Sektor Pariwisata sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 26(4), 241-247.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/20646>.
- Anggraeni, D. (2022). Keberagaman Budaya Indonesia dan Potensi Konflik Lintas Budaya: Studi Literatur Mengenai Konflik Keberadaan Etnis Tionghoa di Indonesia. *INSANI*, 9(1), 32-44.
<https://jurnal.widuri.ac.id/index.php/insani/article/view/137>
- Anisah, A. P., Ju, A. B., Tng, A., Zikra, E., Weley, N. C., & Fitri, W. (2021). Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Keberlanjutan Suplai Air Bersih dalam Menjaga Ekosistem Darat. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(12), 2246-2259.
<https://www.jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/354>.
- Arafa, F. N., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Covid 19 Terhadap Mortalitas dan Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 12-32.
<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2823>
- Armadani, A., Fisabil, A. I., & Salsabila, D. T. (2021). Analisis Rasio Kebangkrutan Perusahaan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi*, 99-108.
<https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/3197>

- Ashta, A. (2020). *A Realistic Theory of Social Entrepreneurship. A Life Cycle Analysis of Micro Finance*. Palgrave Macmillan.
- Auvinet, C., & Lloret, A. (2015). Understanding social change through catalytic innovation: Empirical findings in Mexican social entrepreneurship. *Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration*, 32(4), 238-251.
<https://doi.org/10.1002/cjas.1353>
- Azjen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior. Second Edition*. Open University Press.
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314-324.
<https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Azwani, A. (2021). Cadangan Emas, Harga Emas dan Stabilitas Mata Uang di Negara Islam. *JURNAL MUAMALAT INDONESIA-JMI*, 1(1).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JVPEI/article/view/46287>.
- Azzaki, M. A. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional, dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara-Negara ASEAN. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 10(2), 154-174.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JJ/article/view/46953>.
- Abushov, K. (2022). Drawing a boundary between structural factors and identity in ethnic conflict: bringing back the role of identity. *Terrorism and political violence*, 34(3), 537-557.
<https://doi.org/10.1080/09546553.2020.1717475>.
- Bacq, S., & Alt, E. (2018). Feeling capable and valued: A prosocial perspective on the link between empathy and social entrepreneurial intentions. *Journal of Business Venturing*, 33(3), 333-350.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.01.004>
- Bacq, S., Geoghegan, W., Josefy, M., Stevenson, R., & Williams, T. A. (2020). The COVID-19 Virtual Idea Blitz: Marshaling social

- entrepreneurship to rapidly respond to urgent grand challenges. *Business Horizons*, 63(6), 705-723.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.05.002>
- Bansal, S., Garg, I., & Sharma, G. (2019). Social Entrepreneurship as a Path for Social Change and Driver of Sustainable Development: A Systematic Review and Research Agenda. *Sustainability*, 11(4), 1091. doi:10.3390/su11041091
- Batson, C. D. (2017). The empathy-altruism hypothesis: What and so what. *The Oxford handbook of compassion science*, 27-40.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8MQ2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT67&dq=empathy+altruism+hypothesis+&ots=Ua5t3wFgG4&sig=d0w6e4rjkBdI3R5yN63TIZjTl70&redir_esc=y#v=onepage&q=empathy%20altruism%20hypothesis&f=false
- Becker, S., Kunze, C., & Vancea, M. (2017). Community energy and social entrepreneurship: Addressing purpose, organisation and embeddedness of renewable energy projects. *Journal of Cleaner Production*, 147, 25-36. doi:10.1016/j.jclepro.2017.01.048
- Bjerke, B., & Karlsson, M. (2013). *Social Entrepreneurship. To act as if and Make a Difference*. Edward Elgar.
- Bornstein, D., & Davis, D. (2010). *Social Entrepreneurship What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.
- Bykov, A. (2017). Altruism: New perspectives of research on a classical theme in sociology of morality. *Current Sociology*, 65(6), 797-813.
<https://doi.org/10.1177/0011392116657861>
- Cadith, J. (2019). Konflik dalam Pemanfaatan Sumber Daya di Pesisir Teluk Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2).
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/6929>
- Canestrino, R., Ćwiklicki, M., Magliocca, P., & Pawełek, B. (2020). *Understanding social entrepreneurship: A cultural perspective in business research*. *Journal of Business Research*, 110, 132-143. doi:10.1016/j.jbusres.2020.01.006
- Caviola, L., Schubert, S., & Greene, J. D. (2021). The psychology of (in) effective altruism. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(7), 596-607.
<https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.03.015>

- Chahine, T. (2016). *Introduction to Social Entrepreneurship*. CRC Press.
- Cheng, Z., Tani, M., & Wang, H. (2021). Energy poverty and entrepreneurship. *Energy Economics*, 102, 105469. doi:10.1016/j.eneco.2021.105469
- Chou, D. C. (2018). Applying design thinking method to social entrepreneurship project. *Computer Standards & Interfaces*, 55, 73-79.
<https://doi.org/10.1016/j.csi.2017.05.001>
- Chu, H., & Liu, S. (2021). Integrating health behavior theories to predict American's intention to receive a COVID-19 vaccine. *Patient Education and Counseling*, 104(8), 1878-1886.
<https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.02.031>
- Clarke, E., A., Washburn, R., & Friese, C. (2022). *Situational Analysis in Practice Mapping Relationalities Across Disciplines. Second Edition*. Routledge. Taylor & Francis Group.
- Coffie, M. R. (2013). *The impact of social venture capital and social entrepreneurship on poverty reduction* (Doctoral dissertation, Walden University).
<https://www.proquest.com/openview/0bce69c00d5c1a692b365bbfa5e14991/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750>
- Collavo, T. (2022). *Foundation of Social Entrepreneurship. Theory, practical tolls and skills*. Taylor & Francis Group.
- Crupi, A., Liu, S., & Liu, W. (2022). The top-down pattern of social innovation and social entrepreneurship. Bricolage and agility in response to COVID-19: cases from China. *R&D Management*, 52(2), 313-330.
<https://doi.org/10.1111/radm.12499>
- Curry, J. A., Donker, H., & Michel, P. (2016). Social entrepreneurship and indigenous people. *Journal of Co-operative organization and management*, 4(2), 108-115.
<https://doi.org/10.1016/j.jcom.2016.09.002>
- Dahles, H., Khieng, S., Verver, M., & Manders, I. (2019). Social entrepreneurship and tourism in Cambodia: advancing community engagement. *Journal of Sustainable Tourism*, 1-18. doi:10.1080/09669582.2019.1706544

- Dappa, S., Lasut, J. J., & Kandowangko, N. (2021). Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata Negeri Di Atas Awan Di Desa Benteng Mamullu Kecamatan Kapala Pitu Kabupaten Toraja Utara. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/34466>
- Darajati, D., Rianto, A., & Subhan, S. (2022). Efektivitas Program Sembako dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Pasalakan. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, 16(01), 1-8.
<https://www.e-journal.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/2929>
- Dey, P., & Steyaert, C. (2016). Rethinking the space of ethics in social entrepreneurship: Power, subjectivity, and practices of freedom. *Journal of Business Ethics*, 133(4), 627-641.
<https://doi.org/10.1007/s10551-014-2450-y>
- Dewanto, F., W., & Rahmawati, F. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar wilayah (Studi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia) Tahun 2014-2018. *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 4(1), 28-42.
<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek/article/view/1471>
- Dep, S., Sunny, M., A., & Sanyal, N. (2020). *Community Psychology. Theories and Applications*. Sage & Texts.
- Douglas, E., & Prentice, C. (2019). Innovation and profit motivations for social entrepreneurship: A fuzzy-set analysis. *Journal of Business Research*, 99, 69-79.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.031>
- Durkin, C., & Gunn, R. (2010). *Social Entrepreneurship. Skills Approach*. Policy Press.
- Dutta, S. (2019). Seeing parochially and acting locally: Social exposure, problem identification and social entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*, 34(6), 105942.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2019.06.003>

- Dwivedi, A., & Weerawardena, J. (2018). Conceptualizing and operationalizing the social entrepreneurship construct. *Journal of Business research*, 86, 32-40.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.053>
- El Ebrashi, R. (2013). Social entrepreneurship theory and sustainable social impact. *Social Responsibility Journal*, 9(2), 188–209
<https://doi.org/10.1108/SRJ-07-2011-0013>
- Elsayed, Y. (2018). At the intersection of social entrepreneurship and social movements: The case of Egypt and the Arab spring. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 29(4), 819-831.
<https://doi.org/10.1007/s11266-017-9943-0>
- Evany, S. T., Rinofah, R., & Sari, P. P. (2022). Analisis Profitabilitas Perusahaan Kompas 100 Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 397-414.
<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/678>
- Faizi, F., Wulandana, N. P., Alya, A., & Lombu, A. A. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Umkm di Indonesia. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 11(2), 137-145.
<https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/view/510>
- Felício, J. A., Gonçalves, H. M., & da Conceição Gonçalves, V. (2013). Social value and organizational performance in non-profit social organizations: Social entrepreneurship, leadership, and socioeconomic context effects. *Journal of business research*, 66(10), 2139-2146.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.040>
- Fetzer, J. S. (2018). Realistic Group Conflict and Voting for the 2002 Aboriginal Treaty Negotiations Referendum in British Columbia. *Canadian Ethnic Studies*, 50(1), 149-161.
 Doi:10.1353/ces.2018.0008.
- Firmansyah, W. I., & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Masyarakat Terdampak COVID-19 di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang. *Publika*, 10(1), 261-272.

- <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44539>
- Fink, M., Lang, R., & Richter, R. (2017). Social entrepreneurship in marginalised rural Europe: towards evidence-based policy for enhanced social innovation. *Regions Magazine*, 306(1), 6-10.
<https://doi.org/10.1080/13673882.2017.11878963>
- Fitriani, F., Harahap, I., & Utari, T. (2020). Membangun Relasi Umat Beragama Pasca Konflik Agama di Tanjungbalai. *Studia Sosia Religia*, 3(1).
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ssr/article/view/7670>
- Fuady, A. H. (2019). Teknologi Digital dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 44(1), 75-88.
<http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipks/article/view/803>.
- Gieure, C., del Mar Benavides-Espinosa, M., & Roig-Dobón, S. (2020). The entrepreneurial process: The link between intentions and behavior. *Journal of Business Research*, 112, 541-548.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.088>
- Gelaidan, H. M., & Abdullateef, A. O. (2017). Entrepreneurial intentions of business students in Malaysia: The role of self-confidence, educational and relation support. *Journal of small business and Enterprise Development*.
<https://doi.org/10.1108/JSBED-06-2016-0078>
- Ginting, M. L. B., & Herdiyana, R. (2020). Peran Pemerintah pada Kebijakan Kartu Prakerja dalam Memulihkan Kesejahteraan Pekerja di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Analis Kebijakan*, 4(2), 1-15.
<http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/431>
- Grilo, R., & Moreira, A. C. (2022). The social as the heart of social innovation and social entrepreneurship: An emerging area or an old crossroads?. *International Journal of Innovation Studies*, 6(2), 53-66.
<https://doi.org/10.1016/j.ijis.2022.03.001>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara/article/view/6207>

- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lamongan. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 1(3), 191-206.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/43632>.
- Harahap, L. R., Anggraini, R., Ellys, E., & Effendy, R. Y. (2021). Analisis Rasio Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan Pt Eastparc Hotel, Tbk (Masa Awal Pandemi Covid-19). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 57-63.
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/4050>
- Hidayat, M. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 15(1), 9-17.
<https://jurnal.unrika.ac.id/index.php/measurement/article/view/3332>
- Hikmah, H., & Firdaus, M. (2018). Kinerja Program Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 7(1), 27-37.
<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/view/5924>
- Hjorth, D. (2013). Public entrepreneurship: Desiring social change, creating sociality. *Entrepreneurship & Regional Development*, 25(1-2), 34-51.
<https://doi.org/10.1080/08985626.2012.746883>
- Hlady Rispal, M., & Servantie, V. (2017). Business models impacting social change in violent and poverty-stricken neighbourhoods: A case study in Colombia. *International small business journal*, 35(4), 427-448.
<https://doi.org/10.1177/0266242615622674>

- Hockerts, K. (2017). Determinants of social entrepreneurial intentions. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 41(1), 105-130.
<https://doi.org/10.1111/etap.12171>
- Hockerts, K. (2018). The effect of experiential social entrepreneurship education on intention formation in students. *Journal of Social Entrepreneurship*, 9(3), 234-256.
<https://doi.org/10.1080/19420676.2018.1498377>
- Hossain, M. U., Arefin, M. S., & Yukongdi, V. (2021). Personality traits, social self-efficacy, social support, and social entrepreneurial intention: The moderating role of gender. *Journal of Social Entrepreneurship*, 1-21.
<https://doi.org/10.1080/19420676.2021.1936614>
- Huang, X., Dai, S., & Xu, H. (2020). Predicting tourists' health risk preventative behaviour and travelling satisfaction in Tibet: Combining the theory of planned behaviour and health belief model. *Tourism Management Perspectives*, 33, 100589.
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100589>
- Ianniello, M., Iacuzzi, S., Fedele, P., & Brusati, L. (2019). Obstacles and solutions on the ladder of citizen participation: a systematic review. *Public management review*, 21(1), 21-46.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1438499>
- Ibrahim, M. A., Hidayat, E., & Alexandra, H. (2022). Resolusi Konflik Agraria dalam Pembangunan Bandar Udara Toraja di Kabupaten Tanatoraja. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 185-191.
<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3649>
- Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(1), 1-22.
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/view/16292>
- Indrawan, J., & Lutfi, A. P. K. (2021). Pemetaan Konflik Identitas: Studi Kasus Etnis Samawa Dengan Etnis Bali Di Sumbawa, Nusa

- Tenggara Barat. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(2), 87-103.
<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/1257>
- Infitah, N., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 13(2), 103-109.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/11346>
- İrengün, O., & Arikboğa, Ş. (2015). The effect of personality traits on social entrepreneurship intentions: A field research. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 195, 1186-1195.
- Irzon, R. (2021). Penambangan Timah di Indonesia: Sejarah, Masa Kini, dan Prospeksi. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 17(3), 179-189.
<https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/1183>.
- Jackson, E. T. (2013). Interrogating the theory of change: evaluating impact investing where it matters most. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 3(2), 95-110. doi:10.1080/20430795.2013.776257
- Jatiningrum, C., Utami, B. H., Norawati, S., & Silvany, S. (2021). Intensi Kewirausahaan Sosial Wirausaha Muda di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19. *Eco-Buss*, 4(2), 95-106.
<https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/247>
- Jatmiko, U., Munir, M., & Jauhari, A. (2021). Disparitas Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid 19 Sebelum dan Sesudah Adanya Program Keluarga Harapan (PKH). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(1), 74-83.
<https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/929>
- Juaranas, A. (2017). Efektivitas Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) dalam Mengatasi Putus Sekolah Siswa Miskin di Mts Swasta Insan Kesuma Lkmd Kecamatan Namorejo Kabupaten Lamongan. *Hijri*, 6(1).
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/hijri/article/view/1105>

- Kalsum, U., & Mubarak, A. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Kapeh Panji Jaya Talok pada Masa Pandemi Covid-19. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration studies*, 1(1), 9-21.
<https://publicness.ppj.unp.ac.id/index.php/publicness/article/view/2>
- Kasna, I. K. (2020). Dampak Pengangguran Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 58-61.
<http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/202>
- Kickul, J., & Lyons, S., T. (2020). *Understanding Social Entrepreneurship. The Relentless Pursuit of Mission in an Ever Changing World*. Taylor & Francis.
- Kline, C., Shah, N., & Rubright, H. (2014). Applying the positive theory of social entrepreneurship to understand food entrepreneurs and their operations. *Tourism Planning & Development*, 11(3), 330-342.
<https://doi.org/10.1080/21568316.2014.890126>
- Kloos, B., Hill, B., Thomas, E., Case, D., W., Scoot, C., V., Wandersman, A. (2021). *Community Psychology Linking Individuals and Community. Fourt Edition*. Americah Psychological Association.
- Koehne, F., Woodward, R., & Honig, B. (2022). The potentials and perils of prosocial power: Transnational social entrepreneurship dynamics in vulnerable places. *Journal of Business Venturing*, 37(4), 106206.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2022.106206>
- Koho, I., R. (2021). Oligarki dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60-73.
<https://jurnalunpri.ac.id/index.php/lo/article/view/6>
- Kraus, S., Palmer, C., Kailer, N., Kallinger, F. L., & Spitzer, J. (2018). Digital entrepreneurship: A research agenda on new business models for the twenty-first century. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*.
<https://doi.org/10.1108/IJEBr-06-2018-0425>

- Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2017). Pengelolaan Program Raskin Ditinjau dari Value For Money Audit untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Wilayah Surakarta). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 6(2), 109-119.
<https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/4050>
- Kummitha, R. K. R. (2018). Institutionalising design thinking in social entrepreneurship. *Social Enterprise Journal*, 14(1), 92-107.
 doi:10.1108/sej-12-2016-0059
- Kumorotomo, W., & Purbokusumo, W. (Ed). (2018). *Kebijakan Publik dalam Pusaran Perubahan Ideologi. Dari Kuasa Negara ke Dominasi Pasar ?* Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, T. T. (2019). Asas Akuntabilitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota Parlemen di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(02), 106-114.
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/2405>
- Krishna, R., & Kummita, R. (2017). *Social Entrepreneurship and Social Inclusion. Processes, Practices & Prospects*. Palgrave Macmillan
- Lang, R., & Fink, M. (2019). Rural social entrepreneurship: The role of social capital within and across institutional levels. *Journal of Rural Studies*, 70, 155-168.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.03.012>
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial pada Masa Pandemi. *JUSTISI*, 8(2), 95-107.
<https://www.ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1612>
- Lee, B., & Kelly, L. (2019). Cultural leadership ideals and social entrepreneurship: an international study. *Journal of Social Entrepreneurship*, 10(1), 108-128.
<https://doi.org/10.1080/19420676.2018.1541005>
- Lepoutre, J., Justo, R., Terjesen, S., & Bosma, N. (2011). Designing a global standardized methodology for measuring social entrepreneurship activity: the Global Entrepreneurship Monitor social entrepreneurship study. *Small Business Economics*, 40(3), 693-714. doi:10.1007/s11187-011-9398-4

- Lewis, B. (2022). *Community Psychology*. Murphy & Moore.
- Limbong, F., & Soetomo, S. (2013). Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap lingkungan Taman Nasional Karimunjawa. *Ruang*, 2(1), 51-60.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/4368>.
- Litzky, B. E., Godshalk, V. M., & Walton-Bongers, C. (2009). Social Entrepreneurship and Community Leadership. *Journal of Management Education*, 34(1), 142–162. doi:10.1177/1052562909338038
- Liu, H. C., Liang, C., Chang, C. C., Ip, C. Y., & Liang, C. T. (2021). Optimizing personality traits and entrepreneurial creativity to boost the precursors of social entrepreneurial intentions: Five studies in Taiwan. *Journal of Social Service Research*, 47(1), 10-32.
<https://doi.org/10.1080/01488376.2019.1708840>
- Loy, A. A., & Jacob, A. R. P. (2020). Politik Identitas pada Pemilukada Kabupaten Ende 2018: Studi Kasus Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah. *Jurnal Politiconesia*, 9(2), 11-16.
<http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jp/article/view/p230>
- Luc, P. T. (2022). The relationships between Big-Five personality traits and social entrepreneurship intention. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2137950.
<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2137950>
- Luke, B., & Chu, V. (2013). Social enterprise versus social entrepreneurship: An examination of the ‘why’ and ‘how’ in pursuing social change. *International Small Business Journal*, 31(7), 764-784.
<https://doi.org/10.1177/0266242612462598>
- Lumenta, M., Gamaliel, H., & Latjandu, L. D. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/34727>

- Martins, I., Monsalve, J. P. P., & Martinez, A. V. (2018). Self-confidence and fear of failure among university students and their relationship with entrepreneurial orientation: Evidence from Colombia. *Academia Revista Latinoamericana de Administración*.
<https://doi.org/10.1108/ARLA-01-2018-0018>
- Mahyuni, L. P., & Satriawan, D. M. A. (2021). Menggali Potensi Maniklawang Sebagai Desa Wisata Alam dan Budaya. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5).
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/6300>.
- Maulana, D. F., & Hermansah, T. (2021). Pemberdayaan Berbasis Pariwisata Melalui Home Stay di Desa Wisata Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Jurnal Komunitas Online*, 2(1), 21-32.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jko/article/view/21889>.
- Mardewi, M., Saifuddin, S., & Kaco, S. (2021). Efektivitas Bantuan Kartu Prakerja terhadap Perekonomian Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Pegguruang*, 3(2), 875-880.
<https://www.neliti.com/publications/359269/efektivitas-bantuan-kartu-prakerja-terhadap-perekonomian-masyarakat-di-masa-pand>
- Marques, J., & Dhiman, S. (2020). *Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility*. Springer.
- McMullen, J. S., & Bergman Jr, B. J. (2017). Social entrepreneurship and the development paradox of prosocial motivation: A cautionary tale. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 11(3), 243-270.
<https://doi.org/10.1002/sej.1263>
- McSweeney, M. J. (2020). Returning the 'social' to social entrepreneurship: Future possibilities of critically exploring sport for development and peace and social

- entrepreneurship. *International Review for the Sociology of Sport*, 55(1), 3-21.
<https://doi.org/10.1177/1012690218784295>
- Mediana, W., & As' ari, H. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 136-146.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/13906>
- Mohammadinezhad, S., & Ahmadvand, M. (2020). Modeling the internal processes of farmers' water conflicts in arid and semi-arid regions: Extending the theory of planned behavior. *Journal of Hydrology*, 580, 124241.
<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124241>
- Mudji, D., A., Minardi, A., Prathama, S., A., R., Syahada, A., & Cindi, L. (2021). Pengembangan UKM Pasundan Natural Craft di Kampung Kreatif Sukaruas KabupatenTasikmalaya. *SEWAKADARMA*, 1(1), 30-36.
<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/sewakadarma/article/view/4369>
- Mufida, N. U. (2021). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Sosial Sains*, 1(2), 82-92.
<https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/23>
- Mugiyanto, M. (2022). Hubungan Oligarki Kekuasaan dengan Politik Hukum Penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 14-28.
<https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/54>
- Muhlis, M. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi dan Oligarki. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 116-141.
<https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1253>
- Muslim, M. (2020). PHK Pada Masa Pandemi Covid-19. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 357-370.

- <https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/218>
Mustofa, R., & Bakce, R. (2019). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. In *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security* (Vol. 1, pp. 58-66).
<http://conference.unri.ac.id/index.php/unricsagr/article/view/a8>.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69-87.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/23514>
- Naranjo-Valencia, J. C., Ocampo-Wilches, A. C., & Trujillo-Henao, L. F. (2022). From Social Entrepreneurship to Social Innovation: The Role of Social Capital. Study Case in Colombian Rural Communities Victim of Armed Conflict. *Journal of Social Entrepreneurship*, 13(2), 244-277.
<https://doi.org/10.1080/19420676.2020.1770317>
- Narasi Daily. (2022, Mei 12). *Kaya Migas, tapi Rakyatnya Miskin* (Video). Youtube,
<https://www.youtube.com/watch?v=VB7QR3exPng>.
- Nasution, R. P. (2020). Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi di Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 53-65.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/8438>
- Nasution, L. N., Sari, W. I., & Lubis, A. B. (2021). Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan di Lima Negara ASEAN. *JEpa*, 6(2), 593-600.
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/3851>.
- Nawir, M., & Mukramin, S. (2019). Identitas Etnis Dalam Ranah Politik. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 348-354.
<https://ojs.unm.ac.id/pir/article/view/10090>.
- Newbert, S. L. (2014). Building theory in social entrepreneurship. *Journal of Social Entrepreneurship*, 5(3), 239-242.
<https://doi.org/10.1080/19420676.2014.948748>

- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104. <https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/mapan/article/view/363>
- Nicholls, A. (2006). *Social Entrepreneurship. New Models of Sustainable Social Change*. Oxford University Pers.
- Nirwanasari, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Konflik Sosial pada Remaja di Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan.
- Novirsa, R., & Achmadi, U. F. (2012). Analisis Risiko Paparan PM2, 5 di Udara Ambien Siang Hari terhadap Masyarakat di Kawasan Industri Semen. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 7(4), 173-179. <http://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/view/52>.
- Nugroho, S., S. (2020). *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati Sebuah Dilema Antara Potensi & Ancaman Kepunahan*. Lakeisha.
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 109-117. <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/25173>.
- Nuraeni, Y. (2018). Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel terhadap Kondisi Sosial, ekonomi dan budaya masyarakat (*Conference Session*). Seminar Nasional Edusainstek FMIPA UNIMUS, Semarang, Jawa Tengah. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/4180>.
- Nurhayanti, I. D. N. (2021). Dampak Wisata Berbasis Masyarakat Adat Terhadap Ancaman Kerusakan Lingkungan Ekologis Suku Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak (*Doctoral dissertation*, Universitas Pendidikan Indonesia). <http://repository.upi.edu/63286/>.

- Ofeser, F., & Susbiyantoro, S. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Lentera Bisnis*, 10(1), 36-48.
<https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/view/396>
- Oktanto, E., Leonardo Budi, H., & Minarsih, M. M. (2015). Pengaruh Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat di Kelurahan Banyumanik Kota Semarang. *Journal of Management*, 1(1).
<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/260>
- Pacut, A. (2020). Drivers toward social entrepreneurs engagement in Poland: An institutional approach. *Administrative Sciences*, 10(1), 5.
<https://doi.org/10.3390/admsci10010005>
- Paludi, S. (2022). Setahun Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Industri Pariwisata Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19(01), 49-60.
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium/article/view/4337>
- Pambudi, A. (2020). Kerusakan Lingkungan sebagai Dampak Penambangan Batu Kapur di Bentang Alam Karts Kabupaten Gunung Kidul. *PRANATA HUKUM*, 15(2), 212-220.
<http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/231>
- Pearson, C. A., & Helms, K. (2013). Indigenous social entrepreneurship: The Gumatj clan enterprise in east Arnhem land. *The Journal of Entrepreneurship*, 22(1), 43-70.
<https://doi.org/10.1177/0971355712469185>
- Perrini, F., & Vurro, C. (2006). Social entrepreneurship: Innovation and social change across theory and practice. In *Social entrepreneurship* (pp. 57-85). Palgrave Macmillan, London.
- Pertiwi, H. F. (2020). Analisis Corporate Citizenship dan Hak Asasi Manusia terhadap Isu Eksploitasi Lingkungan pada Film "Sexy Killers". *Masalah-masalah Hukum*, 49(1), 71-79.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/24984>

- Phillips, W., Lee, H., Ghobadian, A., O'regan, N., & James, P. (2015). Social innovation and social entrepreneurship: A systematic review. *Group & Organization Management*, 40(3), 428-461. <https://doi.org/10.1177/1059601114560063>
- Portales, L. (2019). *Social Innovation and Social Entrepreneurship. Fundamentals, Konsep dan Tools*. Palgrave Macmillan.
- Prasetyawan, A. A., & Rohimat, A. M. (2019). Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren dan Social Entrepreneurship. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 11(2), 163-180. <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/2281>
- Praszkier, R., & Nowak, A. (2012). *Social Entrepreneur. Theory & Practice*. Cambridge University.
- Prayogo, D., & Sukim, S. (2021, November). Determinan Daya Beli Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2021, No. 1, pp. 631-640). <https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/987>
- Pu, E. J. (2018). Konflik Etnis Sambas Tahun 1999 Arah Disintegrasi Bangsa. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 3(1), 1-10. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Kalpa/article/view/1605>
- Purba, B., Nainggolan, E.L., Siregar, T., R., Chairul, M., Simarmata, M., M., Bachtiar, E., Rahmadana, M., F., Marzuki, I., & Meganingratna, A. (2020). *Sebuah Fakta, Konsep, dan Gagasan. Ekonomi Sumber Daya Alam*. Yayasan Kita Menulis.
- Putri, M. E., Malik, A., & Indrayatti, W. (2020). Kritik Sosial dalam Film *Sexy Killer* Karya Laksono Ekspedisi Indonesia Biru. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 104-113. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFKIP/article/view/430>.

- Putri, M., & Wulansari, I. Y. (2022). Analisis Determinan Status Kemiskinan Berisiko COVID-19 Level Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 11(1), 79-94.
<https://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/view/174>
- Pratama, E. H., Pontoh, W., & Pinatik, S. (2021). Analisis Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Ritel Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 111-118.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/35921>
- Qi, X., & Ploeger, A. (2019). Explaining consumers' intentions towards purchasing green food in Qingdao, China: The amendment and extension of the theory of planned behavior. *Appetite*, 133, 414-422. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.12.004>
- Rahayuningsih, Y. (2017). Dampak Keberadaan Industri Semen terhadap Sistem Mata Pencaharian (Livelihood System) Nelayan Bayah. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 12(2), 213-223.
<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/5976>.
- Raharti, R., Laras, T., & Oktavianti, O. (2021). Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 257-270.
<https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jseb/article/view/2422>.
- Rahayu, Y. P., Waimbo, D. E., & Kabiay, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Pro Masyarakat Miskin (studi kasus program raskin di Kabupaten Manokwari). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 121-146.
<https://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/2125>
- Rahman, D., & Rahman, K. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Studi Program Kartu Prakerja Dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(1), 39-53.

- <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/9717>
Rahmatillah, S., & Husen, T. (2018). Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambahan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 7(1), 149-171.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3969>.
- Ramadhan, F., & Herman, A. (2021). Analisis Wacana Teun A. Van Dijk Pada Film Dokumenter *Sexy Killer*. *Jurnal Komunikasi Korporasi dan Media (JASIMA)*, 2(1), 68-86.
<https://jasima.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/jasima/article/view/23>.
- Ratmania, S., & Djulius, H. H. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Beberapa Negara Maju dan Berkembang ASIA (*Thesis*, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas).
<http://repository.unpas.ac.id/55808/>.
- Ratwianingsih, L., Mulyaningsi, T., & Johadi, J. (2021). Analisis Potensi dan Upaya Pengembangan Desa Wisata Alam Kepuhsari Manyaran Wonogiri. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 3(1), 25-30.
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/KUAT/article/view/1164>.
- Rawhouser, H., Cummings, M., & Newbert, S. L. (2019). Social impact measurement: Current approaches and future directions for social entrepreneurship research. *Entrepreneurship theory and practice*, 43(1), 82-115.
<https://doi.org/10.1177/1042258717727718>
- Retnaningsih, H. (2019). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 8(2), 161-177.
<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1263>
- Ridha, M. (2016). Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Dan Kepentingan Kapital. *Jurnal Politik Profetik*, 4(1).

- <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2740>.
- Rifal, R., & Sulaeman, S. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Beras Miskin (Raskin) di Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. *AGROTEKBIS: E-JURNAL ILMU PERTANIAN*, 4(5), 612-618.
<http://jurnal.faperta.untad.ac.id/index.php/agrotekbis/article/view/66>
- Risal, S., Paranoan, D., B., & Djaja, S. (2017). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. *Jurnal Administrative Reform*, 1(3), 516-530.
<http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/482>.
- Risman, R., Yapentra, A., & Iskandar, I. (2021). Semangat UMKM di Balik Pandemi Covid-19 Pada Objek Wisata Sungai Gelombang di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. *Jurnal Daya Saing*, 7(2), 196-202.
<https://ejournal.kompetif.com/index.php/dayasaing/article/view/664>
- Ruiz-Rosa, I., Gutiérrez-Taño, D., & García-Rodríguez, F. J. (2020). Social entrepreneurial intention and the impact of COVID-19 pandemic: A structural model. *Sustainability*, 12(17), 6970.
<https://doi.org/10.3390/su12176970>
- Rumopa, Y. (2020). Konflik Lahan Bandara Melalan di Kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat: Land Conflict of Melalan Airport in Gemuhan Asa Village, Kutai Barat District. *Journal of Government Science*, 1(1), 12-22.
<http://govsci.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/govsci/article/view/2/2>
- Rosita, R. (2020). Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109-120.
<https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/view/380>
- Rusdianti, E., Purwantini, S., & Wahdi, N. (2019). Dampak Motivasi Kewirausahaan Sosial Terhadap Pemberdayaan Perempuan

- dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Sosial Soedirman*, 3(2), 16-31.
<http://jos.unsoed.ac.id/index.php/juss/article/view/2300>
- Saebi, T., Foss, N. J., & Linder, S. (2018). *Social Entrepreneurship Research: Past Achievements and Future Promises. Journal of Management*, 014920631879319. doi:10.1177/0149206318793196
- Safira, R., Hasibuan, M., & Tambunan, K. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS TRIANGLE*, 2(4), 574-587.
<https://trianglesains.makarioz.org/index.php/JTS/article/view/170>.
- Safira, N. I., & Roseta, C. I. (2021). Model Kewirausahaan Sosial pada Komunitas Muslim Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit. *KABILAH: Journal of Social Community*, 6(1), 26-43.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/4411>
- Saleh, M. D., & Perdana, A. (2019). Praktik Rent Seeking dan Relasi Negara dengan Kapital (Studi Kasus Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Nikel oleh Gubernur Nur Alam di Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1), 76-84.
<http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/55>
- Sakharina, I. K. (2020). Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19. *Jurnal Legislatif*, 367-384.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10476>
- Santoso, I., B., & Hendriyati, L. (2022). Membangun Ekonomi Kreatif melalui Wisata Batik sebagai Upaya Membangkitkan Perekonomian Lokal di Era Kebiasaan Baru Desa Wisata Jarum Bayat. *Media Wisata*, 20(1), 115-123.
<http://jurnal.ampta.ac.id/index.php/MWS/article/view/306>.
- Sari, T. N., & Setyaningsih, P. R. A. (2022). Analisis Financial Distress dan Financial Performance Sebelum dan Selama Pandemi

- Covid-19 pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1).
<http://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2373>
- Sarooghi, H., Sunny, S., Hornsby, J., & Fernhaber, S. (2019). Design Thinking and Entrepreneurship Education: Where Are We, and What Are the Possibilities? *Journal of Small Business Management*, 57(S1), 78–93. doi:10.1111/jsbm.12541
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169-186.
<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/660>
- Satria, D., & Wibowo, J. M. (2021). Peran Klaster Pariwisata Terhadap Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyuwangi di Era Industri 4.0. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 15(2), 134-147.
<http://ejournal.kememparekraf.go.id/index.php/jki/article/view/217>.
- Setiadi, D., Purwanto, Y., & Gurhardja, E. (2012). Pengetahuan lokal Masyarakat Samin tentang Keanekaragaman Tumbuhan dan Pengelolaannya. *Media Konservasi*, 17(2).
<https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/view/12873>.
- Setiawan, A. (2018). Potensi Cadangan Mineral dan Batubara di Indonesia dan Dunia. *INTAN Jurnal Penelitian Tambang*, 1(1), 20-31.
<https://jurnal-intan.ac.id/index.php/intan/article/view/7>.
- Setiwawan, D., & Ubaidullah, M. A. (2019). Konflik DAN Resistensi Masyarakat terhadap Pertambangan Galian C di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(2).
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/11073>
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Resiko Kemiskinan Di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 53-66.

- <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/pareto/article/view/1891>
- Sianturi, R. R., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2021). Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 185-191.
<https://www.jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/748>
- Siburian, S. M., Sunarto, A., & Aisyah, A. (2021). Tindakan Hukum terhadap Anggota DPR-RI karena Terlibat Kasus Korupsi. *Jurnal Mutiara Hukum*, 4(2), 1-14.
<http://114.7.97.221/index.php/JMH/article/view/2608>.
- Singh, A., Saini, G. K., & Majumdar, S. (2015). Application of Social Marketing in Social Entrepreneurship. *Social Marketing Quarterly*, 21(3), 152–172. doi:10.1177/1524500415595208
- Siregar, E. S., Adawiyah, R., & Putriani, N. (2021). Dampak aktivitas pertambangan emas terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat muara soma kecamatan batang natal. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(2), 556-567.
<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2791>.
- Siregar, E. S. (2019). Dampak Industri Pariwisata terhadap Kerusakan Lingkungan (studi kasus wisata sibio-bio, aek sabaon, kabupaten tapanuli selatan). *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 7(1), 8-8.
<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/758/331>.
- Sparviero, S. (2019). The Case for a Socially Oriented Business Model Canvas: The Social Enterprise Model Canvas. *Journal of Social Entrepreneurship*, 1–20. doi:10.1080/19420676.2018.1541011
- Smith, T. W., Calancie, L., & Ammerman, A. (2015). Social entrepreneurship for obesity prevention: What are the opportunities?. *Current obesity reports*, 4(3), 311-318.
<https://doi.org/10.1007/s13679-015-0162-y>
- Smith, W. K., Gonin, M., & Besharov, M. L. (2013). Managing Social-Business Tensions: A Review and Research Agenda for Social

- Enterprise. *Business Ethics Quarterly*, 23(03), 407–442. doi:10.5840/beq201323327
- Smith, W. K., Besharov, M. L., Wessels, A. K., & Chertok, M. (2012). A paradoxical leadership model for social entrepreneurs: Challenges, leadership skills, and pedagogical tools for managing social and commercial demands. *Academy of Management Learning & Education*, 11(3), 463-478. <https://doi.org/10.5465/amle.2011.0021>
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44-58. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/290>.
- Sommerrock, K. (2010). *Social Entrepreneurship Business Models. Incentive Strategies to Catalyze Public Goods Provision*. Palgrave Macmillan.
- Sotiropoulou, A., Papadimitriou, D., & Maroudas, L. (2019). *Personal Values and Typologies of Social Entrepreneurs. The Case of Greece*. *Journal of Social Entrepreneurship*, 12(1), 1–27. doi:10.1080/19420676.2019.1668827
- Staicu, D. (2019, May). Contributions of social entrepreneurship to textile waste prevention in Romania. In *Proceedings of the International Conference on Business Excellence* (Vol. 13, No. 1, pp. 84-99). <https://sciendo.com/article/10.2478/picbe-2019-0009>
- Subekti, T. (2016). Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia. *Jurnal Transformative*, 2(2), 189-202. <http://175.45.184.22/transformative/index.php/jtr/article/view/136>.
- Sudiby, N. A., Iswardani, A., Sari, K., & Suprihatiningsih, S. (2020). Peranan Data Mining pada Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. *Jurnal Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika*, 1(3), 199-207. <https://lebesgue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/42>.

- Sugiarto, T., & Hariyanto, B. (2018). Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pertambangan tanpa Izindi Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 16(1), 114-126.
<http://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/1022>.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.
<https://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/575>
- Suhendi, D. (2020). Bilakah Kepala Daerah Tak Korupsi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 50-61.
<https://ejournal-new.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1357>
- Suparta, I. W., & Malia, R. (2020). Analisis Komparasi Happiness Index 5 Negara di Asean. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 56-65.
<http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jep/article/view/79>.
- Susanti, A., Izana, N. N., & Sabariman, H. (2022). Dinamika dan Kewirausahaan Sosial Masyarakat Desa Bicak, Trowulan, Mojokerto dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 32(1), 41-52.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/18144>
- Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi'i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2022). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi Civil Society. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173-190.
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/1032>
- Sutoyo, S. (2010). Keanekaragaman Hayati Indonesia Suatu Tinjauan: Masalah dan Pemecahannya. *Buana Sains*, 10(2), 101-106.
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/buanasains/article/view/199>.
- Suyono, H. (2018). Memahami Konflik Lahan Pegunungan Kendeng di Kabupaten Pati dan Rembang. *Penelitian*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan.

- Suyono, H. (2019). Merawat Perdamaian Metode Sistem Peringatan Dini Konflik. Halaman Indonesia & *Clinic for Community Empowerment* Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan.
- Suyono, H. (2021, 16 September). Sistem Peringatan Dini: Strategi Preventif Konflik untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Lahan Pantai (*Conference Session*). Temu Ilmiah Nasional IPS X 2021, Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
<http://prosiding.ikatanpsikologisosial.org/index.php/Prosiding2015/article/view/36>
- Suyono, H. (2022). Social Entrepreneurship Sebagai Upaya Kemiskinan Menggunakan Situational Analysis Berbasis Ecological Frame Work. *Penelitian*. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Ahmad Dahlan.
- Sserwanga, A., Kiconco, R. I., Nystrand, M., & Mindra, R. (2014). Social entrepreneurship and post conflict recovery in Uganda. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 8(2), 300-317
<https://doi.org/10.1108/JEC-02-2014-0001>
- Syafrudin., M. (2022). Illegal Logging yang Menyebabkan Kerusakan Hutan di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(4). 3626-3645.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14420>.
- Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 147-161.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9990>.
- Tari, D. O., Argenti, G., & Rahman, R. (2021). Implementasi Program Sembako bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cibitung. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1678-1685.

- <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5312>
- Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147-153.
<http://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/607>
- Trans7 Official. (2021, 06 Juni). Hidup di Tanah Kaya yang Sulit di Akses (Video). Youtube,
<https://www.youtube.com/watch?v=fU8MbY9KFeA>,
<https://www.youtube.com/watch?v=MPvYuHMcGQo>.
- Trans7 Official. (2020). Potret Buram Ketertinggalan di Tanah Minang (Video). Youtube,
<https://www.youtube.com/watch?v=EOOn3JZjgNsM>.
- Trans7 Official. (2020, 05 Oktober). Bertaruh Nyawa di Kaki Binaya (Video). Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=-l2pdoyvEew>.
- Trans7 Official. (2020, 03 Agustus). Sejahtera, Mimpi Kami Dipelosok Desa. (Video). Youtube,
<https://www.youtube.com/watch?v=zr2AH3Ch9SA>.
- Trans7 Official. (2020, 13 April). Kisah Nestapa di Tanah Timor. Part 1 (Video). Youtube,
<https://www.youtube.com/watch?v=Nk5ap57OriE>.
- Trans7 Official. (2019, 21 Januari). Dusun Sangsaluan, Sejahtera yang Jauh dari Harapan. Part 1 (Video). Youtube,
<https://www.youtube.com/watch?v=Z8TEsieG8kE>
- Trans7 Official. (2019, 21 Januari). Dusun Sangsaluan, Sejahtera yang Jauh dari Harapan. Part 2 (Video). Youtube,
<https://www.youtube.com/watch?v=hPvAJfkS0gw>.
- Trivedi, C. (2010). Towards a social ecological framework for social entrepreneurship. *The Journal of entrepreneurship*, 19(1), 63-80.
<https://doi.org/10.1177/097135570901900104>
- Tucker, R., Croom, R. M., & Bacq, S. (2019). Feeling your pain, pursuing my gain: Assessing status-striving, empathy, and

- social entrepreneurship intent. *Journal of Business Venturing Insights*, 12(C).
<https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2019.e00142>
- Tutdin, Z., & Thahura, F. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi di Kota Langsa. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 7(2), 156-164.
<http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/4363>
- Tu, B., Bhowmik, R., Hasan, M. K., Asheq, A. A., Rahaman, M. A., & Chen, X. (2021). Graduate students' behavioral intention towards social entrepreneurship: Role of social vision, innovativeness, social proactiveness, and risk taking. *Sustainability*, 13(11), 6386.
<https://doi.org/10.3390/su13116386>
- Utami, B. A., & Kafabih, A. (2021). Sektor pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID 19. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 8-14.
<http://jdepu.pnjatim.ac.id/index.php/jdep/article/view/198>
- Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau melalui Kewirausahaan sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(2), 498-508.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/21545>
- Utomo, S. D., & Wirdayanti, A. (2021). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Perspektif Strategi Kebijakan Publik. *Jurnal MoZaiK*, 13(1), 58-70.
<https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/1688>
- Wahidah, A. Z., Widayani, A., Wardani, S. I., Rachmawati, I., & Latifah, N. (2022). Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. *Competence: Journal of Management Studies*, 16(1), 51-63.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/14429>

- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148-162.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/10083>.
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Jurnal Publika*, 9(2).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/38377>.
- Wardani, W., Suriana, S., Arfah, S. U., Zulaili, Z., & Lubis, P. S. (2022). Dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap Inflasi dan Implikasinya terhadap Makroekonomi di Indonesia. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 2(3), 63-70.
<http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/article/view/338>
- Watchdoc Image. (2019, April 13). *Sexy Killers* (Video). Youtube,
<https://www.youtube.com/watch?v=q1B7vg4I-To>
- Weaver, R. L. (2020). The impact of COVID-19 on the social enterprise sector. *Journal of Social Entrepreneurship*, 1-9.
<https://doi.org/10.1080/19420676.2020.1861476>
- Wheeldon, J., & Faubert, J. (2009). Framing Experience: Concept Maps, Mind Maps, and Data Collection in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 8(3), 68–83. doi:10.1177/160940690900800307
- Whiting, M., & Sines, D. (2012). Mind maps: establishing “trustworthiness” in qualitative research. *Nurse Researcher*, 20(1), 21–27. doi:10.7748/nr2012.09.20.1.21.c93
- Wibowo, H., Santoso, M. B., & Setiawan, S. A. (2021). Inovasi Sosial pada Praktik Kewirausahaan Sosial di Yayasan AL-Barokah Kota Banjar. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 210-218.
<http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/35154>
- Widianto, H., W. (2020). Konflik Tambang Pasir Besi Lumajang: Analisis Akar dan Resolusi. *MOZAIK: Jurnal Kajian Sejarah*, 11(1).

- <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/45207>.
- Widodo. (2013). *Menanam adalah Melawan*. Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo & Tanah Air Beta.
- Yesicha, C., & Noviani, R. (2021). Konstruksi Korban dalam Film Dokumenter *Sexy Killers*. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(2), 313-330.
<https://journal.ubm.ac.id/index.php/bricolage/article/view/2171>.
- Yuana, S. T. (2020). Resolusi Konflik Pembangunan Pelabuhan International di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun 2017–2019. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 6(2), 206-232.
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/1134>
- Yunianto, B. (2014). Analisis Dampak Kebijakan Nilai Tambah mineral Indonesia terhadap ekspor dan ketenagakerjaan. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 10(3), 127-141.
<https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/729>.
- Yunis, M. S., Hashim, H., & Anderson, A. R. (2018). Enablers and constraints of female entrepreneurship in Khyber Pukhtunkhawa, Pakistan: Institutional and feminist perspectives. *Sustainability*, 11(1), 27.
<https://doi.org/10.3390/su11010027>
- Zalvino, M. A. (2021). Prediksi dan Arah Kebijakan Mengenai Bijih Nikel di Indonesia dalam Menghadapi Peningkatan Permintaan Baterai Mobil Listrik. *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI*.
<http://www.prosiding.perhapi.or.id/index.php/prosiding/article/view/236>.
- Zhang, T., Shen, D., Zheng, S., Liu, Z., Qu, X., & Tao, D. (2020). Predicting unsafe behaviors at nuclear power plants: An integration of Theory of Planned Behavior and Technology Acceptance Model. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 80, 103047.

<https://doi.org/10.1016/j.ergon.2020.103047>

Zulvia, A. S., & Suyanto. (2017). Efektivitas Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar Siswa di Desa Ngrayun untuk Pemenuhan Wajib belajar 9 Tahun. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(03).

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/21943>

Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam peningkatan akses pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44-53.

<https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/view/1498>

GLOSARIUM

Altruisme	: Sifat lebih mengutamakan kepentingan orang lain.
Bisnis	: Suatu kelompok yang menjual barang atau jasa, untuk memperoleh laba; usaha dagang.
<i>Core value</i>	: Prinsip atau panduan etik yang menjadi acuan dalam membangun usaha, organisasi, atau perusahaan.
Dampak	: Pengaruh dari suatu hal yang mendatangkan akibat, negatif maupun positif.
Desa wisata	: Desa yang ditunjuk dan dikelola untuk tujuan wisata karena memiliki daya tarik.
Determinan	: Faktor yang menentukan.
Ecotourism	: Pariwisata ekologis, model pariwisata yang menekankan pada konservasi yang berusaha mempertahankan kelestarian di suatu lingkungan.
Ekologi Sosial	: Ilmu yang menekankan pada hubungan penduduk dengan lingkungannya yang berfungsi satu sama lain.
Etnis	: Suatu kesatuan kelompok sosial dengan berdasarkan keturunan, kebudayaan, bahasa yang mengakar.
Hayati	: yang berhubungan dengan makhluk hidup

Inovasi	: Pengembangan sesuatu dari yang sebelumnya ada menjadi sebuah hal yang baru.
Kewirausahaan	: Proses mendirikan dan menjalankan suatu bisnis atau usaha.
Komunitas	: Sekelompok orang atau masyarakat yang hidup di area khusus dan memiliki suatu kesamaan.
Marginal	: Kelompok masyarakat atau wilayah yang terpinggirkan dan tersisihkan dari tatanan masyarakat.
Organisasi	: suatu kelompok yang terdiri atas berbagai susunan dan memiliki tujuan tertentu.
Paradoks	: Pernyataan yang seolah bertentangan, tetapi kenyataannya benar.
Problematika	: Permasalahan yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan yang diharapkan dan membutuhkan penyelesaian.
Psikologi	: Sebuah ilmu yang berkaitan dengan proses mental seseorang dan hubungannya dengan antarmanusia.
Psikologi Komunitas	: Bidang psikologi yang memfokuskan kajian pada individu berhubungan dengan lingkungan masyarakat, komunitas untuk mencapai kesejahteraan.
Psikologi Sosial	: Studi tentang perilaku dan hubungan antara manusia dengan kelompok atau masyarakat di lingkungannya.
<i>Sosial Entrepreneurship</i>	: Kegiatan untuk memecahkan masalah sosial dengan inovasi dan ide kreatif dengan misi sosial agar membe]ri

manfaat bagi kepentingan bersama masyarakat.

- Stakeholders : Semua pihak dalam masyarakat, yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan pada perusahaan atau organisasi.
- Status quo : Keadaan yang ada dalam waktu tertentu.
- Sumber daya : Faktor produksi, meliputi tenaga, modal, dan potensi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

INDEKS

A

aktivitas, 64, 95, 141
analisis, 101, 105, 109, 131, 132, 133,
134, 135, 137

B

benefit, 59, 64, 66, 74, 142, 144, 147,
155
budaya, vii, 10, 14, 15, 16, 23, 48, 52,
62, 75, 81, 86, 91, 112, 113, 122,
130, 133, 136, 148, 149, 151, 154,
174

C

cabai, 10, 11, 12
covid-19, v, vi, ix, 34, 35, 36, 37, 38,
45, 56, 69, 77, 117, 156, 158, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 170,
171, 172, 174, 175, 176, 177, 179,
180, 181, 182, 184, 185, 187

D

dampak pandemi, vi, 37, 45, 117, 184
desa, 4, 15, 22, 23, 24, 25, 45, 51, 52,
55, 56, 67, 68, 95, 109, 111, 184
desa wisata, 4, 52, 55, 56, 67, 68

E

ecotourism, 52, 53, 54, 55
etik Organisasi, 151
etnis, 28, 29, 30, 31, 115, 176

F

faktor, 9, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 78,
80, 88, 99, 109, 115, 134
faktor ekonomi, 33
faktor politik, 29
fasilitas, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 54,
55, 67, 94, 106, 145

G

gagasan, vii, 4, 48, 49, 52, 69, 71, 74,
76, 97, 99, 111, 121, 130, 132, 135,
137, 142, 147
generasi, 7, 14, 83, 91, 111, 124

H

hambatan, 20, 34, 36, 38, 59, 62, 65,
66, 71, 98, 100, 113, 118, 124

I

implementasi, vii, 45, 129, 138

K

kelestarian, 4, 7, 14, 16, 17, 19, 49,
52, 53, 65, 191
kewirausahaan sosial, vi, vii, 47, 48,
49, 53, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64,
69, 70, 71, 74, 77, 78, 80, 82, 83,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 107, 108, 110, 112,
113, 114, 116, 118, 119, 121, 122,
123, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 134, 135, 137, 139, 140, 142,
143, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 184, 187

Kewirausahaan sosial, 47, 62, 78, 87,
90, 108, 109, 120, 150

L

lingkungan, vii, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15,
16, 17, 19, 25, 32, 44, 49, 51, 52,
53, 63, 65, 66, 73, 75, 77, 86, 87,
90, 91, 92, 101, 102, 103, 108, 109,
112, 113, 114, 121, 126, 130, 135,
138, 139, 140, 143, 144, 145, 148,
150, 151, 153, 155, 170, 175, 178,
182, 191

M

modal sosial, 108

N

negarawan, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 44
nilai sosial, 49, 58, 86, 90, 103, 122,
123, 124, 143, 144, 145, 148, 150

P

problem, vii, 15, 19, 46, 61, 62, 63, 64,
73, 77, 78, 82, 86, 88, 90, 91, 93,
94, 95, 103, 106, 112, 113, 114,
118, 119, 121, 130, 131, 132, 135,
137, 162
problematika, ix, 1, 42, 169, 192
psikologi komunitas, 109, 112, 127

R

realitas, vii, 6, 10, 32, 43, 45, 137
risiko, 13, 59, 68, 72, 90

S

Social Entrepreneur, v, ix, 72, 86, 90,
99, 101, 102, 104, 106, 111, 118,
126, 156, 159, 160, 161, 162, 166,
168, 169, 170, 171, 173, 174, 176,
180, 182, 183, 185, 188
sumber daya alam, 2, 3, 4, 6, 9, 16, 32,
91, 156

T

teori perubahan, 79, 80, 139, 140,
141, 144, 150, 154
termarginalkan, 49, 57, 67, 77, 81, 83,
91, 121, 123

V

visi, 61, 71, 72, 79, 83, 96, 143, 151

W

wirausahawan sosial, 58, 59, 60, 62,
63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74,
79, 80, 81, 97, 98, 119, 148
wisata, 3, 34, 35, 52, 53, 55, 65, 67,
111, 182, 191

TENTANG PENULIS



Hadi Suyono lahir di Widoro, Bangunharjo, Sewon, Bantul. Sekarang dia bekerja menjadi dosen di almamaternya, Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Dia menamatkan sarjana pada Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (2001). Setelah menyelesaikan sarjana, memfokuskan kegiatannya membantu berbagai proyek penelitian. Di sela-sela kesibukan melakukan penelitian, dia melanjutkan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Program Studi Psikologi lulus 2005. Program S3 diselesaikan pada Program Doktor Fakultas Psikologi Universitas Airlangga pada tahun 2015.

Sebelum menjalani profesi dosen, dia pernah menjadi wartawan Surat Kabar Mingguan Minggu Pagi (Kedaulatan Rakyat Group). Selain wartawan juga pernah melakoni beberapa pekerjaan lain, di antaranya Direktur CHURDES (*Centre of Human resources Development for Society*), Pemimpin Redaksi Tabloid PIKZI, Peneliti COCD (*Centre of Organizational Culture Development*) Jakarta, dan Peneliti Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Indonesia (LP2I) Semarang.

Buku yang sudah ditulisnya adalah *Social Intelligence. Cerdas Bersama Orang Lain dan Lingkungan* (Aruzz Media). Buku lain yang dihasilkannya berupa *Pengantar Psikologi Sosial 1. Teori dan Aplikasinya* (Penerbit D & H), *Sang Pembelajar Sejati* (Tiara Wacana), dan *Merawat Perdamaian Metode Sistem Peringatan Dini Konflik* (Semesta Ilmu dan CCE), *Soft Skills Training Pendekatan Psikologi Komunitas*, dan *Digital Marketing Pendekatan Psikologi Komunitas*.

Selain itu artikelnya telah dimuat di berbagai media massa baik lokal maupun nasional, seperti Radar Jogja (Jawa Pos), Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Harian Jogja, Bernas, Suara Muhammadiyah, Seputar Indonesia, dan Republika.